



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang sangat kompleks, tidak sekedar terkait kemampuan ekonomi masyarakat tetapi menyangkut status kehidupan sosial dalam makna yang lebih luas, maka perlu dirumuskan kebijakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, mengatur penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah dan rencana aksi kabupaten/kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan;
 - b. pedoman penyusunan rencana aksi program Penanggulangan Kemiskinan;

- c. memandu intervensi program bagi Perangkat Daerah dalam upaya mempercepat Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Daerah;
 - b. memperkuat pengarusutamaan Penanggulangan Kemiskinan dalam setiap langkah dan setiap pengambilan kebijakan Daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan;
 - c. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan di Daerah;
 - d. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
 - e. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
 - f. mewujudkan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

BAB II

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RPKD memuat gambaran umum kondisi umum Daerah, profil kemiskinan Daerah, prioritas program, dan lokasi prioritas.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan.

(3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS PROGRAM
BAB V	LOKASI PRIORITAS
BAB VI	PENUTUP

(4) Uraian RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di Daerah dilaporkan kepada Gubernur Bali selaku Penanggung jawab tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Bali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 10 Desember 2025
BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 10 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAH TAHUN 2025-2029

URAIAN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN
2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR GRAFIK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Dasar Hukum.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KONDISI UMUM DAERAH	7
2.1. Kondisi Geografi	7
2.2. Kondisi Demografi.....	17
2.3. Kondisi Perekonomian.....	21
2.4. Kondisi Kesejahteraan Sosial.....	26
2.5. Kondisi Pelayanan Publik.....	29
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH	36
3.1. Konsep Kemiskinan.....	36
3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan	37
BAB IV PRIORITAS PROGRAM	99
4.1. Pengembangan Logika Program (TOC).....	99
4.2. Analisis Keterkaitan (<i>Causal Relationship</i>).....	113

4.3.	Analisis Keuangan Daerah.....	123
4.4.	Evaluasi Anggaran Belanja.....	130
4.5.	Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi.....	139
BAB V	LOKASI PRIORITAS	143
5.1.	Isu Strategis.....	143
5.2.	Analisis Kuadran Wilayah	145
BAB VI	PENUTUP	168
6.1.	Matriks Prioritas Program	169



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng.....	8
Tabel 2.2 Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2023	8
Tabel 2.3 Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Buleleng	9
Tabel 2.4 Rata-rata Curah hujan Tahunan per stasiun di Provinsi Bali	12
Tabel 2.5 Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kabupaten Buleleng.....	14
Tabel 2.6 Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng.....	16
Tabel 2.7 Distribusi Luas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Buleleng	17
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng Tahun 2023	18
Tabel 2.9 Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan	19
Tabel 2.10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng.....	20
Tabel 2.11 Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023	23
Tabel 2.12 Nilai Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar, dan Nasional Tahun 2019–2023	25
Tabel 2.13 Komponen Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng Tahun 2019–2023	27
Tabel 2.14 Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023	28
Tabel 2.15 Gini Rasio Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	29
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023.....	30
Tabel 2.17 Rasio Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023	31
Tabel 2.18 Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2019-2023	32
Tabel 2.19 Sarana Kesehatan per Kecamatan Tahun 2023	33
Tabel 2.20 Tenaga Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2023	33



DAFTAR TABEL

Tabel 2.21 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.....	34
Tabel 3.1 Capaian Indikator Utama Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Indikator Utama Penanggulangan Kemiskinan Bidang Konsumsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis	45
Tabel 3.3 Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Tahun 2021-2023.....	49
Tabel 3.4 Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	60
Tabel 3.5 Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	71
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023	73
Tabel 3.7 Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	78
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023.....	79
Tabel 3.9 Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023	79
Tabel 3.10 Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	85
Tabel 3.11 Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Ekonomi Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	89
Tabel 3.12 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	90
Tabel 3.13 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	91
Tabel 3.14 Rata-Rata Harga Eceran Beras Kota Singaraja Tahun 2019-2023....	92
Tabel 3.15 Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng, per 16 Juli 2025	94



DAFTAR TABEL

Tabel 3.16 Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Per Desil di Kabupaten Buleleng, per 16 Juli 2025	94
Tabel 3.17 Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Per Desa/Kelurahan Tahun 2025-2029	95
Tabel 4. 1 Strategi Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 ...	108
Tabel 4.2 Realisasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019–2023	124
Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023	125
Tabel 4.4 Perkembangan Kapasitas Fiskal dan Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	128
Tabel 4.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	129
Tabel 4.6 Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Sesuai Proporsi Jenis Belanja Tahun 2019-2023	131
Tabel 4.7 Jumlah Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Tujuan Program (Strategi) per Perangkat Daerah	138
Tabel 4.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng	140
Tabel 5.1 Rekapitulasi Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2025	157
Tabel 6.1 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2030	170



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Wilayah Kabupaten Buleleng	7
Gambar 4.1 Logika Program (TOC) Kemiskinan Konsumsi	100
Gambar 4.2 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Pendidikan.....	101
Gambar 4.3 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Kesehatan	102
Gambar 4.4 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar	103
Gambar 4.5 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	104
Gambar 4.6 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan	105
Gambar 4.7 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Sosial	106
Gambar 5.1 Pembagian Kuadran Prioritas Wilayah.....	146
Gambar 5.2 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan	147
Gambar 5.3 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Gerokgak	148
Gambar 5.4 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Seririt .	149
Gambar 5.5 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Buleleng	150
Gambar 5.6 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Banjar	151
Gambar 5.7 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Kubutambahan	152
Gambar 5.8 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Sukasada	153
Gambar 5.9 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Sawan.	154
Gambar 5.10 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Tejakula	155
Gambar 5.11 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Busungbiu	156
Gambar 5.12 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan APM SD/MI Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025.....	160
Gambar 5.13 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan APM SMP/MTs Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025.....	161



- Gambar 5.14 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 162
- Gambar 5.15 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Angka Kematian Ibu (AKI) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 163
- Gambar 5.16 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 164
- Gambar 5.17 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025 165
- Gambar 5.18 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan PMKS (%) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025..... 166



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat.....	10
Grafik 2.2 Perkembangan Penduduk di Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 (Ribuan jiwa)	18
Grafik 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	22
Grafik 2.4 Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	23
Grafik 2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2019-2023.....	26
Grafik 3.1 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	38
Grafik 3.2 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	39
Grafik 3.3 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	41
Grafik 3.4 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	43
Grafik 3.5 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	45
Grafik 3.6 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	51
Grafik 3.7 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	52
Grafik 3.8 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 .	54
Grafik 3.9 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	55
Grafik 3.10 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	56
Grafik 3.11 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	57



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.12 Perkembangan dan Efektivitas Angka Putus Sekolah (APtS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	59
Grafik 3.13 Perkembangan dan Efektivitas Angka Putus Sekolah (APtS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	59
Grafik 3.14 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	63
Grafik 3.15 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	64
Grafik 3.16 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	66
Grafik 3.17 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	67
Grafik 3.18 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	69
Grafik 3.19 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	70
Grafik 3.20 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	74
Grafik 3.21 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	75
Grafik 3.22 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	77
Grafik 3.23 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	81
Grafik 3.24 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 .	82
Grafik 3.25 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	84
Grafik 3.26 Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	86
Grafik 3.27 Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Inflasi (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	88



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Konsumsi Indikator Utama Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	114
Grafik 4.2 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Pendidikan Indikator Utama Rata-Rata Lama Sekolah, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	115
Grafik 4.3 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Kesehatan Indikator Utama Umur Harapan Hidup, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	117
Grafik 4.4 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Indikator Utama Persentase Penduduk Miskin, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	118
Grafik 4.5 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Indikator Utama Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	119
Grafik 4.6 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan Indikator Utama Indeks Ketahanan Pangan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	121
Grafik 4.7 Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Sosial Indikator Utama Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	122
Grafik 4.8 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023	130
Grafik 4.9 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Sesuai Proporsi Jenis Belanja Tahun 2019-2023	132
Grafik 4.10 Perkembangan Belanja Operasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	133
Grafik 4.11 Perkembangan Belanja Modal APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	134
Grafik 4.12 Perkembangan Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023.....	135
Grafik 4.13 Perkembangan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Bersumber APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023	136
Grafik 4.14 Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Tujuan Program (Strategi), Kabupaten Buleleng Tahun 2023	137



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kemiskinan adalah isu strategis dan menjadi masalah utama semua negara. Oleh sebab itu, masalah kemiskinan secara khusus dituangkan kedalam tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penanganan masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan menjadi tanggungjawab semua pihak baik itu pemerintah Pusat, Daerah beserta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. Karena sifatnya yang tematik dan multidimensi tersebut, maka agar penanganan masalah kemiskinan menjadi efektif, maka perlu dilakukan koordinasi, sinergi antar semua pihak, dan integrasi antar program-program lintas sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dalam proses implementasinya dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Percepatan dalam penurunan angka kemiskinan telah diupayakan melalui peningkatan akselerasi penanggulangan kemiskinan, yang ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang percepatan program penanggulangan kemiskinan. Dalam Perpres Nomor 166 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengawal pelaksanaan Program Perlindungan Sosial ditingkat Pusat, sedangkan level daerah dikoordinir oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

Sebagai langkah untuk memperkuat percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, Pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk meningkatkan akselerasi dan koordinasi lintas kelembagaan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

Implikasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan didaerah adalah pembentukan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) yang dilegitimasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan



Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.

Selain aspek kebijakan, salah satu aspek penting yang mendukung rencana penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya, dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatiannya pada kondisi kemiskinan di daerah masing-masing. Data kemiskinan tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak Tahun 1998-2019 terus menurun hingga menyentuh 1 digit. Namun pada Tahun 2020 dan 2021 ditengah pandemi global *COVID-19* yang melanda seluruh dunia, tantangan dalam menurunkan angka kemiskinan kembali teruji. Angka kemiskinan nasional kembali menyentuh 2 digit ditahun 2020 sebesar 10,19% dan di tahun 2021 turun menjadi 9,71%. Untuk mengatasi hal ini, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk membantu pengentasan kemiskinan. Selain itu berbagai program penanggulangan kemiskinan diperkuat dan dimaksimalkan untuk memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tantangan terutama akibat pandemi agar tidak makin jatuh ke jurang kemiskinan.

Perkembangan persentase penduduk miskin Provinsi Bali selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 sebesar 3,61% menjadi 4,25% di tahun 2023 atau terjadi peningkatan sebanyak 0,64 poin persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 193.780 jiwa yang tersebar di 9 (sembilan) Kabupaten/kota di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019 sampai dengan 2023 berfluktuatif. Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 sebesar 5,19%, naik menjadi 5,32% tahun 2020, 6,12% tahun 2021, 6,21% di tahun 2022, menurun pada tahun 2023 menjadi 5,85%. Terjadi peningkatan sebesar 0,66 poin persen selama kurun waktu tersebut. Dengan perkembangan jumlah penduduk miskin tahun 2019 sebanyak 34.260 jiwa mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2023 menjadi sebesar 39.520 jiwa.



Dalam rangka percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin diperlukan adanya rancangan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih progresif, inovatif dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Diperlukan analisis kemiskinan di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketenagakerjaan dan bidang lainnya yang dilaksanakan melalui penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan kebijakan isu kemiskinan bagi pemangku kepentingan dalam menyinergikan dan menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RPKD Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam memecahkan isu kemiskinan.
2. Membangun konsensus bersama untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui pendekatan hak-hak dasar dan pendekatan partisipatif dalam perumusan strategi dan kebijakan.
3. Menyelaraskan dan membentuk sinergitas lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
4. Memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan dalam setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan.
5. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
 10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan



- Kabupaten/kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2024-2044;
 13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2);
 14. Keputusan Bupati Buleleng Nomor 100.3.3.2/65/HK/2025 tentang Tim dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

- 2.1 Kondisi Geografi
- 2.2 Kondisi Demografi
- 2.3 Kondisi Perekonomian
- 2.4 Kondisi Kesejahteraan Sosial
- 2.5 Kondisi Pelayanan Publik

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

- 3.1 Konsep Kemiskinan
- 3.2 Analisis Karakteristik Kemiskinan

BAB IV PRIORITAS PROGRAM

- 4.1 Pengembangan Logika Program (*Theory of Change*)
- 4.2 Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)
- 4.3 Analisis Keuangan Daerah
- 4.4 Evaluasi Anggaran Belanja
- 4.5 Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

BAB V LOKASI PRIORITAS

- 5.1 Isu Strategis



5.2 Analisis Kuadran Wilayah

BAB VI PENUTUP

6.1 Matriks Prioritas Program



**BAB II
KONDISI UMUM DAERAH**

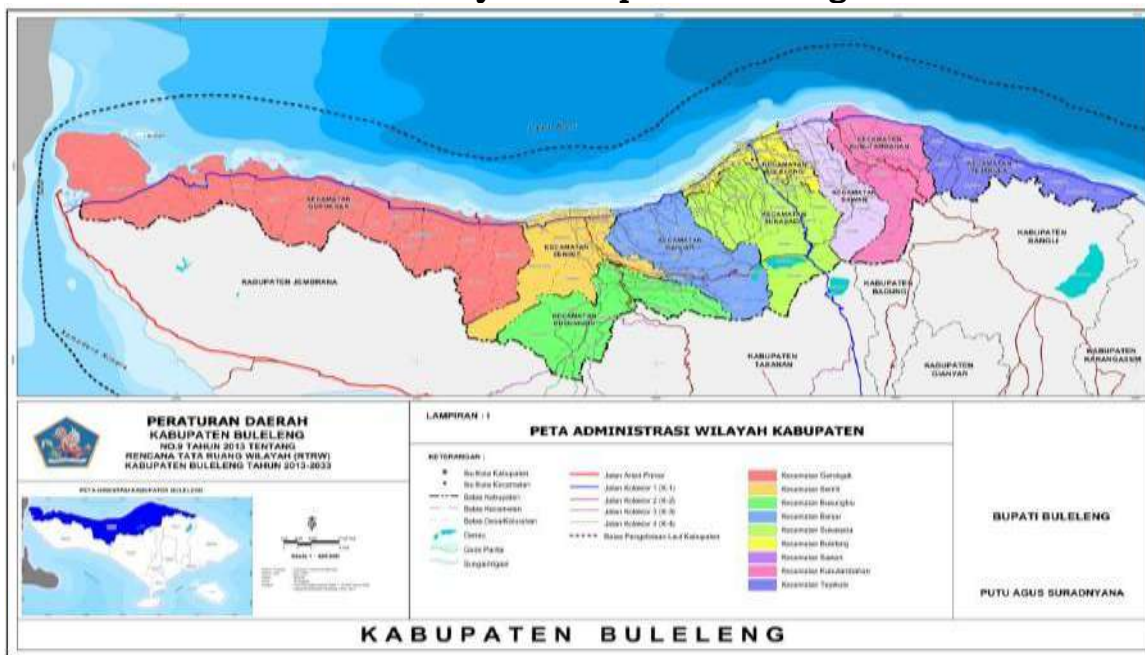
2.1. Kondisi Geografi

2.1.1 Wilayah Administrasi

Secara geografis Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8° 03' 40" - 8° 23' 00" Lintang Selatan dan 114° 25' 55" - 115° 27' 28" Bujur Timur, berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari Barat ke Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana
- Sebelah Utara : Laut Bali
- Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung dan Bangli

**Gambar 2.1.
Peta Wilayah Kabupaten Buleleng**



Sumber Data: RTRW Kab.Buleleng

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian Selatan, sedangkan di bagian Utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai. Tipologi geografis yang demikian dikenal sebagai Nyegara Gunung, posisi yang cukup strategis menurut konsep Hindu yang



menganut sistem hulu (ulun) dan hilir (teben). Kabupaten Buleleng memiliki potensi pembangunan berupa luas wilayah yang cukup besar, yaitu 1.365,88 km² atau 24,25% dari luas Provinsi Bali. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Buleleng mencakup 9 kecamatan, 129 desa, 19 kelurahan, 563 dusun/banjar, 63 lingkungan, 199 Desa Pakraman, dan 249 Rukun Tangga.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Gerokgak	356,57	26,11
2	Seririt	111,78	8,18
3	Busungbiu	196,62	14,40
4	Banjar	173	12,64
5	Sukasada	172,93	12,66
6	Buleleng	46,94	3,44
7	Sawan	92,52	6,77
8	Kubutambahan	118,24	8,66
9	Tejakula	97,68	7,15
Jumlah		1.365,88	100,00

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, 2023

Tabel 2.2
Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Dusun/ Banjar	Lingkungan	Desa Pakraman	Rukun Tangga
1	Gerokgak	14	-	78	-	14	-
2	Seririt	20	1	80	5	25	19
3	Busungbiu	15	-	43	-	16	-
4	Banjar	17	-	74	-	17	-
5	Sukasada	14	1	66	5	21	-
6	Buleleng	12	17	41	53	21	230
7	Sawan	14	-	67	-	18	-
8	Kubutambahan	13	-	54	-	22	-
9	Tejakula	10	-	60	-	45	-
Jumlah		129	19	563	63	199	249

Sumber Data : Satu Data Buleleng, 2023



2.1.2 Topografi

1. Kemiringan Lahan

Wilayah Kabupaten Buleleng tersebar pada berbagai kelas lereng, mulai dari 0% s.d. 40%. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Buleleng terdiri dari lahan yang datar hingga berlereng agak curam. Distribusi kemiringan lereng seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kemiringan Tanah di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Landai 0-25%	Miring 25-40%	Jumlah
1	Gerokgak	18.350,00	3.843,00	22.193,00
2	Seririt	8.478,00	900,00	9.378,00
3	Busungbiu	2.448,00	7.080,00	9.528,00
4	Banjar	1.628,75	1.062,00	2.690,75
5	Sukasada	13.630,00	1.170,00	14.800,00
6	Buleleng	4.694,00	-	4.694,00
7	Sawan	8.689,00	5.862,50	14.551,50
8	Kubutambahan	10.673,00	1.151,00	11.824,00
9	Tejakula	4.902,25	2.894,75	7.797,00
	Jumlah	73.493,00	23.963,25	97.456,25

Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021

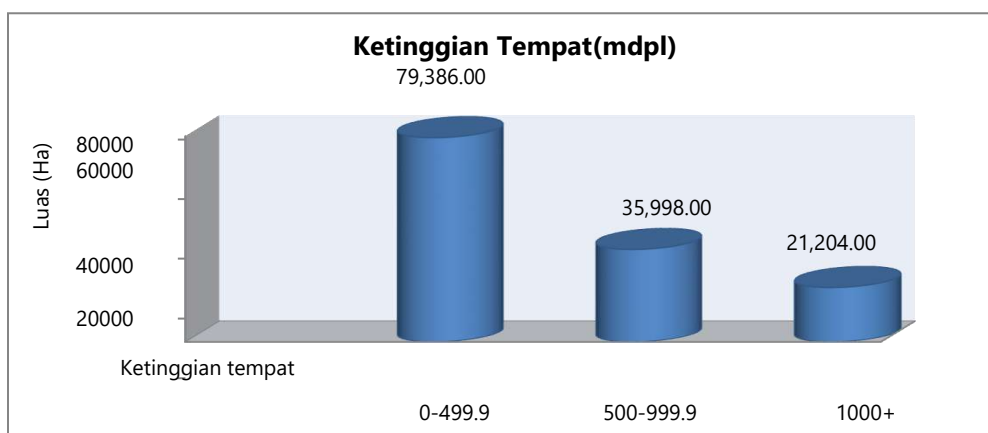
Data pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa secara kuantitatif, luas wilayah yang berada pada kemiringan tanah 0-25% mendominasi kondisi lahan di Buleleng, yaitu 75,42% dari total luas lahan. Sebagian besar wilayah merupakan lahan berlereng karena posisi wilayah Kabupaten Buleleng yang berupa perbukitan di bagian Selatan dan agak landai sampai ke pantai di bagian Utara (Nyegara Gunung). Kondisi topografi yang demikian diupayakan dikelola dengan baik karena berpotensi rawan bencana alam, terutama tanah longsor dan banjir bandang.



2. Ketinggian Tempat

Ditinjau dari ketinggian tempat, wilayah Kabupaten Buleleng sebagian besar berada pada ketinggian 0-499,9 mdpl yaitu 58,12%. Daerah yang berada pada ketinggian di atas 500-1.000 mdpl yaitu 26,35% dan hanya sekitar 15,52% berada pada ketinggian lebih dari 1.000 mdpl, sebagaimana Grafik 2.1 berikut.

Grafik 2.1
Perbandingan Luas Wilayah Kabupaten Buleleng Berdasarkan Ketinggian Tempat



Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2024 (diolah)

2.1.3 Geologi

1. Struktur dan Karakteristik Geologi

Struktur geologi wilayah Kabupaten Buleleng tersusun oleh: (a) lapisan aluvial yang tersebar di bagian Utara, (b) batuan gunung berapi tersebar di bagian Selatan, dan (c) formasi Asah, formasi Palasari, dan formasi Prapat Agung tersebar di bagian Barat.

2. Potensi Geologi

Kabupaten Buleleng mempunyai potensi mineral bukan logam dan batuan yang terbatas, yaitu sekitar 2.773,72 Ha (Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033). Jenis batuan yang ada antara lain: batu kapur, batu apung, batu lahar, batu pilah, tanah liat, batu andesit, dan sirtu. Selama lima tahun terakhir, pengelolaan bahan-bahan galian tersebut belumlah optimal. Jika dikelola dengan baik tentu dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan.



2.1.4 Hidrologi

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pengelolaan DAS di wilayah Kabupaten Buleleng difokuskan pada DAS prioritas I dan II. DAS prioritas I adalah DAS yang pengelolaannya kategori paling tinggi karena menunjukkan kondisi dan permasalahan biofisik dan sosial ekonomi DAS paling kritis atau tidak sehat. Sedangkan prioritas II adalah DAS-DAS yang prioritas pengelolaannya kategori sedang.

Dari 12 Sub Wilayah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (SWP DAS) yang ada di Provinsi Bali, 9 SWP DAS diantaranya melingkupi wilayah Kabupaten Buleleng. DAS kategori prioritas 1 yaitu Unda dan Blingkang Anyar, sedangkan Teluk Terima Pancoran, Pangiyung, Saba Daya, Biluk Poh Gumbrih, Klatakan Lubang, Leh Balian, dan Oten Sungai masuk kategori prioritas 2.

2. Sungai

a). Kuantitas Sungai

Secara kuantitatif, ada 88 sungai di Kabupaten Buleleng; 65 sungai (73,86%) diantaranya merupakan sungai tadah hujan, yaitu sungai yang hanya mengalirkan air pada musim hujan, sisanya 23 sungai atau 26,14% merupakan sungai mengalir sepanjang tahun. Panjang sungai antara 2,3 - 23,2 km. Tukad Saba merupakan sungai terpanjang yaitu 23,2 km. Sedangkan yang terpendek adalah Tukad Sema hanya 2,3 km. Debit maksimal sungai bervariasi antara 112.000-62.119.000 m³/tahun. Sungai yang memiliki debit air tahunan terbesar adalah Tukad Saba mencapai 62.119.000 m³/tahun, sedangkan yang terkecil adalah Tukad Pekecor hanya 112.000 m³/tahun.

b). Kualitas Air Sungai

Belum semua sungai yang terdapat di wilayah Kabupaten Buleleng terpantau kualitasnya. Dinas Lingkungan Hidup memfokuskan pemantauan rutin setiap tahun terhadap 3 (tiga) sungai utama, yaitu Sungai/Tukad Banyumala, Sungai/Tukad Saba dan Sungai/Tukad Buleleng. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas air sungai pada bagian hulu dan tengah masih tergolong baik, namun pada bagian hilir sudah tercemar dan tidak layak sebagai air baku air minum karena nilai Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Total Fosfat sebagai P, Besi, Nitrit sebagai N, Fecal Coliform dan



Total Coliform melampaui baku mutu air minum Pergub Bali Nomor 16 Tahun 2016.

3. Mata Air

Mata air bagi masyarakat Buleleng memiliki nilai yang sangat strategis. Selain memiliki fungsi sosial ekonomi sebagai sumber air baku dan air irigasi, juga punya fungsi religi, yaitu sebagai sarana pelaksanaan ritual/upacara adat/agama. Ke depan, kelestarian sumber mata air perlu terus ditingkatkan. Terdapat 243 buah sumber mata air di Kabupaten Buleleng dengan potensi air lebih dari 1.125 liter per detik atau 79,528 juta m³/tahun. Dari 243 sumber mata air yang ada di kabupaten Buleleng, sekitar 81 sumber mata air digunakan untuk penyediaan air minum, sisanya untuk irigasi dan lain-lain.

2.1.5 Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, sebagian besar wilayah Kabupaten Buleleng beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan suhu udara bervariasi berdasarkan ketinggian, yaitu antara 19°–33 °C. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah ini berkisar antara 82%–75%. Oleh karena beriklim tropis basah dan kering, wilayah Buleleng memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau di wilayah Buleleng berlangsung pada periode Mei–Oktober dengan bulan terkering adalah bulan Agustus. Sementara itu, musim penghujan berlangsung pada periode Desember–Maret dengan curah hujan bulanan lebih dari 200 mm per bulan. Di antara musim kemarau dan hujan terdapat musim pancaroba yang biasanya terjadi pada bulan April dan November. Curah hujan tahunan wilayah Buleleng berkisar antara 1.000–2.300 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80–120 hari hujan per tahun.

Tabel 2.4
Rata-rata Curah hujan Tahunan per stasiun di Provinsi Bali

No	Nama Stasiun Curah Hujan	Koordinat	Rata-Rata Curah Hujan Tahunan (mm/th)
1	Gerokgak	08° 11' 09" LS - 114° 47' 46" BT	1250
2	Wanagiri	08° 14' 14" LS - 115° 08' 20" BT	2935
3	Munduk	08° 15' 51" LS - 115° 03' 02" BT	2139
4	Tukad Mungga	08° 08' 29" LS - 115° 03' 25" BT	1084
5	Patas	08° 12' 44" LS - 114° 47' 17" BT	1240



6	Sukasada	08° 08' 13" LS - 115° 06' 03" BT	1536
7	Tanguwisia	08° 11' 29" LS - 114° 57' 05" BT	1106
8	Tejakula	08° 07' 35" LS - 115° 20' 31" BT	1848
9	Sumber Klampok	08° 10' 26" LS - 114° 29' 03" BT	1299
10	Busungbiu	08° 15' 37" LS - 114° 58' 13" BT	2164
11	Bengkala	08° 06' 36" LS - 115° 10' 53" BT	1602
12	Gretek	08° 09' 10" LS - 115° 24' 56" BT	1508

Sumber Data : BMKG, 2021

Merujuk pada data pada Tabel 2., stasiun curah hujan tersebut merupakan beberapa stasiun yang terdekat dengan Kabupaten Buleleng yang dipilih untuk mengetahui sebaran rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Buleleng. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik interpolasi. Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik interpolasi melalui software SIG, diperoleh peta sebaran curah hujan rata-rata tahunan Kabupaten Buleleng. Diketahui hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng memiliki rata-rata curah hujan tahunan 1000-2500 mm/th. Hanya saja pada beberapa bagian, khususnya di bagian selatan Kecamatan Kubutambahan, Sawan, Sukasada, Banjar dan Busungbiu memiliki rata-rata curah hujan tahunan lebih dari 2500 mm/th.

2.1.6 Kawasan Rawan Bencana

Secara umum, jenis-jenis bencana yang relatif sering terjadi di daerah Buleleng yaitu erosi/tanah longsor, abrasi dan banjir. Selain itu terdapat juga daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya kekeringan dan gempa bumi.

1) Kawasan Rawan Erosi/Tanah Longsor

Berdasarkan informasi yang dapat dikumpulkan dan dilakukan analisis, daerah-daerah yang dikategorikan sebagai kawasan rawan erosi/tanah longsor meliputi Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Busungbiu, Kecamatan Sukasada dan Kecamatan Tejakula.



Tabel 2.5
Kawasan Rawan Tanah Longsor di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Pengaruh Erosi	Keterangan
1	Gerokgak	<ul style="list-style-type: none"> ✓48,50% wilayahnya berada pada kemiringan di atas 25%. ✓69,60% terdiri atas tanah dari jenis latosol coklat 	
2	Busungbiu	51,63% wilayahnya berada pada daerah kemiringan di atas 40%, dan 36,10% berada pada kemiringan 25 -39,90%	
3	Sukasada	<ul style="list-style-type: none"> ✓14,42% daerah terjal (kemiringan di atas 40%), dan 6,77% merupakan daerah miring (25- 39,9%) ✓Jenis tanah yang dominan (regosol) memiliki tekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60% 	Di beberapa tempat pada daerah terjal masih sering terjadi bahaya erosi pada waktu musim hujan
4	Tejakula	<ul style="list-style-type: none"> ✓29,64% wilayah ini berada pada daerah miring dan 20,18% berada pada daerah terjal ✓49,90% lahan dipergunakan untuk tegalan/kebun, 21,49% untuk perkebunan. ✓Tanah regosol coklat 98,82%. Tanah regosol bertekstur kasar dengan kadar pasir lebih dari 60%. 	

Sumber Data : RTRW Kabupaten Buleleng, 2021

Pada setiap kecamatan di Kabupaten Buleleng memiliki daerah miring sampai terjal, kecuali Kecamatan Buleleng. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagai wilayah yang rawan terhadap erosi. Secara hidrologis daerah miring dan terjal memiliki nilai koefisien pengaliran (kf) lebih tinggi dibandingkan daerah datar, sehingga butir-butir air hujan yang mencapai bumi secara relatif lebih besar menjadi aliran permukaan dibandingkan dengan yang diresapkan ke dalam tanah.



Gangguan kerusakan hutan dan DAS dominan terjadi di daerah terjal dan miring. Umumnya longsor terjadi di daerah hulu dan disebabkan oleh perbedaan intensitas hujan yang menyolok antara musim hujan dan kemarau, serta distribusi hujan yang tidak merata antar wilayah dataran tinggi dan rendah. Kerusakan hutan dan DAS juga ada hubungannya dengan penggunaan lahan oleh masyarakat Buleleng, dimana hampir sebagian besar penduduk (49,90%) bertani dan 90% bertani lahan kering, umumnya pada lahan-lahan miring.

2) Kawasan Rawan Banjir

Banjir dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa alam yang disebabkan oleh meningkatnya debit air pada suatu daerah aliran yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Selain itu, banjir juga dipengaruhi oleh faktor-faktor topografi lahan, vegetasi, sifat sifat tanah, dan perilaku manusia pada suatu daerah. Secara cakupan luas, maka banjir umumnya ditentukan dari besar kecilnya daerah tangkapan air (catchment area) dan ada tidaknya saluran pembuang (sungai) sebagai penampung aliran air. Peristiwa banjir merupakan akibat lanjutan dari kerusakan hutan dan DAS, dan peristiwa ini memang secara alami terjadi di wilayah dengan kondisi hidrologis seperti Kabupaten Buleleng. Hal ini merupakan indikasi rusaknya permukaan bumi, imbuan air tanah yang merosot, sebaliknya aliran permukaan yang meningkat, menyebabkan petani makin sulit mengelola sumberdaya air lebih-lebih pada sistem irigasi terbuka dengan aliran gravitasi tanpa melalui proses penampungan terlebih dahulu. Akibatnya luas panen dan produksi padi merosot, sumberdaya air semakin langka, eksploitasi sumberdaya tanah yang tidak terarah. Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Sosial dan bencana banjir yang pernah terjadi maka kawasan rawan banjir hampir terdapat di semua kecamatan, kecuali Kecamatan Sukasada dan Busungbiu dengan potensi luas bahaya adalah 33.442 Ha.

3) Kawasan Rawan kekeringan

Selain bahaya banjir di musim hujan, di musim kemarau wilayah Buleleng juga memiliki potensi bencana kekeringan. Berdasarkan Tabel 2.7 terlihat secara keseluruhan bencana kekeringan memiliki potensi luas bahaya di Kabupaten Buleleng adalah 135.741 Ha yang berada pada kelas sedang. Kelas bahaya sedang Kabupaten Buleleng berdasarkan pada kelas bahaya maksimal dari setiap kecamatan terdampak bencana. Hal ini dapat digambarkan melalui sebaran bahaya kekeringan menurut kecamatan pada tabel berikut.



Tabel 2.6
Sebaran Kerawanan Kekeringan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Potensi (Ha)		Jumlah (Ha)
		Rendah	Sedang	
1	Buleleng	-	4.653	4.653
2	Sukasada	-	16.809	16.809
3	Seririt	-	11.082	11.082
4	Busungbiu	-	19.650	19.650
5	Tejakula	-	9.769	9.769
6	Banjar	-	17.104	17.104
7	Kubutambahan	-	11.807	11.807
8	Gerokgak	-	35.634	35.634
9	Sawan	-	9.232	9.232
Jumlah (Ha)		-	135.741	135.741

Sumber Data: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng

4) Kawasan Rawan Gempa Bumi

Kawasan ini terdapat pada kawasan di sekitar pusat-pusat sumber gempa bumi yang menimbulkan kerusakan. Berdasarkan RTRW Provinsi Bali, terdapat 4 (empat) titik lokasi pusat-pusat sumber gempa dimana salah satunya terdapat di utara perairan kawasan Seririt. Hal ini juga diperkuat oleh data dari Dinas Sosial yang juga menyebutkan bahwa daerah-daerah yang rawan terhadap terjadinya gempa bumi meliputi 12 desa di Kecamatan Seririt yaitu Desa Seririt, Desa Kalisada, Desa Banjar Asem, Desa Pangkung Paruk, Desa Uma Anyar, Desa Kalopaksa, Desa Pengastulan, Desa Patemon, Desa Ringdikit, Desa Sulanyah, Desa Rangdu, dan Desa Bubunan.

5) Mitigasi Bencana

Potensi tertinggi untuk jasa pengaturan bencana di Pulau Bali terletak pada kategori sedang dan tinggi. Untuk kategori sedang luasannya mencapai 255.241,96 Ha atau 44,77%. Dari luasan tersebut Kabupaten Buleleng memiliki potensi terbesar dengan luas 61.938,61 Ha atau 10,86%. Sedangkan, untuk kategori tinggi, luasan lahan yang memiliki potensi yaitu sebesar 177.713,35 Ha atau mencapai 31,17%. Pada kategori ini Kabupaten Buleleng berada di tempat teratas yaitu dengan luas sebesar 51.668,69 Ha atau dengan prosentase sebesar 9,06%. Sedangkan, untuk distribusi luas jasa pengaturan pencegahan dan mitigasi bencana di Kabupaten Buleleng didominasi oleh klasifikasi Sedang seluas 61.609,51 hektar.



Tabel 2.7
Distribusi Luas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Distribusi Luas (Ha)					Total
		Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
1	Gerokgak	79,29	3.788,48	19.526,05	9.958,58	7.606,22	40.958,61
2	Seririt	0	403,78	5.868,62	3.812,88	2.167,90	12.253,18
3	Banjar	0	249,98	4.813,68	8.367,39	456,71	13.887,76
4	Busungbiu	0	122,97	1.627,51	10.556,97	1.764,20	14.071,64
5	Sukasada	0	326,80	6.012,21	8.340,56	1.398,59	16.078,16
6	Buleleng	0	1.368,42	1.275,70	1.982,61	0	4.626,73
7	Sawan	0	307,36	4.626,77	3.895,52	299,67	9.129,32
8	Kubutambahan	0	146,38	9.527,07	2.051,24	132,31	11.856,99
9	Tejakula	0	132,99	8.331,91	1.657,51	0	10.122,41
Jumlah (Ha)		79,29	6.847,15	61.609,51	50.623,26	13.825,59	132.984,79

Sumber Data : Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Buleleng

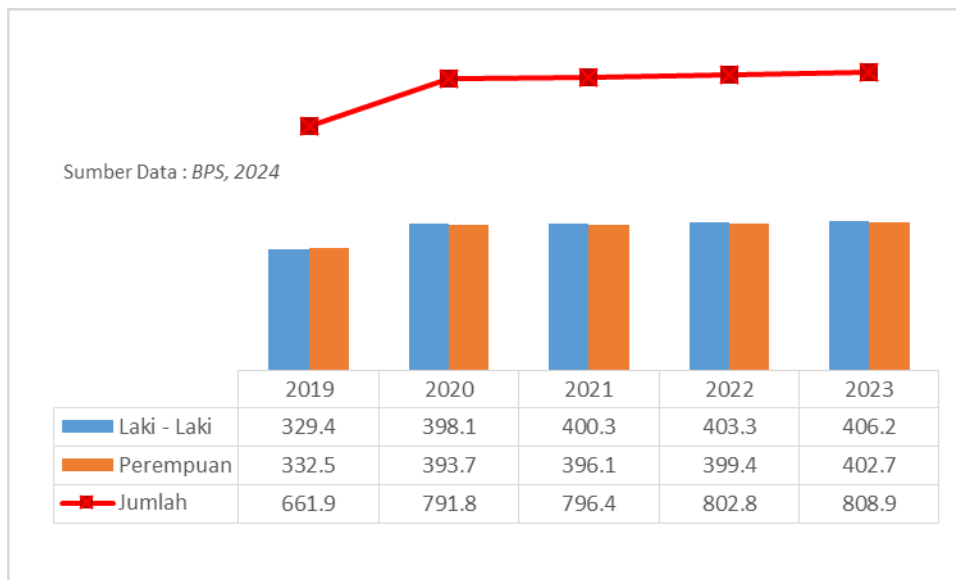
2.2. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan karena paling berperan dalam pembangunan baik sebagai subyek sekaligus obyek. Jumlah penduduk dapat menjadi nilai tambah sekaligus beban bagi pemerintah apabila tidak ditangani dengan baik. Penduduk yang berkualitas dapat memperkuat produksi dan menjadi potensi ekonomi. Sebaliknya, pertambahan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi bom waktu yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan hingga bermuara pada terhambatnya pembangunan. Masalah kesenjangan sosial, penyediaan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan bahkan hingga ke perumahan adalah sebagian masalah yang ditimbulkan dari keadaan tersebut.

Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Buleleng selama kurun tahun 2019 sampai tahun 2023 cenderung meningkat, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.



Grafik 2.2
Perkembangan Penduduk di Kabupaten Buleleng menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 (Ribu jiwa)



Terlihat peningkatan jumlah penduduk yang signifikan dari kondisi tahun 2019 sebanyak 661,9 ribu jiwa yang didominasi oleh penduduk perempuan, menjadi 791,8 ribu jiwa pada tahun 2020 namun di dominasi oleh penduduk laki-laki. Kondisi tersebut tidak terlepas dari perhitungan yang digunakan. Dimana jumlah penduduk di tahun 2019 merupakan data proyeksi berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, sedangkan data tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020. Jumlah penduduk mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 terlihat mengalami kenaikan landai, dari sebanyak 796,4 ribu jiwa hingga 808,9 ribu jiwa yang terus di dominasi oleh penduduk laki-laki. Kondisi data tersebut merupakan data proyeksi berdasarkan Long Form Sensus Penduduk tahun 2020.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Kelompok Umur	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	31.455	30.181	61.636
5-9	30.507	29.201	59.708
10-14	31.562	29.855	61.417
15-19	32.992	31.119	64.111



20-24	32.476	30.858	63.334
25-29	31.593	29.991	61.584
30-34	32.402	31.008	63.410
35-39	31.944	30.560	62.504
40-44	30.305	28.739	59.044
45-49	26.717	26.099	52.816
50-54	22.944	23.652	46.596
55-59	21.328	23.117	44.445
60-64	18.009	19.617	37.626
65-69	13.786	15.329	29.115
70-74	9.021	10.728	19.749
75+	9.155	12.622	21.777
Kabupaten Buleleng	406.196	402.676	808.872

Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribuan)					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Gerokgak	85,14	97,55	99,13	101,14	102,50	0,87
2	Seririt	73,23	93,41	95,67	98,38	96,50	-0,47
3	Busungbiu	41,11	52,69	53,90	55,36	53,80	-1,00
4	Banjar	73,06	86,21	87,68	89,54	88,20	-0,58
5	Sukasada	78,28	89,77	91,28	93,19	94,20	0,98
6	Buleleng	138,64	150,21	151,75	153,93	155,50	0,17
7	Sawan	60,93	80,17	82,26	84,76	85,90	0,18
8	Kubutambahan	55,98	68,78	70,11	71,76	74,20	0,20
9	Tejakula	54,23	73,02	74,87	77,08	79,50	0,43
	Kabupaten Buleleng	660,60	791,81	806,65	825,14	830,20	0,18

Sumber Data: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data hasil registrasi penduduk yang dilakukan BPS Kabupaten Buleleng, perkembangan penduduk Kabupaten Buleleng meningkat



signifikan lima tahun terakhir. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng tahun 2019 sebesar 660,60 (ribu jiwa), meningkat tahun 2020 menjadi 791,81 (ribu jiwa), tahun 2021 sebesar 806,65 (ribu jiwa) tahun 2022 menjadi 825,14 (ribu jiwa) dan 2023 menjadi 830,20 (ribu jiwa). Pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut tertinggi di Kecamatan Sukasada (0,98%) dan Kecamatan Gerokgak (0,87%). Sedangkan pertumbuhan negatif tertinggi ada di Kecamatan Busungbiu (-1,00%).

Sebaran jumlah penduduk menurut kecamatan, terbanyak di Kecamatan Buleleng yaitu 155,50 ribu jiwa atau 18,73%. Sedangkan terendah berada di Kecamatan Busungbiu 53,80 ribu jiwa atau 6,48%. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng sebesar 608 jiwa/km².

Tabel 2.10
Kepadatan Penduduk Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk per Km ²
1	Gerokgak	102,50	356,57	287
2	Seririt	96,50	111,78	863
3	Busungbiu	53,80	196,62	274
4	Banjar	88,20	172,60	511
5	Sukasada	94,20	172,93	545
6	Buleleng	155,50	46,94	3312
7	Sawan	85,90	92,52	928
8	Kubutambahan	74,20	118,24	628
9	Tejakula	79,50	97,68	814
Jumlah		830,20	1.365,88	608

Sumber Data: Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024 (diolah)

Dari tabel diatas terlihat kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Busungbiu, diikuti oleh Kecamatan Gerokgak, Kecamatan Banjar, Kecamatan Sukasada, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Tejakula, Kecamatan Seririt, Kecamatan Sawan dan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Buleleng. Berdasarkan data kepadatan penduduk tersebut terlihat bahwa persebaran kepadatan penduduk di Kabupaten Buleleng cenderung berkelompok antara daerah Barat, Timur, Selatan dan Utara. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterpusatan aktivitas di wilayah tertentu. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Buleleng terkait indikasi



ketimpangan antar wilayah. Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu menyiapkan diri terkait meningkatnya jumlah penduduk tidak hanya di kecamatan dengan karakteristik perkotaan, tetapi juga di beberapa kecamatan yang diprediksi akan menjadi kecamatan dengan karakteristik perkotaan sebagai akibat dari adanya amanat perencanaan pembangunan secara agregat. Seperti perencanaan pembangunan Bandara Baru Bali Utara di wilayah Barat, pembangunan sarana pendidikan tinggi di Kecamatan Buleleng, dan lain-lain.

2.3. Kondisi Perekonomian

Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah. PDRB dapat dibedakan atas dasar harga konstan dan harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut. Selanjutnya, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

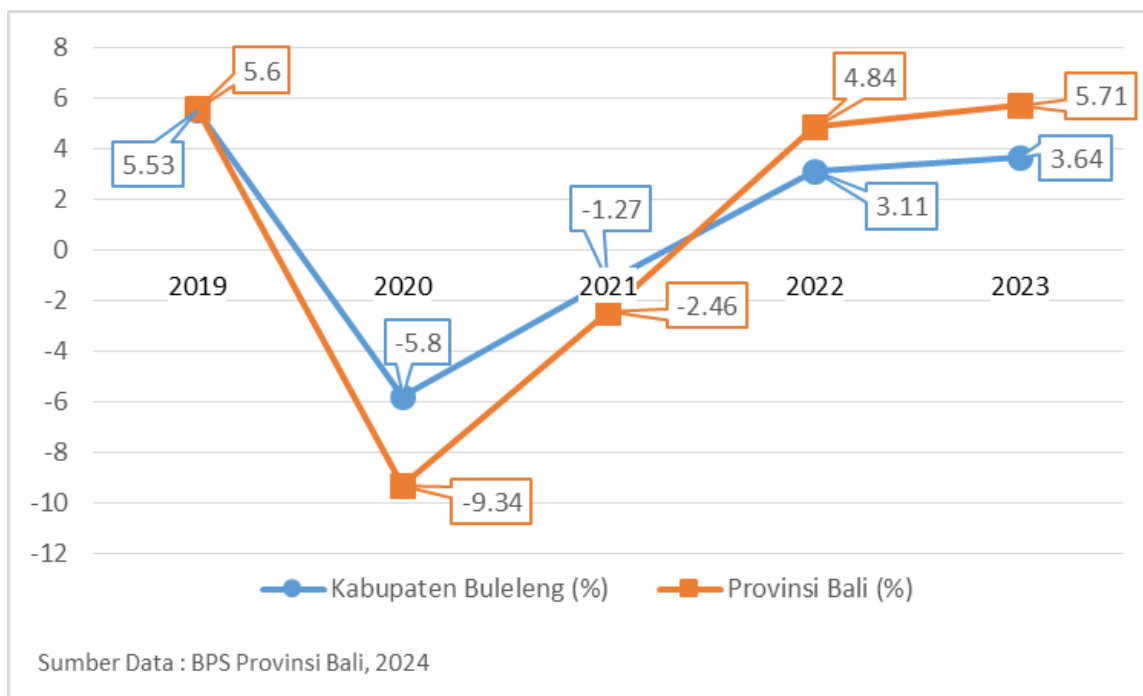
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai kondisi makro ekonomi suatu wilayah yang mencerminkan kinerja pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan. Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pembangunan adalah kesejahteraan rakyat seluas-luasnya. Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dan perbandingannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali disajikan



pada table berikut.

Grafik 2.3
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali
Tahun 2019-2023

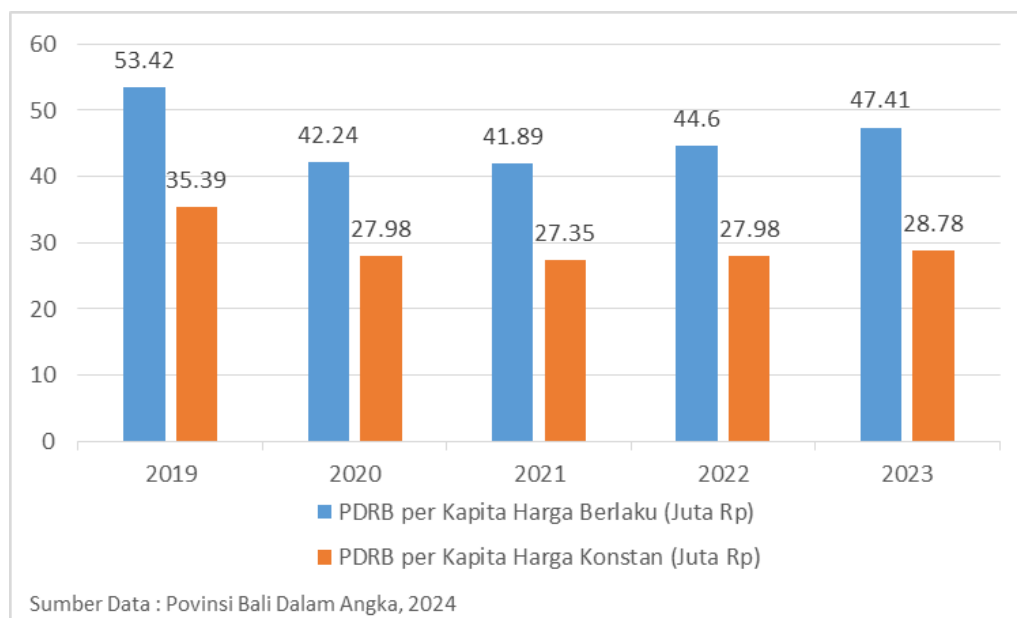


b. PDRB per Kapita

PDRB per Kapita penduduk Kabupaten Buleleng pada lima tahun terakhir berfluktuasi dengan trend penurunan. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp53,42 juta pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp47,41 juta pada Tahun 2023. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp35,39 juta pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp28,78 juta pada Tahun 2023, seperti tersaji grafik berikut.



Grafik 2.4
Pendapatan Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023



c. Struktur Ekonomi Daerah

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dengan Tahun Dasar 2010 dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori. Secara detail seperti dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto (Atas Dasar Harga Berlaku) Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng (Miliar Rupiah) Tahun 2019–2023

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**	Kontri busi (%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	7.452,53	7.401,76	7.520,88	7.713,94	8.016,35	20,90


BAB II KONDISI UMUM DAERAH

B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrvina</i>	322,78	305,00	301,18	316,02	327,94	0,86
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	2.068,86	1.964,13	2.030,75	2.202,42	2.364,12	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	61,23	56,71	55,48	60,53	67,51	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Seweraae, Waste Managaement & Remediation</i>	43,73	43,52	38,75	39,27	42,91	0,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	3.172,30	3.107,41	3.199,94	3.450,50	3.541,54	9,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles&Motorcycles</i>	4.197,50	3.949,04	3.963,93	4.332,08	4.721,12	12,31
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	419,63	370,39	353,10	389,63	454,04	1,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accomodation & food Service</i>	6.609,02	4.936,39	4.398,86	5.209,23	6.193,37	16,15
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	1.918,29	2.041,97	2.119,35	2.141,12	2.198,16	5,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance</i>	1.486,06	1.374,41	1.386,82	1.657,12	1.931,17	5,04
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1.535,73	1.575,25	1.614,75	1.697,75	1.763,27	4,60
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	236,80	228,65	227,30	255,12	281,87	0,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence;</i>	1.812,45	1.873,81	1.958,30	1.998,93	2.001,99	5,22
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2.614,36	2.653,89	2.713,61	2.741,41	2.726,84	7,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	767,03	802,13	857,36	888,70	927,59	2,42
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	644,01	618,27	622,93	711,52	791,30	2,06
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	35.362,32	33.302,72	33.363,29	35.805,28	38.351,11	100,00

Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Struktur perekonomian Kabupaten Buleleng memiliki karakteristik yang berbeda dengan struktur perekonomian Provinsi Bali. Perekonomian Provinsi Bali lebih banyak bertumpu pada sektor non pertanian, khususnya Industri Pariwisata. Sedangkan struktur perekonomian di Kabupaten Buleleng didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kondisi ini terlihat dari kontribusi paling besar dalam pembentukan PDRB Tahun 2023, yaitu sebesar 20,90%. Diikuti Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,15%, serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,31%.



d. Inflasi

Indikator ekonomi yang tidak kalah penting dalam menjaga stabilitas moneter adalah inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi sering didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Jadi besarnya inflasi, hanya menggambarkan besarnya perubahan harga. Bisa saja harga sebenarnya masih tergolong rendah akan tetapi jika meningkat dari periode sebelumnya dikatakan inflasi, atau sebaliknya harga yang relatif tinggi dan hanya mengalami sedikit penurunan disebut sebagai deflasi. Tingkat harga dalam definisi inflasi, secara konseptual adalah tingkat harga rata-rata tertimbang dari barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam prakteknya, tingkat harga tersebut diukur dengan indeks harga, dalam hal ini Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi Kota Singaraja tidak terlepas dari faktor supply dan demand yang terus dijaga kestabilannya, terutama pada kelompok pengeluaran kebutuhan paling pokok dari masyarakat yaitu bahan makanan. Inflasi yang cenderung terkendali dapat berdampak secara tidak langsung pada semakin terkendalinya permasalahan-permasalahan ekonomi makro seperti pengangguran dan kemiskinan. Berikut disajikan nilai inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar dan nasional tahun 2019-2023.

Tabel 2.12
Nilai Inflasi Kota Singaraja, Kota Denpasar, dan Nasional
Tahun 2019-2023

Wilayah Inflasi	Nilai Inflasi (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61
Denpasar	2,37	0,55	2,01	6,44	2,54
Singaraja	2,42	2,48	2,39	4,63	4,31

Sumber Data : BPS Provinsi Bali, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa inflasi Kota Singaraja mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari tahun 2019-2023. Inflasi Kota Singaraja tahun 2023 sebesar 4,31% lebih tinggi dari kondisi tahun 2019 sebesar 2,42%. Masih lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Denpasar (2,54%) dan nasional (2,61%). Kondisi tersebut perlu diwaspadai atau diperlukan terobosan-terobosan ekonomi yang kreatif, agar inflasi dapat dipertahankan dalam ambang



batas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng, guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

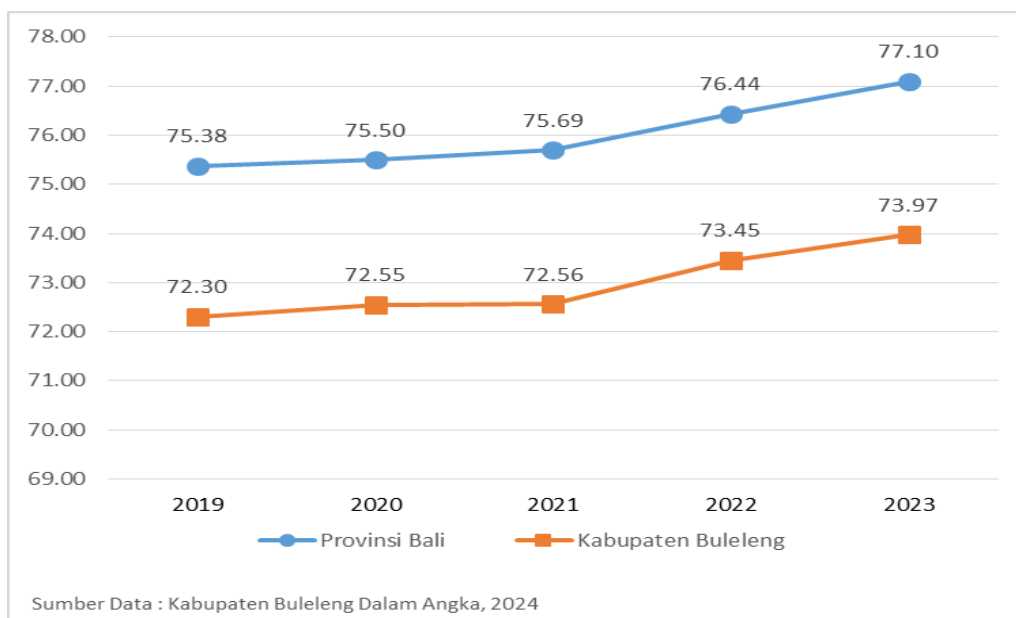
2.4. Kondisi Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menjadi salah satu agenda penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari pembangunan manusia yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan manusia didalamnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Adanya kemajuan di bidang pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dari tahun ke tahun kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Buleleng menunjukkan kecenderungan membaik. Ini tercermin dari naiknya Indeks Pembangunan Manusia 2023 sebesar 0,52 poin ke level 73,97 dari tahun sebelumnya. Kenaikan IPM Kabupaten Buleleng sejalan, namun masih rebih rendah dengan IPM Provinsi Bali sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2.5
Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali Tahun 2019-2023





Peningkatan IPM menandakan harapan untuk hidup, baik dari dimensi kesehatan, pendidikan, maupun hidup layak semakin panjang. Ditinjau berdasarkan indikator pembentuknya, IPM Kabupaten Buleleng terbentuk dari dimensi kesehatan dengan nilai Umur Harapan Hidup yang mencapai 72,70 tahun. Sedangkan pada dimensi pendidikan dibagi dalam indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada tahun 2023, anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau sampai jenjang diploma I. Harapan lama sekolah menjadi sinyal positif semakin banyak penduduk yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Rata rata penduduk Buleleng usia 25 tahun ke atas juga telah menyelesaikan pendidikan hingga SMP Kelas 1 atau telah menempuh pendidikan rata-rata selama 7,57 tahun. Lebih jelasnya, komponen pembentuk IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buleleng
Tahun 2019–2023

Komponen IPM	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup (Tahun)	71,68	71,83	71,95	72,32	72,70
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,91	13,07	13,08	13,26	13,27
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,08	7,24	7,25	7,56	7,57
Pengeluaran per Kapita per Tahun (Ribu Rp)	13.780	13.463	13.362	13.529	13.987

Sumber Data : BPS, 2024

Dimensi IPM yang digunakan sebagai indikator standar hidup layak, pengeluaran per kapita tahun 2023 di Kabupaten Buleleng mencapai angka 13,987 juta rupiah per tahun. Pengeluaran per Kapita sempat mengalami penurunan hingga tahun 2021 dari tahun sebelumnya, karena dampak dari pandemi Covid-19. Pada dua tahun terakhir kembali mengalami kenaikan, mengindikasikan sudah ada peningkatan kemampuan masyarakat untuk memenuhi standar hidup layak.



b. Kemiskinan dan Ketimpangan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan di Kabupaten Buleleng terus meningkat sebanding dengan semakin tingginya standar pengeluaran penduduk. Garis kemiskinan yang semakin tinggi, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng kecenderungannya semakin meningkat. Kecenderungan ini tentu saja merupakan hal yang tidak baik karena secara kualitatif dan kuantitatif kondisi masyarakat setempat bertambah baruk. Kondisi tersebut akibat dari kejadian luar biasa pandemic Covid-19 yang berdampak panjang pada proses perekonomian, keterpurukan akses sektor ekonomi, tingkat pengangguran mengalami lonjakan, dan akhirnya angka kemiskinan meningkat.

Tabel 2.14
Kondisi Penduduk Miskin di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2019	401.377	34.260	5,19
2020	424.602	35.250	5,32
2021	461.018	40.920	6,12
2022	496.390	41.680	6,21
2023	537.262	39.520	5,85

Sumber Data : BPS, 2024

Kesejahteraan penduduk di Kabupaten Buleleng akan lebih baik jika tren peningkatan kualitas hidup dan penurunan kemiskinan disertai dengan adanya pemerataan tingkat kesejahteraan. Ketimpangan tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah dapat dilihat dari koefisien gini, yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan). Kriteria ketimpangan dengan ukuran $G < 0,30$ adalah ketimpangan rendah, $0,30 \leq G \leq 0,50$ adalah ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ adalah ketimpangan tinggi.



Pada tahun 2023, angka Indeks Gini di Kabupaten Buleleng sebesar 0,314 atau berada pada kategori ketimpangan sedang. Sedangkan indeks gini tahun 2019-2022 berada pada rentang 0,281-0,285 (ketimpangan rendah). Hal itu menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Kabupaten Buleleng semakin meningkat atau distribusi pendapatan antar penduduk semakin tidak merata. Angka tersebut masih lebih baik jika dibandingkan dengan angka Indeks Gini Provinsi Bali sebesar 0,362 dan nasional sebesar 0,388 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Gini Rasio Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Buleleng	Provinsi Bali	Nasional
2019	0,285	0,366	0,382
2020	0,285	0,369	0,381
2021	0,282	0,378	0,384
2022	0,281	0,363	0,384
2023	0,314	0,362	0,388

Sumber Data : BPS, 2024

2.5. Kondisi Pelayanan Publik

Kondisi pelayanan publik di Kabupaten Buleleng diuraikan gambaran umum pada aspek pelayanan berikut.

a. Sektor Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka



Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik pada jenjang pendidikan SD/MI dan pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
APS SD/MI (%)	99,67	99,40	99,41	99,83	99,69
APS SMP/MTs (%)	94,70	96,41	96,53	95,86	96,45

Sumber Data : BPS, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan APS pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Perkembangan APS SD/MI tahun 2019 sebesar 99,67% meningkat menjadi 99,41% di tahun 2023, sedangkan APS SMP/MTs meningkat dari 94,70% di tahun 2019 menjadi 96,45% pada tahun 2023. Walaupun APS pada jenjang tersebut termasuk dalam kategori cukup tinggi, kondisi tersebut mengindikasikan masih adanya anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng yang sedang tidak bersekolah.

Untuk mendukung akses layanan pendidikan, perlu memperhatikan tingkat prasarana dan sarana seperti ketersediaan sekolah dengan mempertimbangkan rasio idealnya. Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat SD/MI atau SMP/MTs per 10.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) atau usia 13-15 tahun (SMP/MTs). Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah pada jenjangnya. Pada table berikut disajikan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023.



Tabel 2.17
Rasio Sekolah Terhadap Jumlah Penduduk Jenjang SD/MI dan SMP/MTs
di Kabupaten Buleleng Tahun 2019- 2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Sekolah	507	509	467	466	465
1.2	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	66.353	67.936	68.766	67.729	69.982
1.3	Rasio (per 10.000)	76,41	74,92	67,91	68,80	66,45
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Sekolah	88	86	73	71	71
2.2	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	33.119	35.400	33.471	38.289	34.348
2.3	Rasio (per 10.000)	26,57	24,29	21,81	18,54	20,67

Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buleleng, 2023 (diolah)

Data di atas, pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan daya tampung sekolah terhadap murid dengan rasio di antara 66,45 sampai dengan 76,41. Rasio tersebut sudah berada di atas rasio ideal (52 per 10.000 penduduk usia 7-12) atau jumlah sekolah masih memadai untuk menampung anak pada jenjang SD/MI. Sedangkan untuk rasio sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs berkisar 18,54 - 26,57 atau masih berada di bawah rasio ideal (52 per 10.000 penduduk usia 13-15), artinya ketersediaan sekolah SMP/MTs belum memadai menampung anak usia sekolah pada jenjangnya.

b. Sektor Kesehatan

Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan pula oleh sektor kesehatan. Oleh karena itu peningkatan kualitas kesehatan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kesehatan. Untuk mengetahui kualitas akses layanan kesehatan kepada masyarakat dapat dilihat dari indikator seperti Umur Harapan Hidup (UHH),



Angka Kematian IBU (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Prevalensi *Stunting*, akses sanitasi layak, akses air minum layak dan indikator lainnya.

Umur Harapan Hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. UHH dipengaruhi oleh faktor pengetahuan tentang kesehatan masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat serta kemudahan akses dibidang pelayanan kesehatan. Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2023 mencapai 72,70. Kondisi tersebut masih berada di bawah UHH Provinsi Bali yaitu 72,98 dan diatas nasional seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Umur Harapan Hidup Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2019-2023

Tahun	Kabupaten Buleleng	Provinsi Bali	Nasional
2019	71,68	71,99	71,34
2020	71,83	72,13	71,47
2021	71,95	72,24	71,57
2022	72,32	72,60	71,85
2023	72,70	72,98	72,13

Sumber Data : BPS, 2024

Untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang salah satunya adalah peningkatan UHH, perlu memperhatikan sumber daya baik sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA). Fasilitas pelayanan kesehatan harus dipenuhi dan dikelola dengan memperhatikan kompetensi SPA, Sumber Daya Manusia (SDM), pemenuhan akreditasi, pembiayaan, dan system pelayanan dan rujukan. Komposisi sarana kesehatan di Kabupaten Buleleng tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.19
Sarana Kesehatan per Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan				
		Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Apotek
1	Gerokgak		2	2	5	5
2	Seririt	2	3	3	8	5
3	Busungbiu			2	9	1
4	Banjar			2	9	3
5	Sukasada		2	2	11	2
6	Buleleng	5	5	3	6	13
7	Sawan	1		2	6	3
8	Kubutambahan			2	11	2
9	Tejakula			2	8	1
Jumlah		8	12	20	73	35

Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Sementara itu, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jenis tenaga kesehatan di Kabupaten Buleleng tersebar pada beberapa unit kerja baik di Puskesmas, Rumah Sakit maupun sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Tabel 2.20
Tenaga Kesehatan per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Medis						
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Ahli Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium
1	Gerokgak	9	2	32	50	9	2	2
2	Seririt	46	5	101	86	15	5	11
3	Busungbiu	5	2	21	18	3	2	2
4	Banjar	12	2	18	21	4	4	2
5	Sukasada	8	4	26	34	4	2	2



6	Buleleng	179	17	910	330	91	50	75
7	Sawan	24	6	58	68	8	5	9
8	Kubutambahan	8	2	20	30	3	3	1
9	Tejakula	5	1	18	32	4	2	2
Jumlah		296	41	1.204	669	141	75	106

Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

c. Sektor Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan di segala bidang, tentunya sumber daya manusia yang ada harus mampu berdaya saing. Namun sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak berdaya saing akan menjadi beban pemerintah dalam pembangunan. Pemberdayaan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas seperti program pendidikan dan pelatihan, program peningkatan ketrampilan/skill dan program lainnya. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk merupakan bagian yang harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Buleleng, jumlah penduduk usia kerja juga semakin meningkat dan secara ideal akan diikuti peningkatan TPAK. TPAK mengindikasikan besarnya cakupan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu proses perekonomian.

Kondisi penduduk di Kabupaten Buleleng tahun 2023 dari beberapa indikator ketenagakerjaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (Orang)	627.160
2	Angkatan Kerja (Orang) :	473.440
	a. Bekerja	456.389



	b. Pengangguran Terbuka	17.051
3	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	153.720
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,49
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,60

Sumber Data : BPS Kabupaten Buleleng, 2024

Data diatas menunjukkan TPT di Kabupaten Buleleng sebesar 3,60% yang disebabkan beberapa faktor diantaranya: jumlah penduduk semakin bertambah yang menyebabkan penduduk usia kerja meningkat, lapangan pekerjaan yang tersedia masih terbatas, tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja pendatang. Selain itu, adanya kecenderungan masyarakat di Kabupaten Buleleng ingin bekerja di sektor formal serta disebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja yang terjadi di masa pandemi COVID-19 dan masih berdampak hingga saat ini.

Untuk itu, diperlukan peningkatan akses layanan berbagai program dan kegiatan yang berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Adanya peran pemerintah dan masyarakat untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM baru, sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Termasuk dukungan perbaikan kondisi perekonomian dan keamanan daerah di Kabupaten Buleleng.



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis dan permasalahan utama pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Buleleng. Menjadi salah satu permasalahan pembangunan karena kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya: (1) rendahnya taraf pendidikan yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan diri, khususnya dalam mengakses lapangan kerja dan lapangan usaha; (2) rendahnya taraf kesehatan, menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa; (3) terbatasnya lapangan kerja; dan (4) kondisi terisolasi, sehingga sulit menjangkau pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu situasi dimana standar kehidupan yang “layak” tidak tercapai. Pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic need approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk itu penduduk miskin adalah penduduk dengan rata-rata pengeluaran dibawah garis kemiskinan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, melalui strategi kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan menjadi agenda prioritas yang harus ditangani secara terintegrasi yang menunjukkan adanya keberpihakan pada masyarakat kurang mampu, serta memfasilitasinya agar mampu memenuhi dan mengakses berbagai layanan terkait kebutuhan masyarakat.



3.2. Analisis Karakteristik Kemiskinan

3.2.1. Kondisi Umum Kemiskinan Daerah (Kemiskinan Konsumsi)

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Buleleng dapat dilihat dari beberapa gambaran capaian indikator utama kemiskinan dan perkembangannya dalam kurun waktu tahun 2019-2023. Capaian indikator utama yang disajikan adalah jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).

Perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019-2023, berdasarkan capaian indikator utamanya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Utama Kemiskinan di Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (000)	34,26	35,25	40,92	41,68	39,52
Persentase Penduduk Miskin (P-0)	5,19	5,32	6,12	6,21	5,85
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P-1)	0,72	0,53	0,74	0,60	0,53
Indeks Keparahan Kemiskinan (P-2)	0,14	0,08	0,14	0,09	0,08
Garis Kemiskinan (GK) (Rp./kapita/bulan)	401.377	424.602	461.018	496.390	537.262

Sumber Data : BPS Kabupaten Buleleng

1. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu indikator yang memengaruhi persentase tingkat kemiskinan dalam suatu daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk miskin, maka semakin besar persentase tingkat kemiskinan relatif terhadap jumlah penduduk. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 ditinjau berdasarkan posisi relatif, perkembangan, efektivitas dan relevansinya.

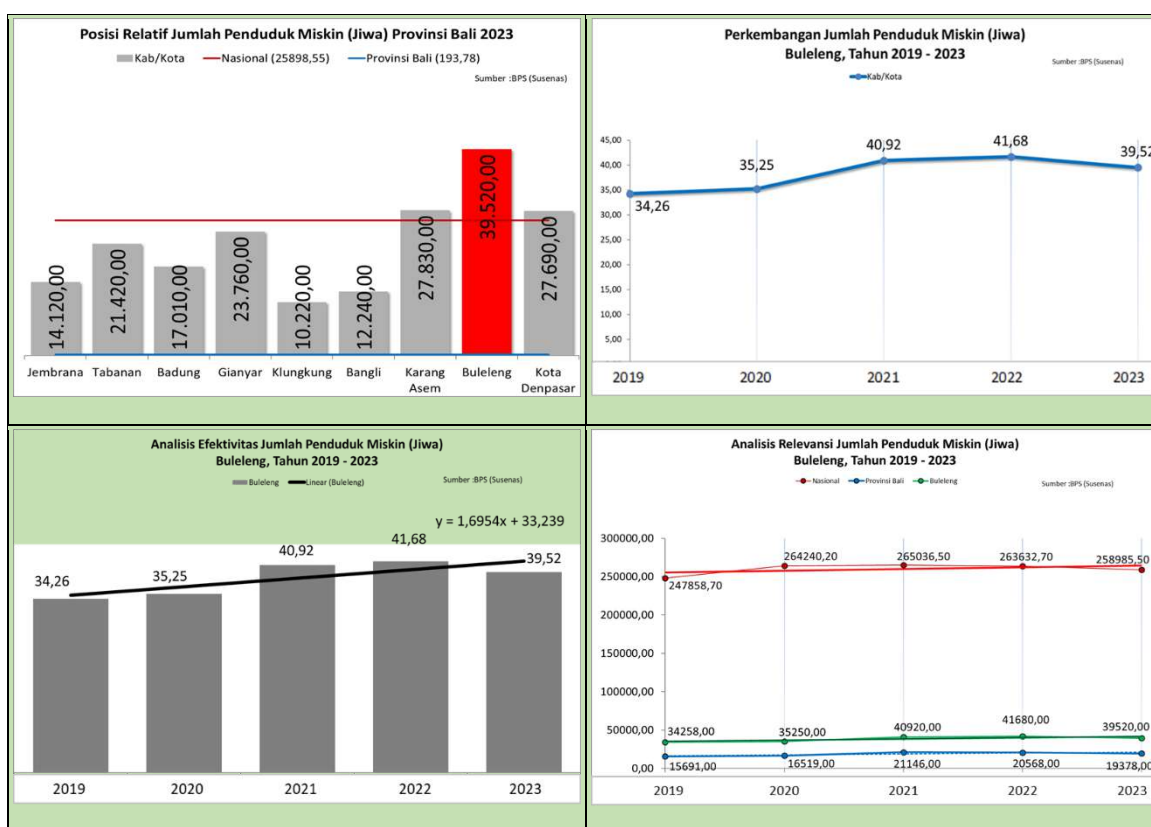
Dilihat dari posisi relatifnya, jumlah penduduk miskin Kabupaten Buleleng menunjukkan posisi tertinggi atau terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Bali. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kabupaten



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Buleleng berfluktuatif dari tahun 2019-2023 dengan tren meningkat. Tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 34.260 jiwa meningkat hingga tahun 2022 menjadi sebesar 41.680 jiwa, turun menjadi 39.520 jiwa pada tahun 2023. Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 1,6954x + 33,239$ yang bermakna bahwa jumlah penduduk miskin dapat diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 1.695 jiwa setiap tahunnya.

Grafik 3.1
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS

Jumlah penduduk miskin secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan provinsi dan nasional memiliki tren yang sama yakni tren peningkatan. Selain itu, capaian tahun terakhir dibandingkan tahun sebelumnya juga sama-sama mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng berkontribusi positif atau sejalan mendukung tujuan nasional untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

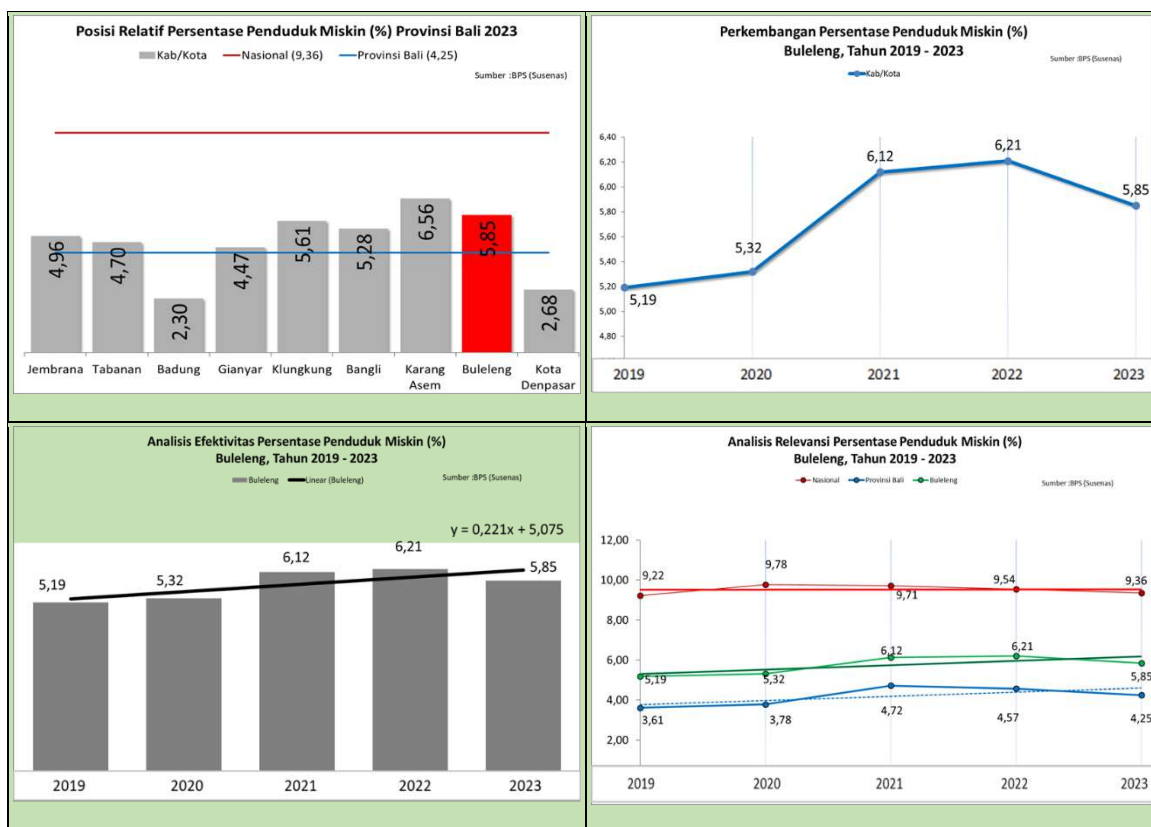


2. Persentase Penduduk Miskin (PO)

Kesenjangan ekonomi adalah adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Ketimpangan ekonomi dan tingginya tingkat kemiskinan merupakan dua masalah besar yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan, tidak terkecuali di Kabupaten Buleleng.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2023 (5,85%) berada pada urutan ke-2 tertinggi dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di bawah Kabupaten Karangasem (6,56%). Tingkat kemiskinan ini masih di atas capaian Provinsi Bali yang berada pada titik 4,25% di bawah capaian nasional pada titik 9,36%.

Grafik 3.2
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Persentase Penduduk Miskin (PO) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS

Sepanjang tahun 2019-2023 perkembangan tingkat kemiskinan secara tahunan berfluktuasi dengan tren meningkat. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kabupaten Buleleng ada di angka 5,19% mengalami kenaikan hingga



tahun 2022 menjadi 6,21% atau sebesar 1,02 poin persen. Selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,36 poin persen di tahun 2023 menjadi 5,85%. Tren peningkatan tingkat kemiskinan tahun 2019-2023 ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,221x + 5,093$ yang berarti tingkat kemiskinan dapat diproyeksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,221 poin persen setiap tahunnya.

Ditinjau dari relevansinya, tingkat kemiskinan secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian kabupaten dengan provinsi dan nasional memiliki tren yang sama yakni tren peningkatan, namun tren peningkatan nasional terlihat lebih landai. Perbedaan trennya terlihat jelas pada capaian tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana capaian nasional tahun 2021 terjadi penurunan sedangkan kabupaten dan provinsi justru meningkat. Dengan demikian, upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng belum berkontribusi positif/belum sejalan dalam mendukung tujuan nasional untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Peningkatan persentase penduduk miskin maupun jumlah penduduk miskin Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat dari Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), dan masih berdampak hingga tahun 2022. Kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 memaksa Pemerintah mengambil kebijakan Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga berdampak pada menurunnya mobilisasi dan aktivitas masyarakat di segala sektor. Hal tersebut berdampak pada menurunnya proses produksi barang dan jasa, merosotnya kapasitas sektor usaha sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada akhirnya mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

Oleh sebab itu, sinergitas program penanggulangan kemiskinan harus terus ditingkatkan baik dari sisi pelaksanaan dan efektivitasnya sehingga mampu mempercepat laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

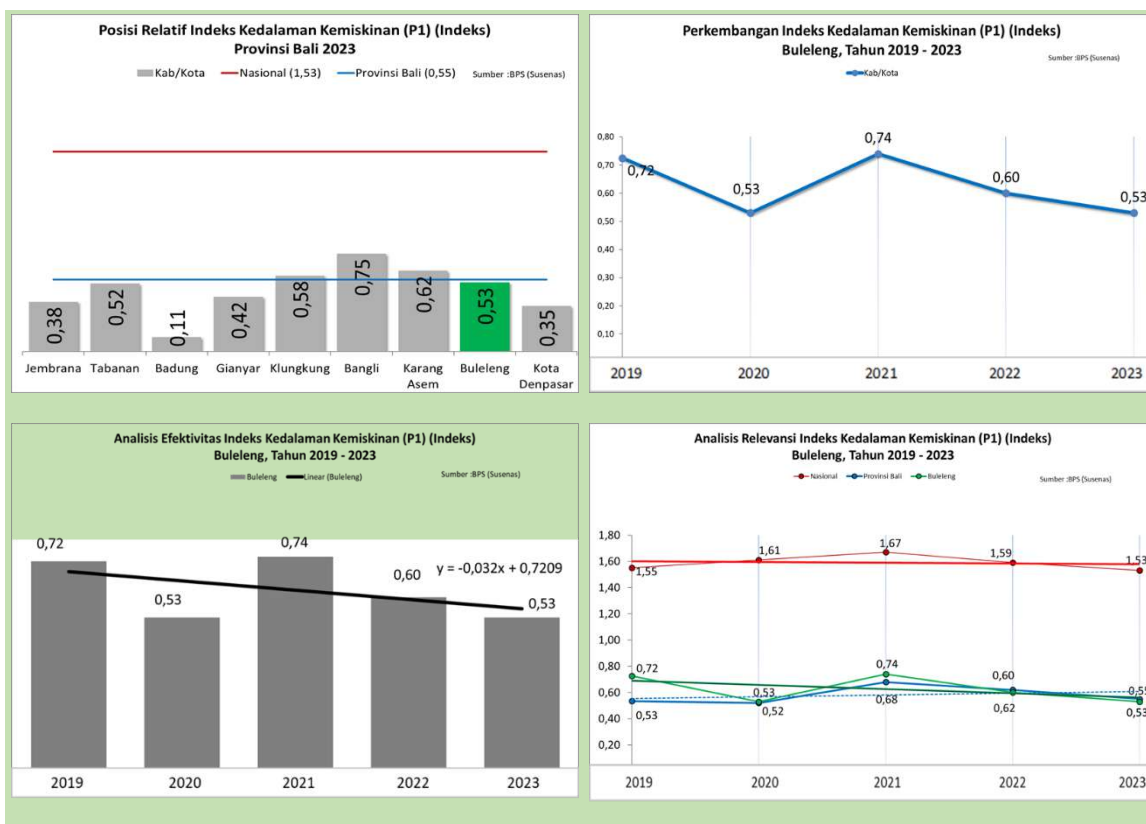
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) didefinisikan sebagai ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng tahun 2023 tercatat pada angka 0,53 berada di urutan ke-4 tertinggi dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di bawah Kabupaten Bangli, Karang Asem, Klungkung. P1 ini masih lebih baik dari capaian Provinsi Bali sebesar 0,55 dan nasional sebesar 1,53.

Grafik 3.3
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS

Perkembangan P1 di Kabupaten Buleleng berfluktuatif secara tahunan pada rentang tahun 2019-2023 dengan tren menurun. Capaian tahun 2019 sebesar 0,72 turun menjadi 0,53 di tahun 2020, kembali naik pada tahun 2021 menjadi 0,74 dan menurun hingga tahun 2023 menjadi sebesar 0,53. Kondisi P1 tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,07 poin atau 11,67% dari kondisi tahun 2022 sebesar 0,60. Tren perkembangan P1 dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -0,032x + 0,7209$. Bahwa P1 di



Kabupaten Buleleng dapat diproyeksikan akan mengalami penurunan sebesar 0,032 poin setiap tahunnya. Jika dilihat secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan nasional memiliki pola perubahan dan tren sama-sama menurun.

Dari uraian tersebut mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Buleleng semakin meningkat atau semakin mendekati garis kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng berkontribusi positif/sejalan dalam mendukung tujuan nasional untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

4. Indeks Keperahan Kemiskinan (P2)

Indeks Keperahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

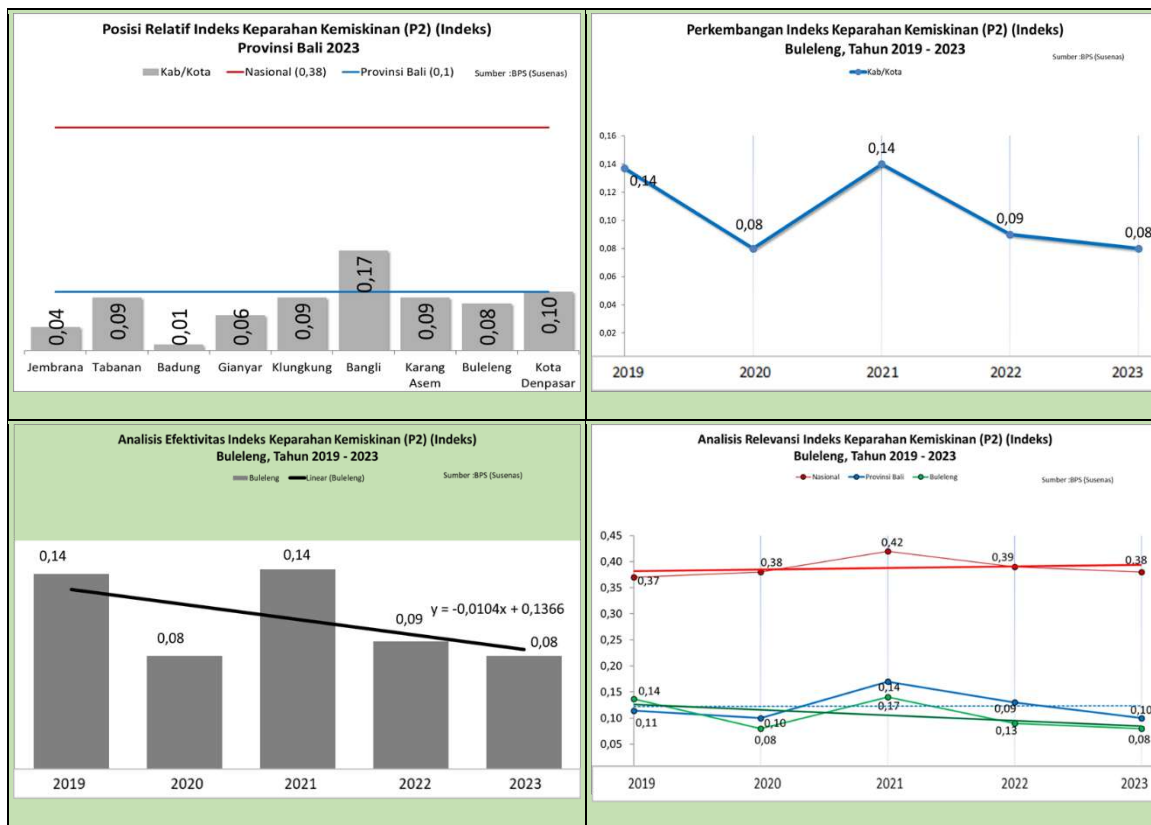
Posisi relatif P2 Kabupaten Buleleng tahun 2023 tercatat pada angka 0,08 berada di urutan ke-4 terendah dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di atas Kabupaten Badung, Jembrana dan Gianyar. P2 ini masih lebih baik dari capaian Provinsi Bali sebesar 0,10 dan nasional sebesar 0,38.

Perkembangan P2 di Kabupaten Buleleng berfluktuatif secara tahunan pada rentang tahun 2019-2023 dengan tren menurun. Capaian tahun 2019 sebesar 0,14 menurun pada tahun 2020 menjadi 0,08 namun naik lagi di tahun 2021 menjadi sebesar 0,14, selanjutnya hingga tahun 2023 konsisten menurun menjadi sebesar 0,09. Kondisi P2 tahun 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,01 poin atau 11,11% dari kondisi tahun 2022 sebesar 0,09. Perkembangan P2 dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -0,0104x + 0,1366$ yang berarti bahwa P2 di Kabupaten Buleleng dapat diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,0104 poin setiap tahunnya.

Jika dilihat dari relevansinya, P2 secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali terlihat tren penurunan, sedangkan capaian nasional menunjukkan tren meningkat namun tidak signifikan.



Grafik 3.4
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS

Dari uraian tersebut mengindikasikan rata-rata pengeluaran diantara penduduk miskin memiliki ketimpangan yang semakin rendah atau semakin merata. Upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng berkontribusi positif/sejalan dalam mendukung tujuan nasional untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan.

5. Garis Kemiskinan

Dalam menghitung angka kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Hal ini dikenal dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan



Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Berdasarkan penghitungan BPS, Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebesar Rp537.262,00 yang berarti bahwa penduduk dengan pengeluaran perbulan dibawah nilai tersebut tergolong penduduk miskin. Posisi GK Kabupaten Buleleng berada di urutan ke-4 tertinggi dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali, di bawah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Tabanan. Lebih tinggi dari GK Provinsi Bali sebesar Rp529.643,00 dan GK nasional sebesar Rp525.050,00 (per Maret 2023).

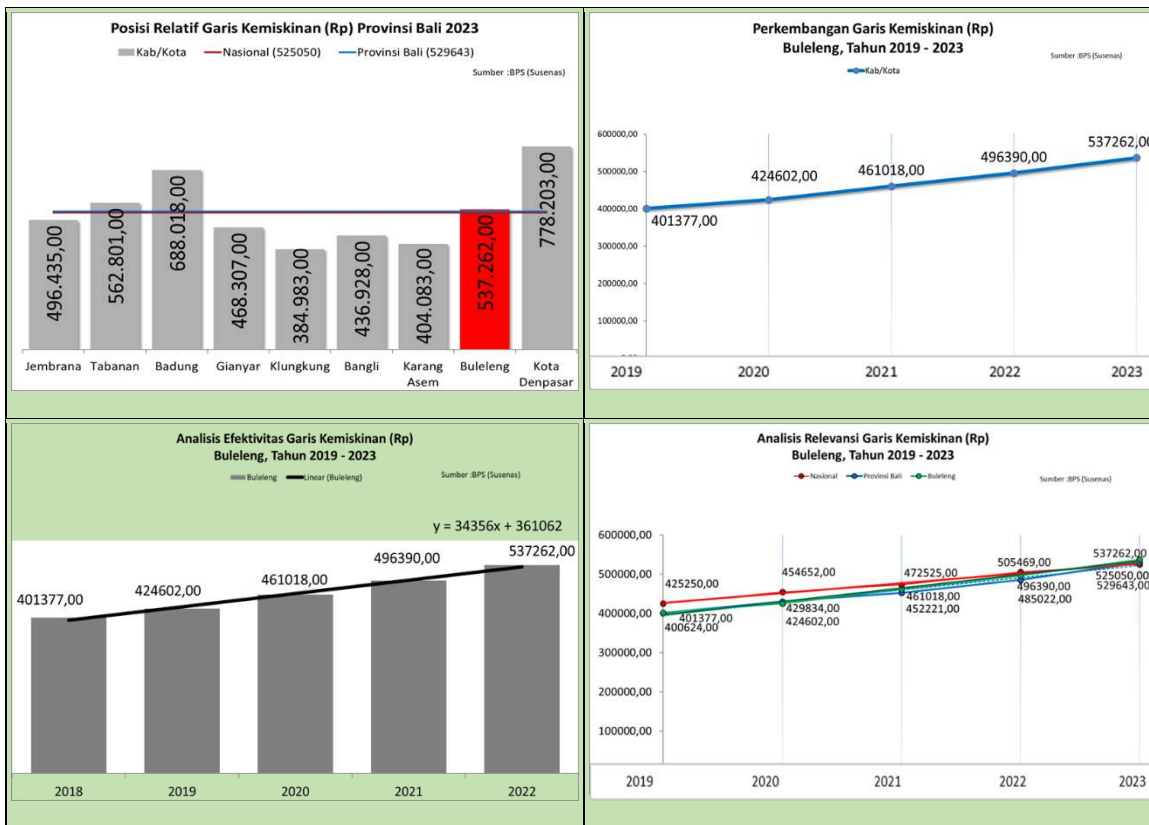
Perkembangan GK di Kabupaten Buleleng secara tahunan pada rentang tahun 2019-2023 konsisten meningkat. GK pada tahun 2019 sebesar Rp401.377,00 terus meningkat hingga tahun 2023 menjadi sebesar Rp537.262,00. Kondisi GK ini meningkat sebesar Rp40.872,00 atau 8,23% dibanding tahun sebelumnya yakni Rp496.390,00. Tren peningkatan dalam 5 tahun terakhir ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 34356x + 361062$. Maknanya bahwa GK di Kabuapten Buleleng dapat diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar Rp34.356 setiap tahunnya. Jika dilihat dari relevansinya, GK secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan nasional menunjukkan adanya relevansi. Relevansinya terlihat sama-sama mengalami peningkatan dan cenderung mendekat menuju pada satu titik. Hal itu mengindikasikan harga barang dan jasa pembentuk GK (Makanan dan Non Makanan) semakin merata.

Dari uraian tersebut mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng berkontribusi positif/sejalan mendukung tujuan nasional dalam mengendalikan harga barang dan jasa pembentuk Garis Kemiskinan.



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Grafik 3.5
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Utama Penanggulangan Kemiskinan Bidang Konsumsi di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis

KABUPATEN BULELENG		PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI
		Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi	
INDIKATOR UTAMA	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat .	Capaian indikator di Kab. Buleleng Tahun 2023 (39.520 jiwa) pada posisi tertinggi dari	Belum efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 1.695	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan capaian Prov. Bali dan	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi RELATIF



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

		Tahun 2023 menurun sebanyak 2.160 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya	capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali	jiwa tiap tahunnya	nasional, sama-sama mengalami tren meningkat . Pada tahun 2023 sama-sama menurun dibandingkan tahun sebelumnya	MASIH BERMASALAH
	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	Pola perubahan capaian P0 tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 0,36 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator P0 di Kab. Buleleng Tahun 2023 (5,85%) pada urutan ke-2 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (4,25%), di bawah nasional (9,36%)	Belum efektif , capaian P0 di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,221 poin persen tiap tahunnya	Pola perubahan capaian P0 tahunan (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional (tren meningkat)	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi RELATIF MASIH BERMASALAH
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	Pola perubahan capaian P1 tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren menurun . Tahun 2023 menurun sebesar 0,07 poin (11,67%) dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator P1 di Kab. Buleleng Tahun 2023 (0,53) pada urutan ke-4 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (0,55) dan nasional (1,53)	Efektif , capaian P1 di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 0,032 poin tiap tahunnya (rata-rata pengeluaran semakin mendekati GK)	Pola perubahan capaian P1 tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan capaian Prov. Bali dan nasional (tren menurun)	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi RELATIF TIDAK BERMASALAH
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	Pola perubahan capaian P2 tahunan (2019-2023) berfluktuatif	Capaian indikator P2 di Kab. Buleleng Tahun 2023 (0,08) pada urutan ke-4	Efektif , capaian P2 di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju penurunan	Pola perubahan capaian P2 tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi



		dengan tren menurun . Tahun 2023 menurun sebesar 0,01 poin (11,11%) dibandingkan tahun sebelumnya	terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (0,10) dan nasional (0,38)	sebesar 0,0104 tiap tahunnya (rata-rata pengeluaran antara penduduk miskin semakin rendah/merata)	Prov. Bali (tren menurun) namun tidak relevan dengan nasional (tren meningkat)	RELATIF TIDAK BERMASALAH
	Garis Kemiskinan (GK) (Rupiah)	Pola perubahan capaian GK tahunan (2019-2023) konsisten meningkat . Tahun 2023 meningkat sebesar Rp40.872,00 (8,23%) dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator GK di Kab. Buleleng Tahun 2023 (Rp537.262,00) pada urutan ke-4 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (Rp529.643,00) dan nasional (Rp525.050,00 per Maret 2023)	Belum Efektif , capaian GK di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar Rp34.356,00 tiap tahunnya	Pola perubahan capaian GK tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan capaian Prov. Bali dan nasional (tren meningkat, nilai cenderung mendekat)	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif dan Efektivitas RELATIF MASIH BERMASALAH

3.2.2. Profil Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem diukur menggunakan “*absolute poverty measure*” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Miskin ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat berada dibawah garis kemiskinan ekstrem setara dengan USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*/Keseimbangan Daya Beli) per kapita perhari, ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa- Bangsa. Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia Tahun 2021 adalah 4 persen atau sekitar 10,86 juta jiwa. Sementara tingkat kemiskinan secara umum Indonesia berdasarkan data Maret 2021 adalah sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta jiwa (sumber data TNP2K).

Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah di



Indonesia tahun 2024 pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022, mengamanatkan kepada 22 (dua puluh dua) Kementerian, 6 (enam) Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/ Bupati/Walikota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem agar tercapai target yang diharapkan, terdapat tiga strategi, yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem melalui kelompok program/kegiatan bantuan sosial dan subsidi, jaminan sosial, dan jaring pengaman covid-19.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat dan UMKM, pengembangan ekonomi lokal, akses pekerjaan, respon kebijakan covid-19.
3. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar, meningkatkan akses konektivitas antar wilayah.

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 4 Tahun 2022, pemerintah telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem tahun 2022-2024. Dalam lampiran II keputusan tersebut, Kabupaten Buleleng termasuk menjadi lokasi prioritas perluasan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024.

Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, salah satu langkah melalui intervensi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemutakhiran dan perluasan DTKS merupakan elemen instrumental untuk reformasi Sistem Perlindungan Sosial harus dilakukan untuk memastikan efektivitas penanganan kemiskinan ekstrem. Penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Buleleng perlu dilakukan secara multi-sektor dan multi-intervensi. Diperlukan koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah di Kabupaten Buleleng bersama program pemerintah pusat, serta pemangku kebijakan non-pemerintah.



Sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023 posisi relatif jumlah dan tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Buleleng mengalami tren penurunan. Kondisi pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Buleleng terendah jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Bali, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Posisi Relatif Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
	2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
Jembrana	1.19	1.87	0.70	0.42	0.66	0.25
Tabanan	3.71	2.32	1.05	0.82	0.51	0.23
Badung	3.56	0.31	0.00	0.50	0.04	0.00
Gianyar	1.88	8.7	4.71	0.36	1.65	0.89
Klungkung	2.73	0.87	0.82	1.51	0.48	0.45
Bangli	1.28	1.74	1.15	0.56	0.75	0.5
Karangasem	0.71	7.62	0.35	0.17	1.80	0.08
Buleleng	1.85	0.31	0.00	0.28	0.05	0.00
Denpasar	2.30	0.58	0.00	0.23	0.06	0.00
Provinsi Bali	19.21	24.31	8.77	0.43	0.54	0.19

Sumber Data : Satgas P3KE Kemenko PMK, 2024

Keterangan:

* : Estimasi BPS

** : Estimasi Satgas P3KE

3.2.3. Profil Kemiskinan Non Konsumsi

Kebijakan prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan ditentukan dengan menganalisis determinan kemiskinan atau masalah pokok kemiskinan termasuk dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan isu kemiskinan di daerah. Isu-isu kemiskinan berkaitan erat terhadap akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, pengangguran dan lainnya. Disamping itu penyebab lain adalah, masyarakat yang kurang cepat untuk dapat keluar dari garis kemiskinan serta terbatasnya kemampuan wirausaha masyarakat.



1. Karakteristik Kemiskinan Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan SDM yang berkualitas, pembangunan suatu wilayah dapat tercapai. Oleh karena SDM merupakan salahsatu subjek pembangunan, mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan berkualitas dapat menunjang seseorang untuk mengakses kesempatan kerja yang lebih luas dan lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan untuk kebutuhan hidupnya. Dari berbagai penelitian, ditemukan fakta bahwa keluarga miskin memiliki kesulitan akses ke lembaga pendidikan formal dibanding dengan keluarga dengan ekonomi mapan. Dampak hal tersebut, seorang anak dari keluarga miskin akan lebih sulit bersaing dalam mendapatkan pekerjaan dengan kompensasi yang memadai, dibanding anak dari keluarga mampu. Sehingga, anak tersebut akan sulit untuk dapat keluar dari garis kemiskinannya.

Untuk mengetahui kualitas pembangunan pada bidang pendidikan dalam suatu wilayah dapat diketahui dengan melihat indikator seperti: Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan lain-lain.

a. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Posisi Relatif HLS Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 13,27 tahun. Bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,27 tahun atau setara dengan Diploma I. Angka HLS tersebut berada di urutan ke-4 tertinggi dari 9 kabupaten/kota se-Bali, di bawah capaian Badung (14,22), Kota Denpasar (14,11), dan Kabupaten Gianyar (14,09). Capaian tersebut masih di bawah capaian Provinsi Bali (13,58), di atas capaian nasional (13,15).



Grafik 3.6
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Perkembangan HLS di Kabupaten Buleleng secara tahunan dari tahun 2019-2023 terlihat meningkat secara konsisten. Pada rentang tahun tersebut meningkat sebesar 0,36 poin dari kondisi tahun 2019 sebesar 12,91. Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,091x + 12,845$, bahwa HLS di Kabuapten Buleleng diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,091 poin tahun setiap tahunnya.

Dilihat dari relevansinya, HLS secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan nasional memiliki tren yang sama-sama meningkat. Dari uraian tersebut mengindikasikan capaian Kabupaten Buleleng sejalan mendukung tujuan nasional, dalam meningkatkan HLS khususnya.

b. Rata-Rata Lama Sekolah

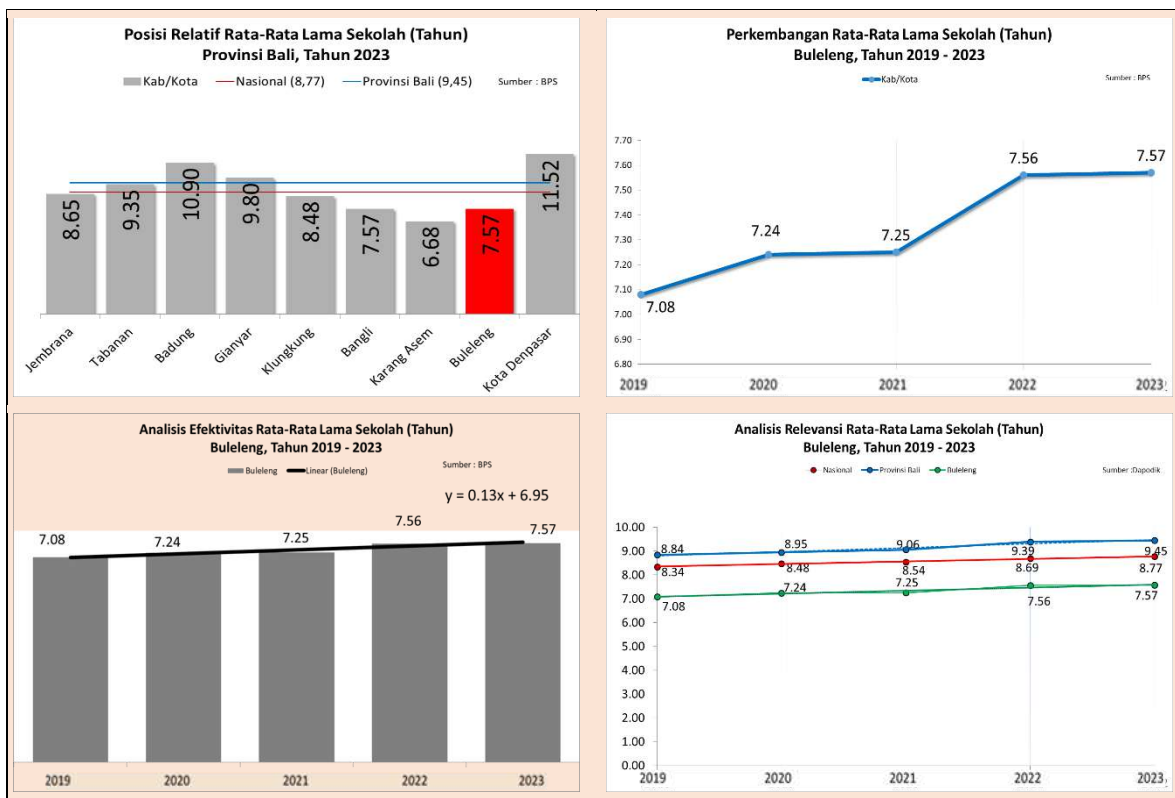
Rata-Rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Lamanya sekolah atau *years of schooling*, adalah suatu angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang mulai dari masuk pada jenjang sekolah dasar sampai dengan jenjang pendidikan terakhir. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling (MYS)* merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Namun demikian, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Grafik 3.7
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Posisi relatif RLS Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 7,57 tahun, dimana secara rata-rata penduduk Kabupaten Buleleng yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,57 tahun atau hampir menamatkan



kelas VIII. Angka RLS tersebut berada di urutan ke-2 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali, di atas capaian Karangasem (6,68) dan posisi yang sama dengan Kabupaten Bangli (7,57). Capaian tersebut masih di bawah capaian Provinsi Bali (9,45) dan nasional (8,77).

Perkembangan RLS di Kabupaten Buleleng secara tahunan dari tahun 2019-2023 terlihat meningkat secara konsisten. Pada rentang tahun tersebut meningkat sebesar 0,49 dari kondisi tahun 2018 sebesar 7,08. Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,13x + 6,95$. Bermakna bahwa RLS di Kabupaten Buleleng dapat diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,13 poin tahun setiap tahunnya. RLS secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan nasional memiliki tren yang sama-sama meningkat. Hal ini mengindikasikan capaian Kabupaten Buleleng sejalan mendukung tujuan nasional, dalam meningkatkan RLS khususnya.

c. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTS

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

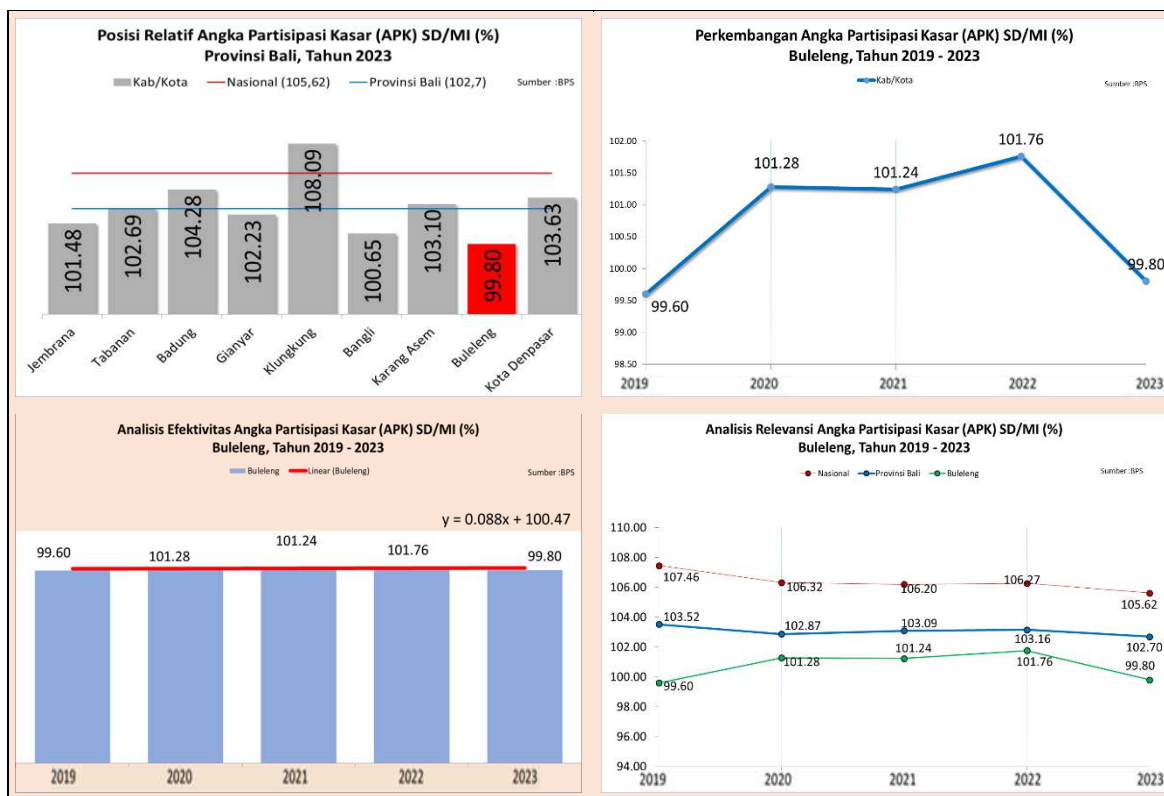
Posisi Relatif APK SD/MI Kabupaten Buleleng tahun 2023 pada angka 99,80% berada di urutan ke-1 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Capaian tersebut di bawah capaian Provinsi Bali (102,7%) dan nasional (105,62%).

Perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Buleleng berfluktuatif secara tahunan pada rentang tahun 2019-2023. Pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 1,96% dari tahun sebelumnya. Namun demikian, tren perkembangannya meningkat yang ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,088x + 100,47$. Persamaan tersebut dapat diartikan bahwa APK SD/MI di Kabupaten Buleleng



diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,088 poin setiap tahunnya.

Grafik 3.8
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Dilihat dari relevansinya, APK SD/MI secara umum pada periode tahun 2019-2023 antara capaian Kabupaten Buleleng dengan Provinsi Bali dan nasional memiliki tren yang tidak sama. Dimana tren APK SD/MI Kabupaten Buleleng meningkat sedangkan Provinsi Bali dan nasional menurun. Tren peningkatan tersebut berkontribusi positif terhadap tujuan APK SD/MI nasional. Namun demikian, capaian tahun 2023 sebesar 99,80% menunjukkan masih adanya anak usia sekolah pada jenjangnya yang sedang tidak bersekolah. Dari uraian tersebut mengindikasikan upaya yang dilakukan di Kabupaten Buleleng belum sejalan mendukung tujuan nasional, dalam meningkatkan APK SD/MI khususnya.

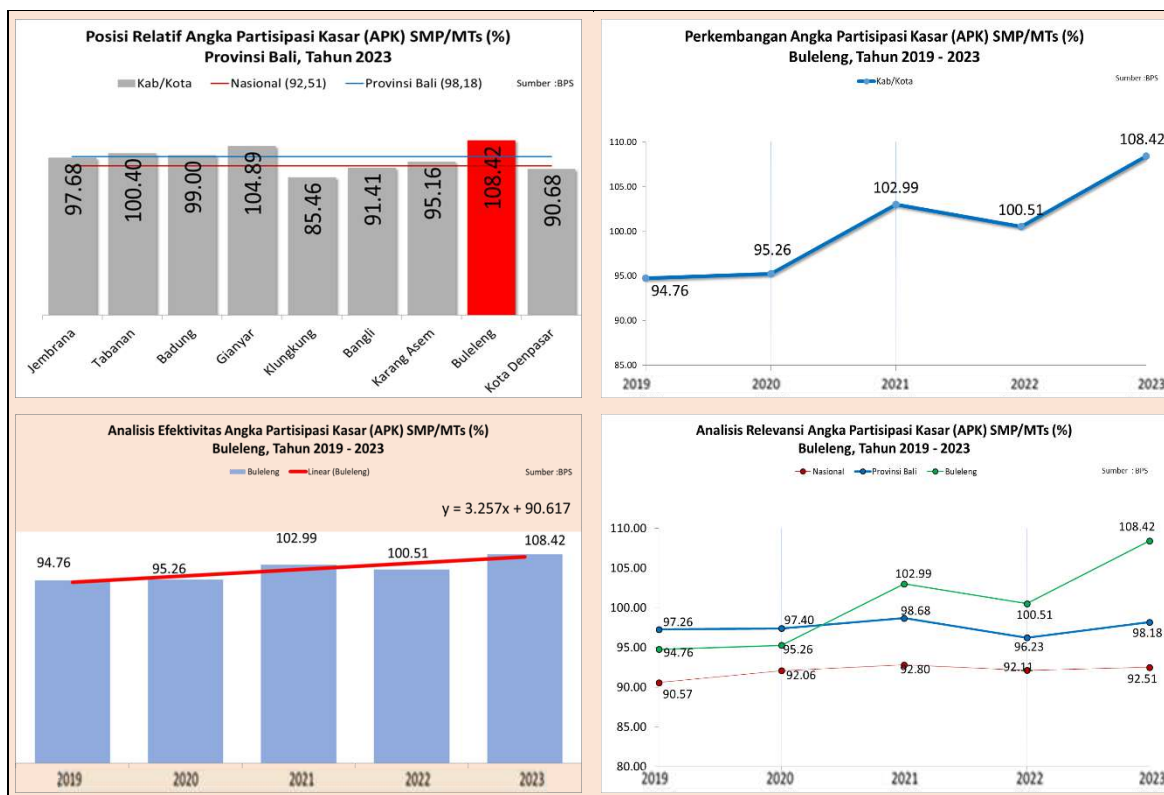
Posisi relatif APK SMP/MTS Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebesar 108,42%, berada pada urutan ke-1 tertinggi dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Posisi capaian tersebut berada di atas APK SMP/MTS Provinsi Bali (98,18%) dan



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

nasional (92,51%).

Grafik 3.9
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Dilihat dari perkembangan secara tahunan, APK SMP/MTs Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan tren meningkat. Kondisi tahun 2023 sebesar 108,42% mengalami peningkatan sebesar 7,91% dari tahun sebelumnya. Peningkatnya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 3,257x + 90,617$ yang bermakna bahwa APK SMP/MTs di Kabuapten Buleleng diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 3,257 poin persen setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan efektivitas program terhadap peningkatan APK SMP/MTs.

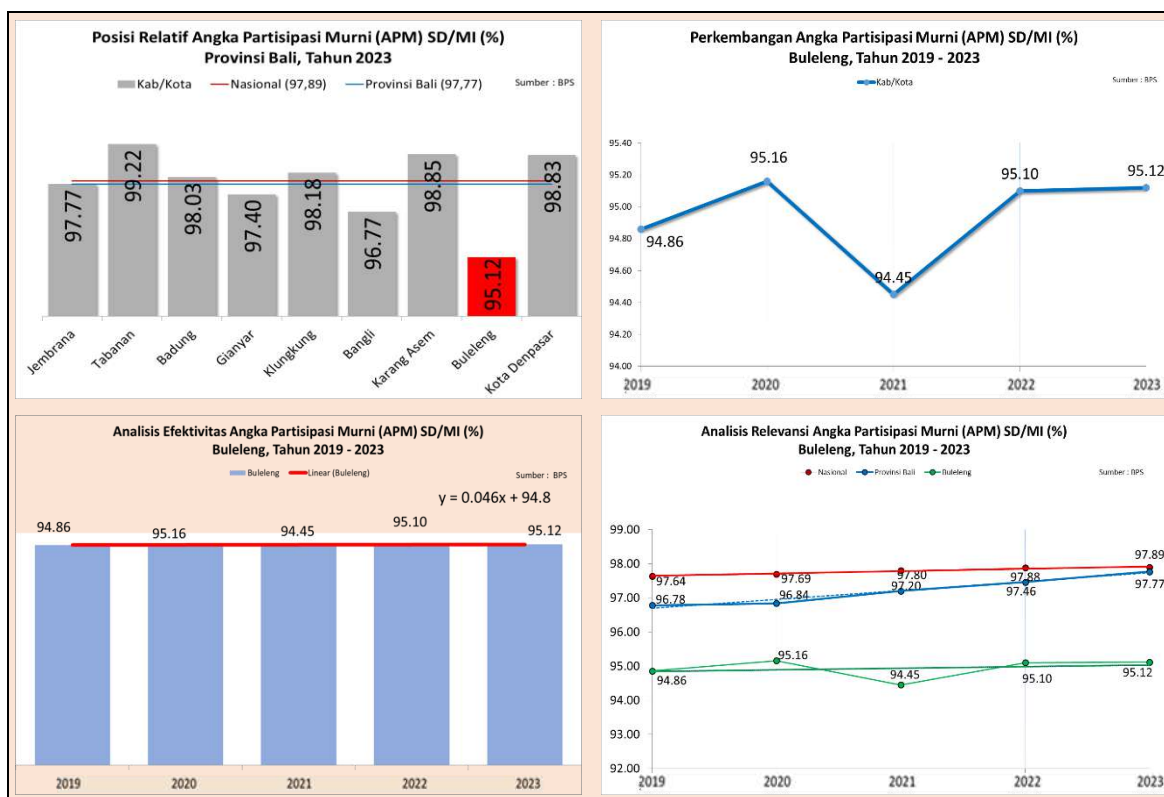
Tren peningkatan APK SMP/MTs di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh peningkatan capaian Provinsi Bali dan nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, dimana Kabupaten Buleleng mendukung tujuan Provinsi Bali dan nasional dalam meningkatkan APK SMP/MTs khususnya.



d. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTS

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Jika dibandingkan dengan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena menunjukkan partisipasi penduduk kelompok usia standar di masing-masing jenjang pendidikan.

Grafik 3.10
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Posisi Relatif APM SD/MI di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 95,12% berada pada urutan ke-1 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Capaian tersebut berada dibawah capaian APM SD/MI Provinsi Bali sebesar 97,77%, dan nasional sebesar 97,89%.

Perkembangan antar waktu APM SD/MI di kabupaten Buleleng fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun 2019-2023. Capaian pada tahun 2023 meningkat 0,26 poin persen dibandingkan capaian pada tahun 2019 sebesar

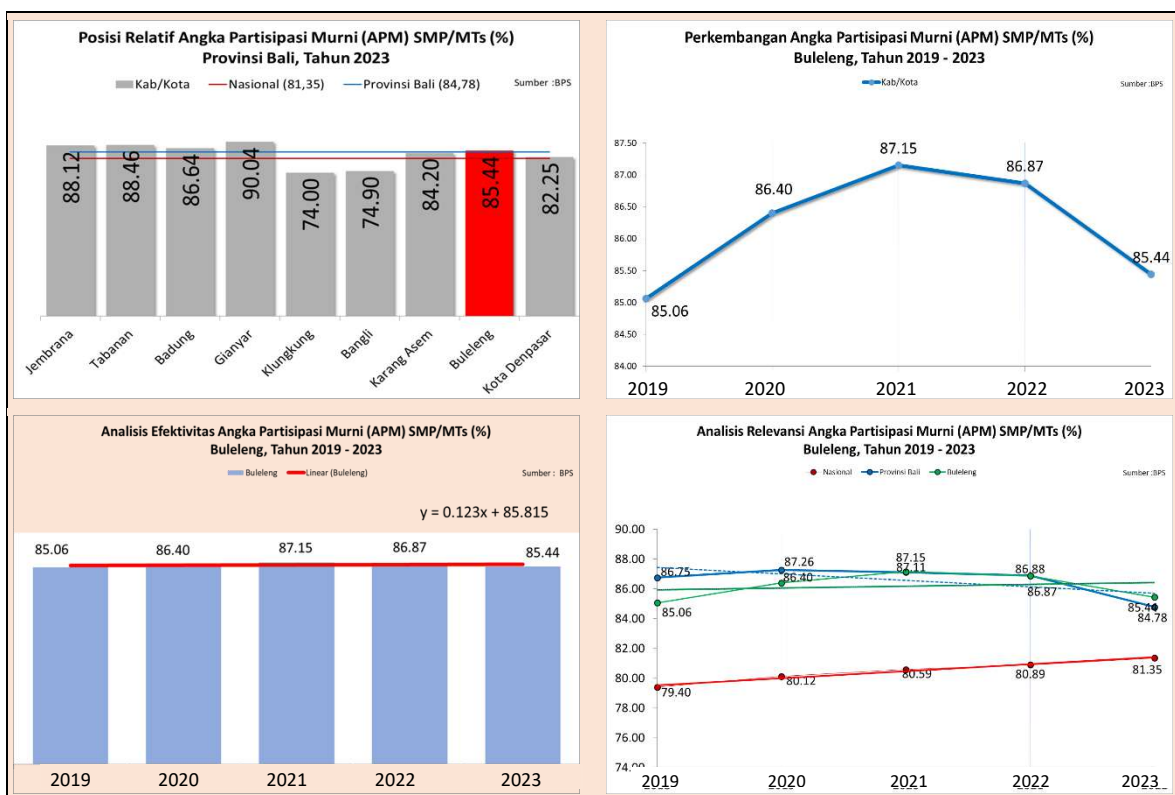


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

94,86%. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022 yakni 95,10% terjadi peningkatan sebesar 0,02 poin persen. Kondisi tersebut menggambarkan APM SD/MI secara umum trennya masih positif yang ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,046x + 94,8$ atau diproyeksikan akan mengalami peningkatan sebesar 0,046 poin persen setiap tahunnya.

Tren peningkatan APM SD/MI di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian Provinsi Bali dan nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, dimana Kabupaten Buleleng mendukung tujuan Provinsi Bali dan nasional dalam meningkatkan APM SD/MI khususnya.

Grafik 3.11
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Posisi relatif APM SMP/MTS di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar



85,44% berada pada urutan ke-5 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali, di bawah Kabupaten Gianyar, Jembrana, Tabanan, dan Badung. Capaian tersebut masih di atas capaian APM SMP/MTS Provinsi Bali yakni sebesar 84,78% dan nasional sebesar 81,35%.

Dilihat dari perkembangannya, APM SMP/MTs dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berfluktuasi dengan tren meningkat. Meningkat sebesar 0,38 poin persen dari kondisi tahun 2019 (85,06%) dan menurun sebesar 1,43 poin persen dari kondisi tahun 2022 (86,87%). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,123x + 85,815$ yang bermakna bahwa APM SMP/MTs di Kabupaten Buleleng diproyeksikan akan meningkat sebesar 0,123 poin persen setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan adanya efektivitas program terhadap peningkatan APM SMP/MTs.

Tren peningkatan APM SMP/MTs di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian nasional, namun capaian Provinsi Bali justru terjadi penurunan. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, dimana Kabupaten Buleleng mendukung tujuan Provinsi Bali dan nasional dalam meningkatkan APM SMP/MTs khususnya.

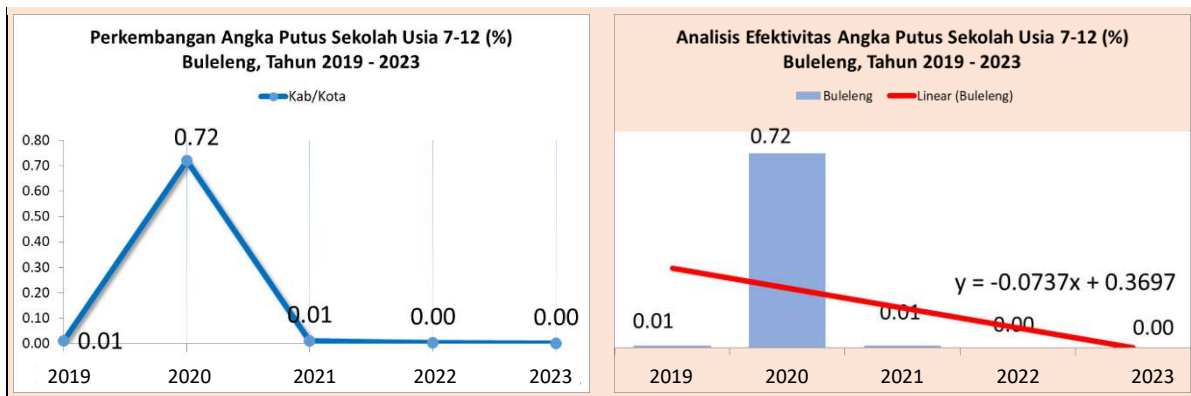
e. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs

Anak putus sekolah merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan tidak lagi hanya dirasakan oleh individu anak itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan yaitu pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja.

Angka Putus Sekolah (APtS) menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Analisis dilakukan terbatas pada aspek perkembangan antar waktu dan efektivitas, sedangkan posisi relatif dan relevansi tidak dianalisis karena keterbatasan data. Pada grafik berikut dapat dilihat perkembangan dan efektivitas APtS usia 7-12 tahun (jenjang SD/MI) di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023.



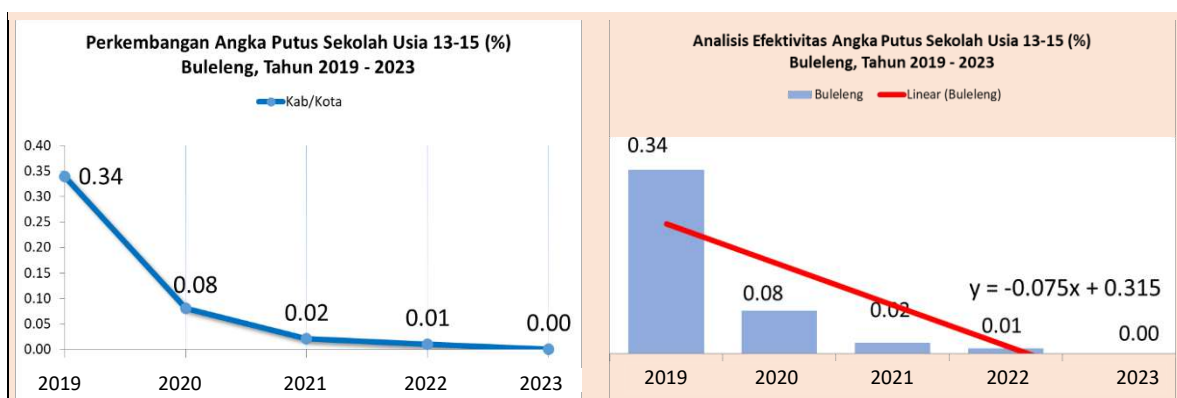
Grafik 3.12
Perkembangan dan Efektivitas Angka Putus Sekolah (APtS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng

Dari gambar di atas dapat dijelaskan APtS usia 7-12 tahun (jenjang SD/MI) di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 berfluktuatif secara tahunan, dengan tren cenderung menurun. Pada tahun 2019 APtS usia 7-12 tahun di Kabupaten Buleleng sebesar 0,01% meningkat secara signifikan pada tahun 2020 mencapai 0,72% dan menurun hingga 0% pada tahun 2023. Tren penurunan APtS di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -0,0737x + 0,3697$, dimana APtS setiap tahunnya diproyeksikan akan menurun sebesar 0,0737 poin persen. Perkembangan tersebut mengindikasikan efektivitas program dalam menekan tingkat APtS khususnya.

Grafik 3.13
Perkembangan dan Efektivitas Angka Putus Sekolah (APtS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng



Begitu pula dengan perkembangan dan efektivitas APts usia 13-15 tahun (jenjang SMP/Mts) di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023. Tren perkembangannya konsisten menurun. Kondisi pada tahun 2019 sebesar 0,34% menurun hingga mencapai 0,00% di tahun 2023, dimana kondisi akhir terjadi penurunan sebesar 0,01 poin persen dibandingkan kondisi tahun 2022 (0,01%). Tren penurunannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -0,075 + 0,315x$, dimana APtS usia 13-15 tahun di Kabupaten Buleleng dapat diproyeksikan akan menurun sebesar 0,075 poin persen setiap tahunnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipetakan permasalahan isu kemiskinan bidang pendidikan seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Pendidikan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

KABUPATEN BULELENG		PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI
		Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi	
INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN BIDANG PENDIDIKAN	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) konsisten meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (13,27) pada urutan ke-4 tertinggi dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (13,58), di atas nasional (13,15)	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,091 poin tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional	Posisi Relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas
	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) konsisten meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 0,01 poin dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (7,57) pada urutan ke-2 terendah dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (9,45) dan nasional (8,77)	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,13 poin tahun tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional	Posisi Relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas
	Angka Partisipasi Kasar (APK)	APK SD/MI (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat. Tahun 2023 menurun sebesar	Capaian indikator di Kab. Buleleng (99,80%) pada urutan ke-1 terendah dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali.	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,088% tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng tidak relevan dengan Prov. Bali dan nasional



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

			1,96% dibandingkan tahun sebelumnya	Posisi di bawah capaian Prov. Bali (102,7%) dan nasional (105,62%)			
		APK SMP/MTS (%)	Pola perubahan capaian indikator tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 7,91% dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (108,42%) pada urutan ke-1 tertinggi dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (98,18%) dan nasional (92,51%)	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 3,257 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan capaian Prov. Bali dan nasional	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah, namun tetap menjadi prioritas
Angka Partisipasi Murni (APM)	APM SD/MI (%)	Pola perubahan capaian indikator tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 0,02 poin % dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (95,12%) pada urutan ke-1 terendah dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (97,77%) dan nasional (97,89%)	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,046 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan capaian Prov. Bali dan nasional	Posisi Relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah, namun tetap menjadi prioritas	
	APM SMP/MTS (%)	Pola perubahan capaian indikator tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat. Tahun 2023 menurun sebesar 1,43 poin % dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (85,44%) pada urutan ke-5 terendah dari 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (84,78%) dan nasional (81,35%)	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,123 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian indikator (2019-2023) Kab. Buleleng relevan dengan capaian nasional	Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif masih bermasalah, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah, namun tetap menjadi prioritas	
Angka Putus Sekolah (APtS)	APtS SD/MI (%)	Pola perubahan capaian indikator tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren menurun. Tahun 2023 konsisten sebesar 0,00% dibandingkan tahun sebelumnya	Tidak dianalisis karena keterbatasan data	Efektif , capaian indikator (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 0,0737 poin % tiap tahunnya	Tidak dianalisis karena keterbatasan data	Perkembangan Antar Waktu dan Efektivitas tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas	



		<p>APtS SMP/ MTS (%)</p> <p>Pola perubahan capaian indikator tahunan (2019-2023) konsisten menurun. Tahun 2023 menurun sebesar 0,01 poin % dibandingkan tahun sebelumnya</p>	<p>Tidak dianalisis karena keterbatasan data</p>	<p>Efektif, capaian indikator (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 0,075 poin % tiap tahunnya</p>	<p>Tidak dianalisis karena keterbatasan data</p>	<p>Perkembangan Antar Waktu dan Efektivitas tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas</p>
--	--	---	--	---	--	---

2. Karakteristik Kemiskinan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat merupakan bagian hal penting yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi tanggungjawab pemerintah baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional yang dilakukan secara bersinergi. Semakin baik indikator-indikator kesehatan masyarakat pada suatu wilayah maka semakin baik pula tingkat kesehatannya.

Indikator kesehatan dapat menunjukkan sejauh mana upaya-upaya kesehatan yang telah dilakukan membawa pengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ada beberapa indikator yang bisa dijadikan acuan apakah suatu negara, dalam tataran lebih luas atau provinsi dan kabupaten/kota dalam tataran daerah memiliki tingkat kesehatan masyarakat yang baik atau tidak. Indikator yang umum dipakai adalah : Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), Prevalensi Balita Gizi Buruk, Prevalensi *Stunting* dan lain-lain.

a. Umur Harapan Hidup (Tahun)

Peningkatan kualitas hidup masyarakat salah satunya ditentukan atas keberhasilan pembangunan bidang kesehatan yang tercermin dari angka Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup yang semakin tinggi menyebabkan naiknya IPM suatu daerah, dan ini menjadi tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Gambaran UHH di Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 3.14
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : BPS, 2024

Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng tahun 2023 berada di angka 72,70 tahun pada urutan ke-4 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali, di atas Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Klungkung. Angka tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Bali (72,98), di atas capaian nasional (72,13).

Perkembangan UHH di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 meningkat secara konsisten. Perkembangannya meningkat sebesar 1,02 dari kondisi tahun 2019 (71,68) dan meningkat sebesar 0,38 dari kondisi tahun sebelumnya (72,32). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,253x + 71,337$ yang berarti UHH di Kabupaten Buleleng diproyeksikan akan meningkat sebesar 0,253 poin tahun setiap tahunnya.

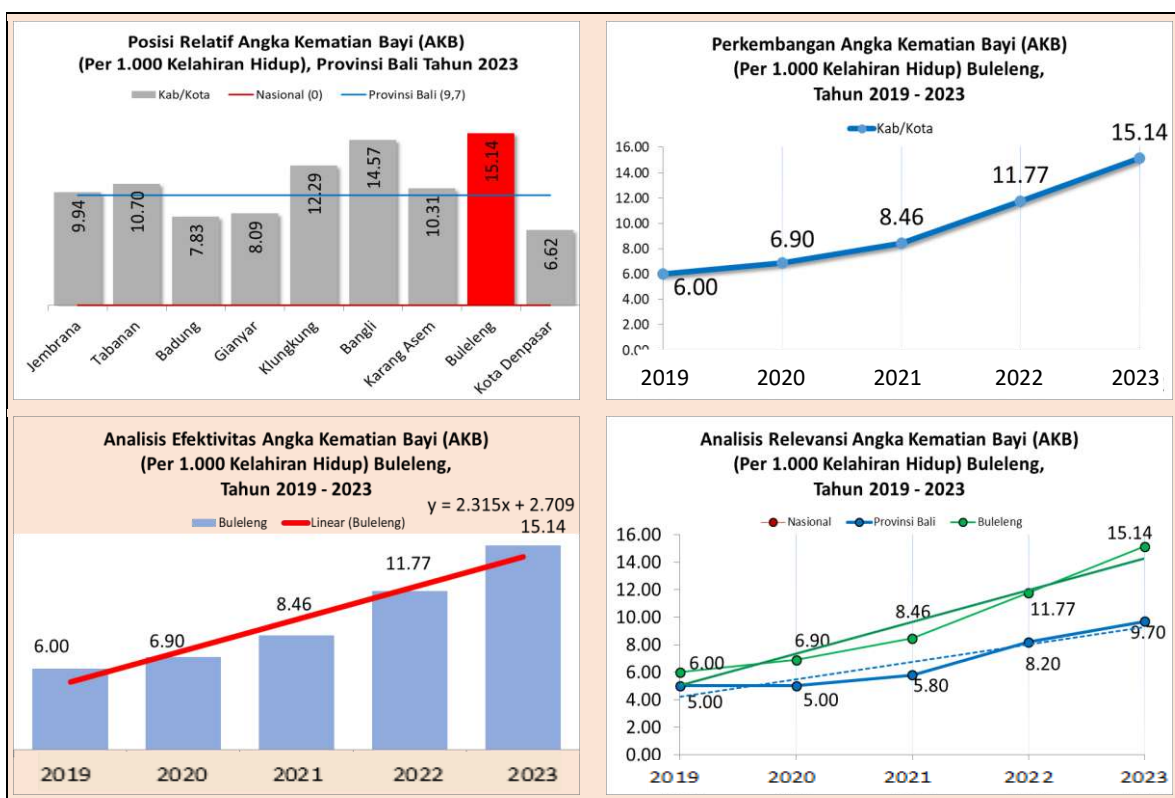
Tren peningkatan UHH di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian Provinsi Bali dan nasional. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, mendukung tujuan nasional dalam meningkatkan UHH khususnya.



b. Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)

Kematian bayi merupakan kematian yang terjadi pada usia 0-11 bukan dan bukan disebabkan oleh kecelakaan, cedera, bencana, ataupun bunuh diri. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator utama dalam penentuan status kesehatan suatu wilayah hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan perinatal. Pada tahun 2023 terdapat 146 kematian bayi dari 9.644 kelahiran hidup di Kabupaten Buleleng, dengan angka kematian bayi sebesar 15,14 per 1000 kelahiran hidup. Angka tersebut belum memenuhi target Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng tahun 2023 dimana AKB diharapkan dapat mencapai atau lebih rendah dari 9 per 1000 kelahiran hidup.

Grafik 3.15
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2023

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 15,14 per 1.000 KH berada pada urutan ke-1 tertinggi dari 9 kabupaten/kota se-Bali.



Capaian tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Bali (9,7 per 1.000 KH), tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional karena keterbatasan data.

Perkembangan AKB di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 terlihat konsisten meningkat. Peningkatannya sebesar 9,14 per 1.000 KH dari kondisi tahun 2019 sebesar 6,00 per 1.000 KH, dan meningkat sebesar 3,97 per 1.000 KH dari kondisi tahun sebelumnya 11,77 per 1.000 KH. Dilihat dari analisis efektivitasnya, tren peningkatan AKB ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 2,315x + 2,709$ dimana AKB di Kabupaten Buleleng diproyeksikan akan meningkat sebesar 2,315 per 1.000 KH setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan layanan program belum efektif menurunkan AKB.

Tren peningkatan AKB di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian Provinsi Bali, dengan nasional tidak dapat dibandingkan karena keterbatasan data. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang memburuk, tidak mendukung tujuan nasional dalam menurunkan AKB khususnya.

c. Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)

Angka Kematian Balita (AKABA) merupakan jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Pada tahun 2023 terdapat 155 kematian balita dari 9.644 kelahiran hidup di Kabupaten Buleleng dengan angka kematian balita sebesar 16,07 per 1000 KH.

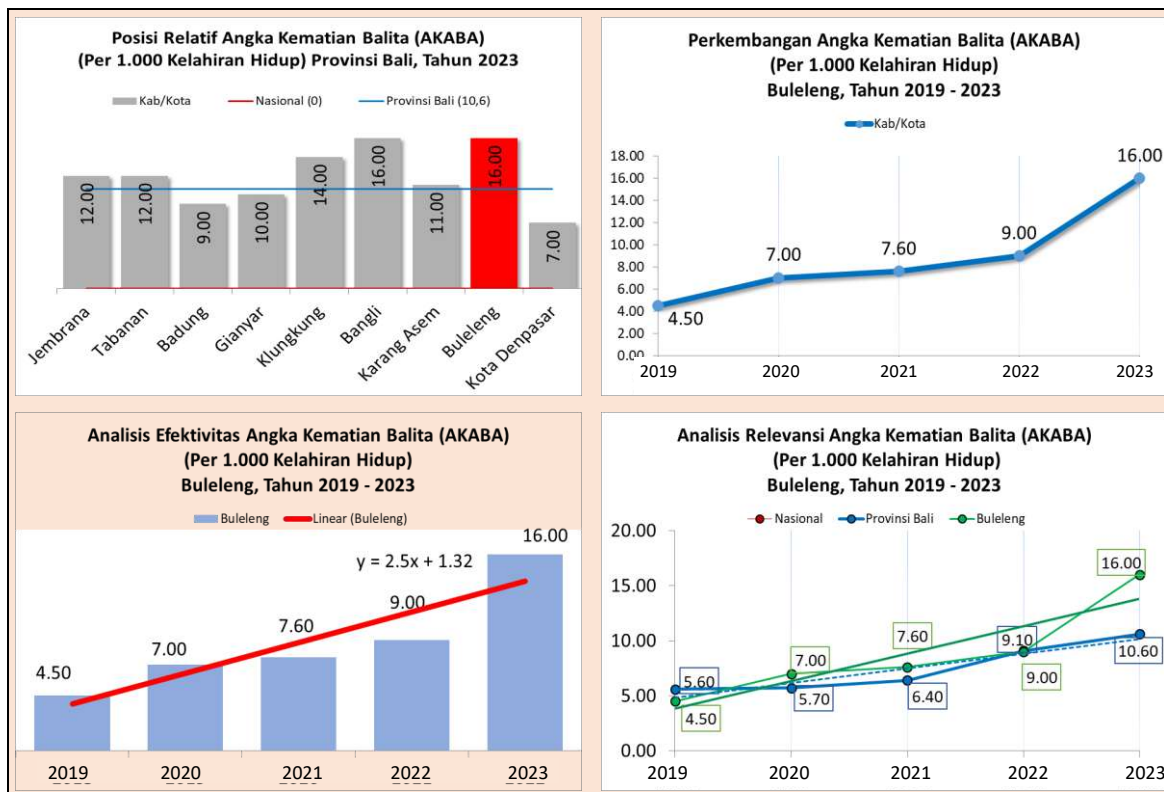
Dilihat dari posisi relatifnya, Angka Kematian Balita di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 16,00 per 1.000 KH berada pada urutan ke-1 tertinggi dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Capaian tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Bali (10,6 per 1.000 KH), tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional karena keterbatasan data. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan AKABA di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 terlihat konsisten meningkat. Peningkatannya sebesar 11,50 per 1.000 KH dari kondisi tahun 2019 sebesar 4,50 per 1.000 KH, dan meningkat sebesar 5,00 per 1.000 KH dari kondisi tahun sebelumnya 9,00 per 1.000 KH. Tren peningkatan AKABA ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 2,5x + 1,32$ dimana AKABA di Kabupaten Buleleng diproyeksikan akan meningkat sebesar 2,5 per 1.000 KH



setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan layanan program belum efektif menurunkan AKABA.

Grafik 3.16
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2023

Tren peningkatan AKABA di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian Provinsi Bali, dengan nasional tidak dapat dibandingkan karena keterbatasan data. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang memburuk, tidak mendukung tujuan nasional dalam menurunkan AKABA khususnya.

d. Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan atau diperberat oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau penanganannya serta bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri pada setiap 100.000

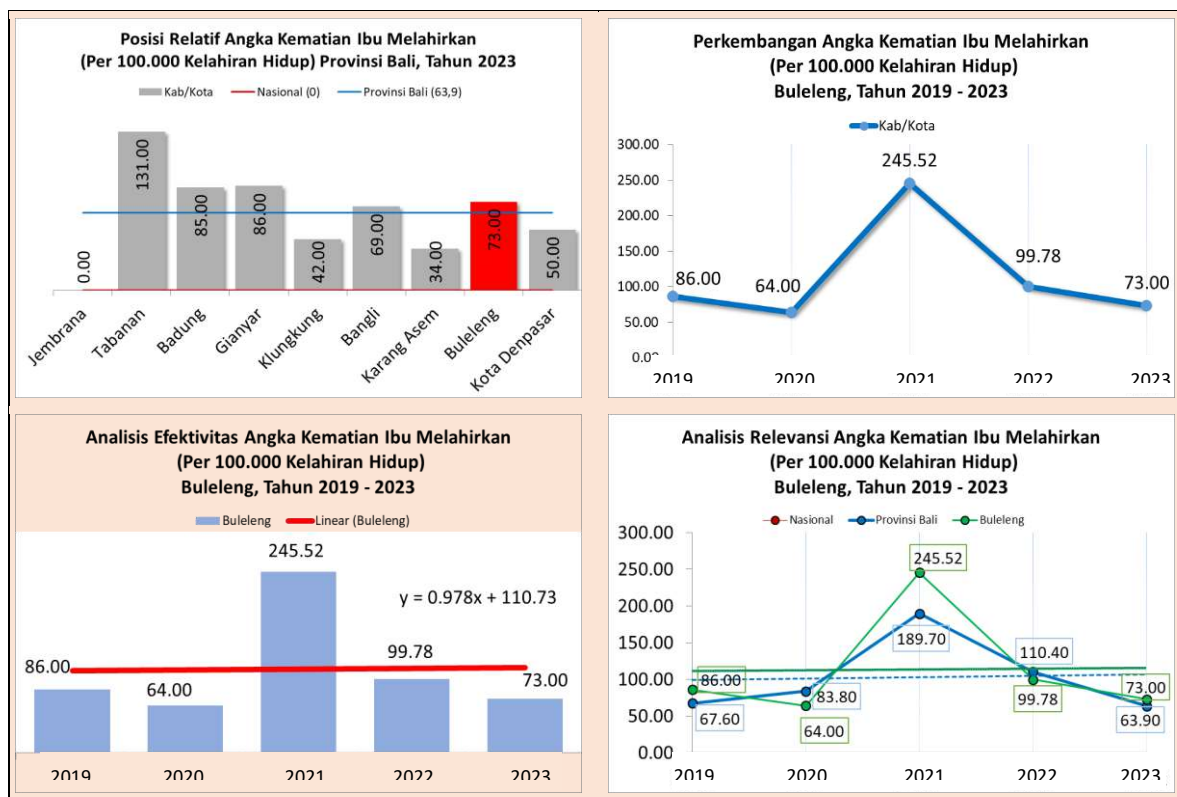


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

kelahiran hidup. AKI berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, serta pelayanan kesehatan persalinan dan masa nifas. Oleh karena itu Angka Kematian Ibu digunakan sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan program kesehatan ibu.

Pada tahun 2023 terdapat 7 kematian ibu di Kabupaten Buleleng dengan Angka Kematian Ibu sebesar 73 per 100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota se-Bali, AKI Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-4 tertinggi di bawah Kabupaten Tabanan, Gianyar, dan Badung. Angka capaian tersebut masih di atas capaian Provinsi Bali (63,9 per 100.000 KH) dan tidak bisa dibandingkan dengan nasional karena keterbatasan data.

Grafik 3.17
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2023

Pola perkembangan AKI Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 kelihatan berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kondisi tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 13 per 100.000 KH dibandingkan kondisi tahun 2019



sebesar 86 per 100.000 KH. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi penurunan sebesar 26,78 per 100.000 KH. Tren peningkatan AKI ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,978x + 110,73$ yang mengindikasikan akan terjadi peningkatan sebesar 0,978 per 100.000 KH secara proyeksi setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan layanan program belum efektif menurunkan AKI, namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah membaik.

Tren peningkatan AKI di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh tren peningkatan capaian Provinsi Bali, sedangkan dengan nasional tidak dapat dibandingkan karena keterbatasan data. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi ke arah yang memburuk, tidak mendukung tujuan nasional dalam menurunkan AKI khususnya. Namun dalam kurun waktu dua tahun terakhir sudah mulai membaik.

e. Prevalensi Balita Gizi Buruk

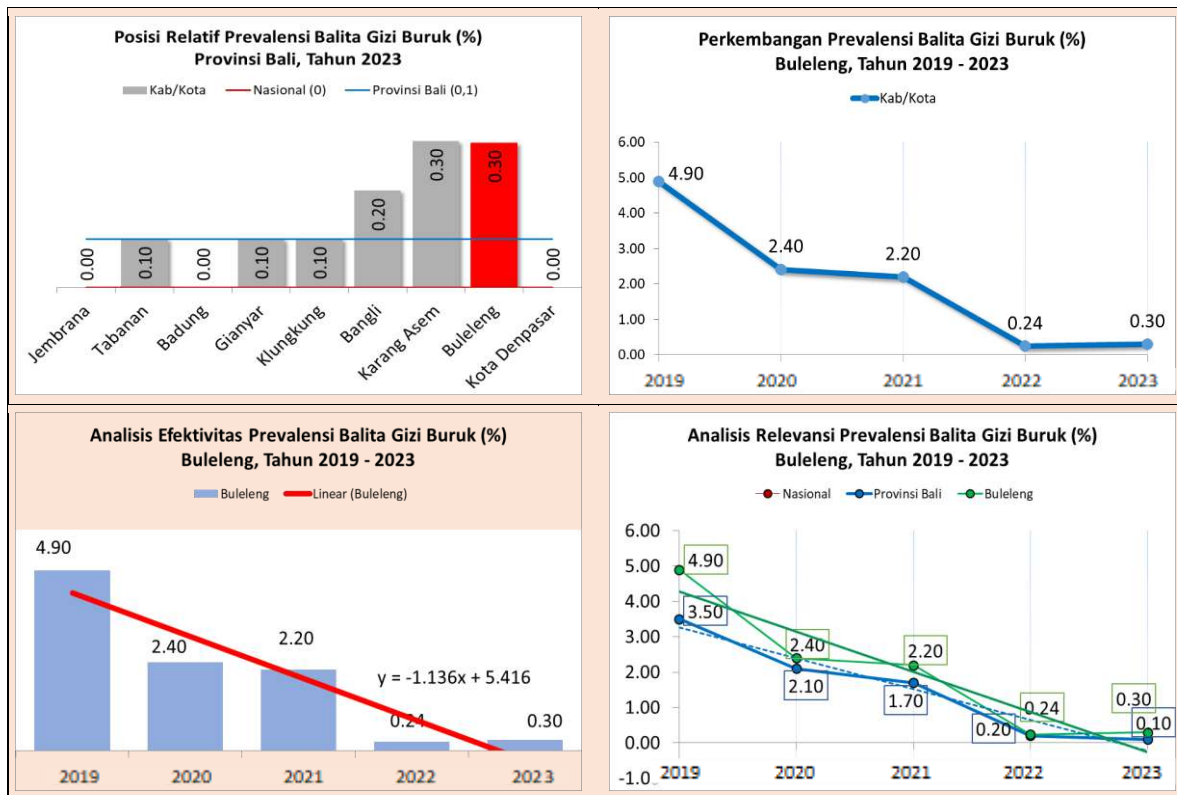
Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < -3 dan atau dengan tanda-tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor). Pada Tahun 2023 ditemukan 68 kasus balita gizi buruk dari 26.105 balita (0-59 bulan) yang diukur BB/TB.

Dilihat dari posisi relatifnya, Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 0,3% berada pada urutan ke-1 tertinggi dari 9 kabupaten/kota se-Bali. Capaian tersebut masih berada di atas capaian Provinsi Bali (0,1%), tidak dapat dibandingkan dengan capaian nasional karena keterbatasan data. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 terlihat berfluktuatif dengan tren menurun. Penurunannya sebesar 4,60% dibandingkan kondisi tahun 2019 (4,90%), meningkat sebesar 0,06% jika dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 0,24%. Tren penurunannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -1,136x + 5,416$ yang bermakna bahwa Prevalensi Balita Gizi Buruk dapat diproyeksikan akan menurun sebesar 1,136% setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan layanan program efektif menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk.



Grafik 3.18
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali, 2023

Tren penurunan Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh penurunan capaian Provinsi Bali, sedangkan dengan nasional tidak dapat dibandingkan karena keterbatasan data. Pola perkembangannya menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, mendukung tujuan nasional dalam menurunkan Prevalensi Balita Gizi Buruk khususnya.

f. Prevalensi Stunting

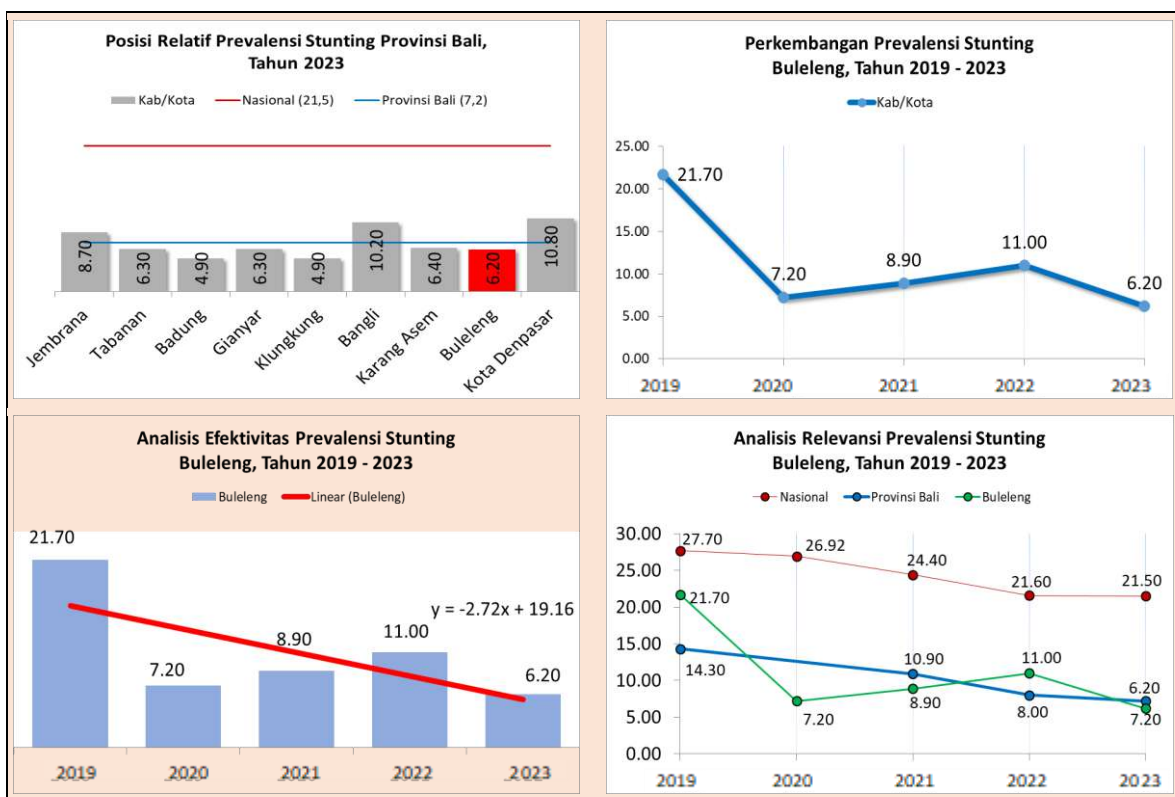
Stunting merupakan salah satu masalah utama bidang kesehatan di Indonesia, karena dari hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 dan tahun 2018 angka prevelensi Balita *Stunting* masih cukup tinggi. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Secara umum kekurangan gizi pada Balita terjadi sejak bayi dalam kandungan atau masa kehamilan Ibu. Selain pada saat bayi dalam kandungan yang kekurangan gizi, juga dapat terjadi pada masa awal setelah bayi lahir. Namun kondisi Balita yang menderita *stunting* baru dapat diketahui ketika bayi berusia 2 tahun. Balita yang mengalami *stunting* cenderung memiliki tingkat kecerdasan di bawah Balita yang normal, lebih rentan terkena penyakit, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan tingkat produktivitas. Hal tersebut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia dengan mengambil langkah-langkah percepatan penanggulangan *stunting* dengan target 14% di Tahun 2024.

Grafik 3.19
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas dan Relevansi Prevalensi Stunting Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : SSGI, EPPGBM, SKI

Dilihat dari posisi relatifnya, Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 6,20% berada pada urutan ke-3 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali, di atas Kabupaten Badung dan Klungkung. Capaian tersebut berada di bawah capaian Provinsi Bali (7,2%) dan nasional (21,5%).



Perkembangan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 terlihat berfluktuatif dengan tren menurun. Prevalensi *stunting* tahun 2023 menurun sebesar 15,5% dari kondisi tahun 2019 sebesar 21,70%, menurun sebesar sebesar 4,80% dari tahun 2022. Tren penurunannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -2,72x + 19,16$ atau dapat diproyeksikan akan menurun sebesar 2,72 poin persen setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan layanan program efektif menurunkan Prevalensi *Stunting*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut.

Tren penurunan Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Buleleng pada rentang tahun 2019-2023 terlihat diikuti oleh penurunan capaian Provinsi Bali dan nasional. Pola perkembangannya menunjukkan adanya relevansi ke arah yang membaik, mendukung tujuan nasional dalam menurunkan Prevalensi *Stunting* khususnya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipetakan permasalahan isu kemiskinan bidang kesehatan seperti disajikan pada tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Kesehatan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

KABUPATEN BULELENG		PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI
		Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi	
INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN BIDANG KESEHATAN	Umur Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) konsisten meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 0,38 poin tahun dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (72,70) pada posisi ke-4 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (72,98), di atas nasional (72,13)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,253 poin tahun tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Posisi Relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas
	Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) konsisten meningkat. Tahun 2023 meningkat sebesar 3,97 per 1.000 KH	Capaian indikator di Kab. Buleleng (15,14 per 1.000 KH) pada posisi ke-1 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (9,7 per 1.000 KH)	Belum efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 2,315 per 1.000 KH tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali ke arah yang memburuk	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi masih bermasalah



BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

		dibandingkan tahun sebelumnya				
Angka Kematian Balita (per 1.000 KH)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) konsisten meningkat. Tahun 2023 meningkat sebanyak 5,00 per 1.000 KH dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (16,00 per 1.000 KH) pada posisi ke-1 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (10,6 per 1.000 KH)	Belum efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 2,5 per 1.000 KH tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali ke arah yang memburuk	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi masih bermasalah	
Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat. Tahun 2023 menurun sebesar 26,78 per 100.000 KH dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (73 per 1.000 KH) pada posisi ke-4 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (63,9 per 100.000 KH)	Belum efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,978 per 100.000 KH tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali ke arah yang memburuk	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi masih bermasalah	
Prevalensi Balita Gizi Buruk (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren menurun. Tahun 2023 meningkat sebesar 0,06% dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (0,3%) pada posisi ke-1 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (0,1%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 0,33% tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali ke arah yang membaik	Posisi Relatif dan Perkembangan Antar Waktu masih bermasalah, Efektivitas dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas	
Prevalensi Stunting (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren menurun. Tahun 2023 menurun sebesar 4,80% dibandingkan tahun sebelumnya	Capaian indikator di Kab. Buleleng (6,20%) pada posisi ke-3 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (7,20%) dan nasional (21,50%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 2,72 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas	

3. Karakteristik Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Bidang infrastruktur dasar merupakan bagian dimensi penting dalam penanggulangan kemiskinan yang perlu dilakukan analisis. Indikator utama pada bidang infrastruktur dasar yang dianalisis meliputi proporsi rumah tangga



dengan sanitasi layak (%), proporsi rumah tangga dengan air minum layak (%) dan proporsi rumah tangga dengan akses listrik (%). Indikator utama tersebut dianalisis berdasarkan kondisi perkembangan antar waktu, antar wilayah, efektivitas, dan relevansi. Gambaran yang diperoleh dari hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam intervensi kebijakan untuk memenuhi capaian target yang diharapkan.

Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagian masih bermasalah dan merupakan indikator penting pelayanan dasar, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Bidang Infrastruktur Dasar yang memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng:

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Infrastruktur Dasar Perumahan
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Buleleng	Capaian Provinsi Bali	Capaian Nasional
Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%)	90,99	95,70	82,36
Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%)	95,49	98,31	91,72
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%)	99,76	99,90	99,37

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari ketiga indikator utama kemiskinan bidang infrastruktur dasar perumahan, masih berada dibawah capaian Provinsi Bali. Namun untuk ketiga indikator Bidang Infrastruktur Dasar, capaian Kabupaten Buleleng masih lebih baik dari capaian nasional. Walaupun demikian, indikator ini tetap menjadi perhatian utama untuk di intervensi dalam program pengentasan kemiskinan.

a. Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)

Posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kabupaten Buleleng tahun 2023 berada pada urutan ke-2 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali dengan capaian sebesar 90,99%, di atas capaian Kabupaten Karangasem.

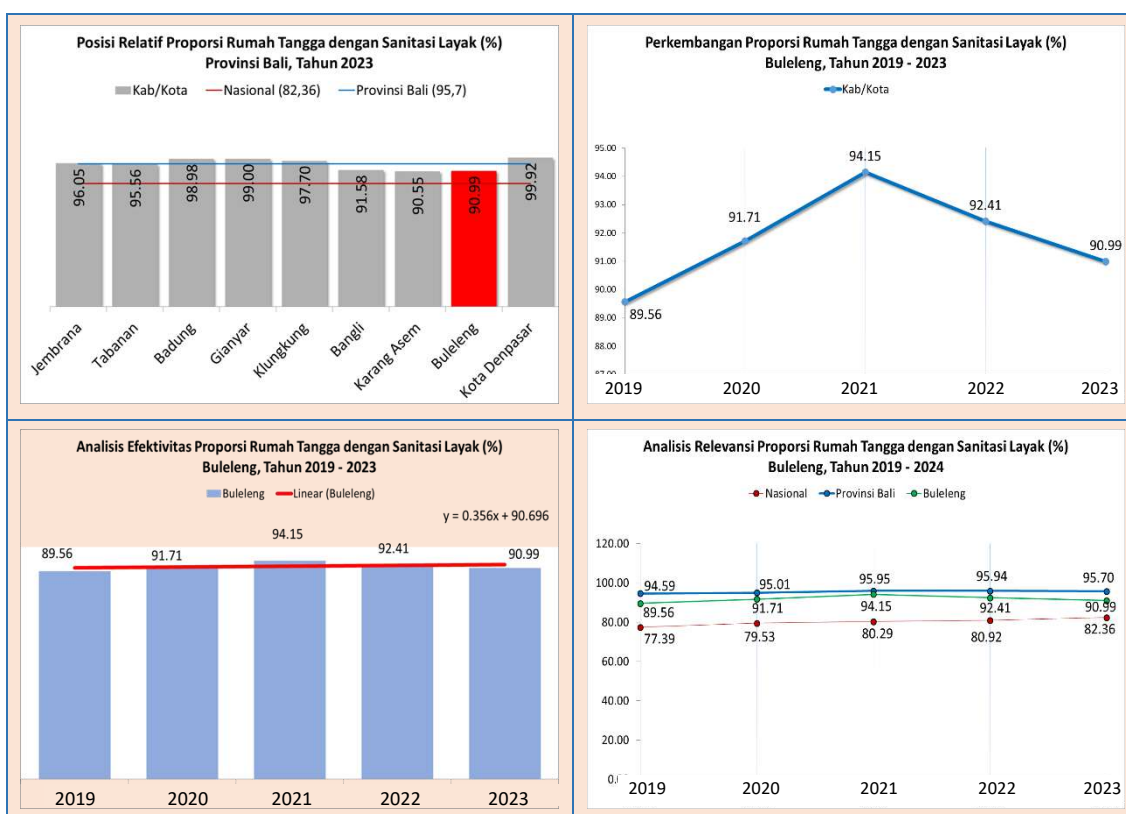


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Capaian tersebut masih berada di bawah capaian Provinsi Bali (95,70%), di atas capaian nasional (82,36%).

Perkembangan antar waktunya, selama kurun lima tahun terakhir (2019-2023) terlihat berfluktuatif dengan tren meningkat. Kondisi capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,43 poin persen dibandingkan capaian tahun 2019 (89,56%), menurun sebesar 1,42 poin persen dari kondisi tahun sebelumnya (92,41%). Efektivitas peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan $y = 0,356x + 90,696$ yang mengindikasikan bahwa proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dapat diproyeksikan meningkat sebesar 0,356 poin persen tiap tahunnya.

Grafik 3.20
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Perkembangan capaian proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak (%) pada tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya relevansi, dengan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan, bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh



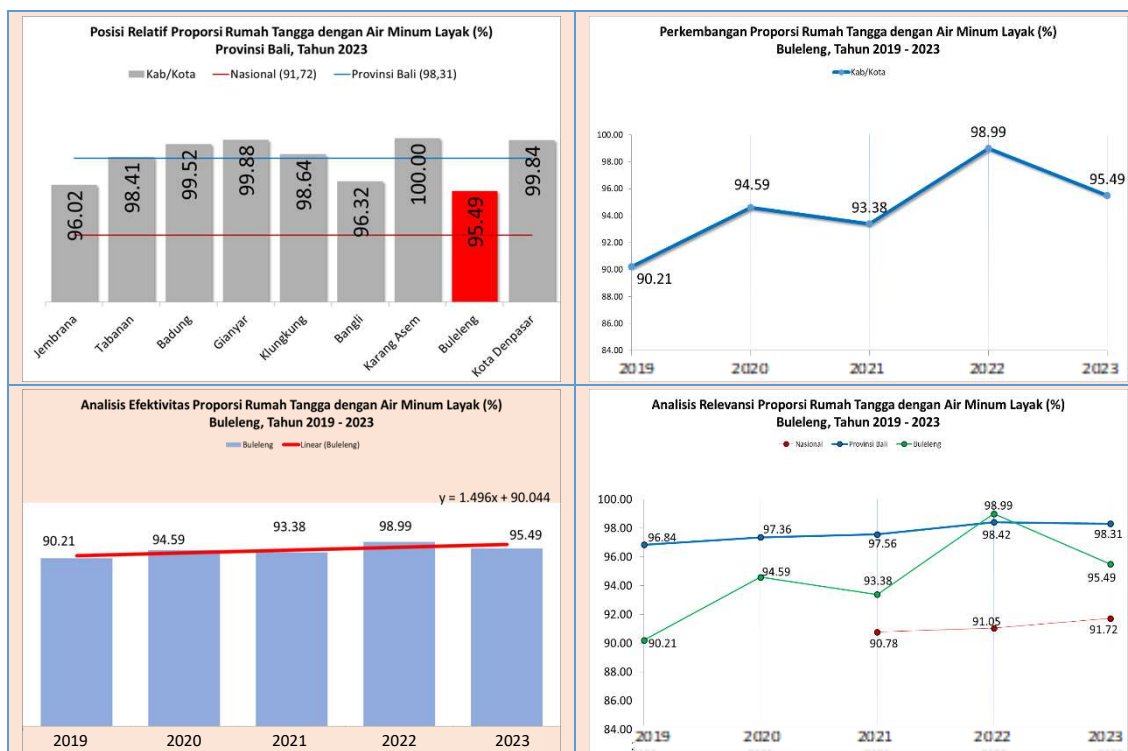
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Buleleng sejalan mendukung tujuan Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak. Dengan peningkatan capaian indikator tersebut diharapkan diikuti dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

b. Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)

Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Buleleng tahun 2023 dengan capaian sebesar 95,49%. Capaian tersebut berada pada posisi ke-1 terendah di antara 9 kabupaten/kota se-Bali, di bawah capaian Provinsi Bali (98,31%) di atas nasional (91,72%). Untuk lebih jelasnya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.21
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Dilihat dari perkembangan antar waktunya, proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar 5,28 poin persen dari capaian pada



tahun 2019 sebesar 90,21%. Namun capaian tahun 2023 tersebut menurun sebesar 3,5 poin persen dari capaian tahun sebelumnya (98,99%). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 1,496x + 90,044$, bahwa proporsi rumah tangga dengan air minum layak dapat diproyeksikan meningkat sebesar 1,496 poin persen tiap tahunnya.

Perkembangan capaian proporsi rumah tangga dengan air minum layak pada tingkat nasional, Provinsi Bali dan Kabupaten Buleleng menunjukkan adanya relevansi, dengan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Mengindikasikan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sejalan mendukung tujuan Provinsi Bali dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak.

Dengan peningkatan capaian indikator tersebut diharapkan derajat kesehatan masyarakat akan ikut naik, karena akan berdampak pada pengurangan beban pengeluaran bagi penduduk miskin.

c. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)

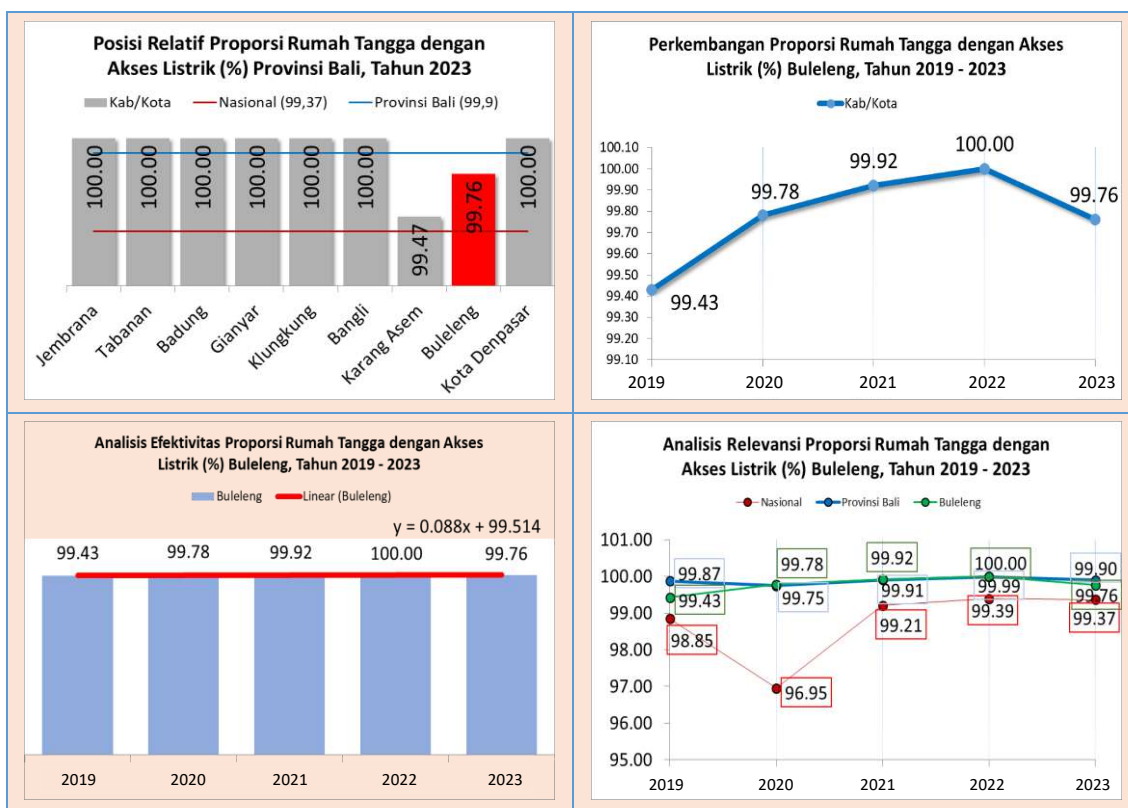
Posisi relatif proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 99,76% berada di bawah capaian Provinsi Bali (99,90%) di atas capaian nasional (99,37%). Dari 9 kabupaten/kota se-Bali, capaian Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-2 terendah diatas Kabupaten Karangasem.

Perkembangan antar waktu proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 terlihat berfluktuatif dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar 0,33 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 99,43% namun menurun sebesar 0,24 poin persen dari tahun sebelumnya (100%). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,088x + 99,514$ atau dapat diproyeksikan meningkat sebesar 0,088% tiap tahunnya.

Tren perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses listrik pada tingkat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan nasional menunjukkan adanya relevansi, sama-sama mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan program yang dilaksanakan sudah efektif dalam mendukung tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan rumah tangga dengan akses listrik.



Grafik 3.22
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Dari uraian tersebut di atas dapat dipetakan permasalahan isu kemiskinan bidang nfrastruktur dasar seperti disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Berdasarkan
4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023

KABUPATEN BULELENG	PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI	
	Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi		
INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR	Proporsi Rumah Tangga Dengan Sanitasi Layak (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 1,42 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (90,99%) pada posisi ke-2 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (95,70%), di atas nasional (82,36%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,356 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif masih bermasalah, Efektivitas dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas penanganan
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Air Minum Layak (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 3,5 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (93,38%) pada posisi ke-1 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (98,31%), di atas nasional (91,72%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 1,496 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif masih bermasalah, Efektivitas dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas penanganan
	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Listrik (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 0,24 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (99,76%) pada posisi ke-2 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (99,90%), dan di atas nasional (99,37%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,088% tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Perkembangan Antar Waktu dan Posisi Relatif masih bermasalah, Efektivitas dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas penanganan

4. Karakteristik Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan modal dasar dalam pembangunan di segala bidang, tentunya dengan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing. Namun sebaliknya, jika sumber daya manusia tidak berdaya saing akan menjadi beban pemerintah dalam pembangunan. Pemberdayaan sumber daya manusia dapat



dilakukan melalui program-program peningkatan kapasitas. Selain itu, perkembangan jumlah penduduk merupakan bagian yang harus diimbangi dengan kemajuan dibidang ketenagakerjaan.

Indikator utama pada bidang ketenagakerjaan yang dianalisis meliputi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%), Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%), dan Indikator Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%). Indikator utama tersebut dianalisis berdasarkan kondisi perkembangan antar waktu, antar wilayah, efektivitas, dan relevansi. Gambaran yang diperoleh dari hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam intervensi kebijakan untuk memenuhi capaian target yang diharapkan.

Capaian indikator-indikator tersebut di Kabupaten Buleleng Tahun 2021, sebagian masih bermasalah dan merupakan indikator penting, sehingga masih menjadi prioritas utama dalam penanggulangan kemiskinan. Berikut Capaian indikator-indikator Bidang Ketenagakerjaan yang memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Buleleng:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2023

INDIKATOR	Capaian Kabupaten Buleleng	Capaian Provinsi Bali	Capaian Nasional
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,60	2,69	5,32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,49	77,08	69,48
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	94,68	97,31	96,40

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024

Tabel 3.9
Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke atas (Orang)	627.160
2	Angkatan Kerja: (Orang)	473.440
	Bekerja	456.389
	Mecari Pekerjaan/Pengangguran	17.051



3	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	153.720
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	75,49
5	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	94,68
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,60

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, 2024

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk Buleleng, jumlah penduduk usia kerja 15 tahun ke atas juga semakin meningkat dan secara ideal akan diikuti peningkatan TPAK. TPAK mengindikasikan besarnya cakupan penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu proses perekonomian.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Buleleng menjadi bagian masalah dalam prioritas intervensi penanggulangan kemiskinan. TPT tercatat masih relatif besar mencapai 3,60% atau 17.051 orang dari total angkatan kerja.

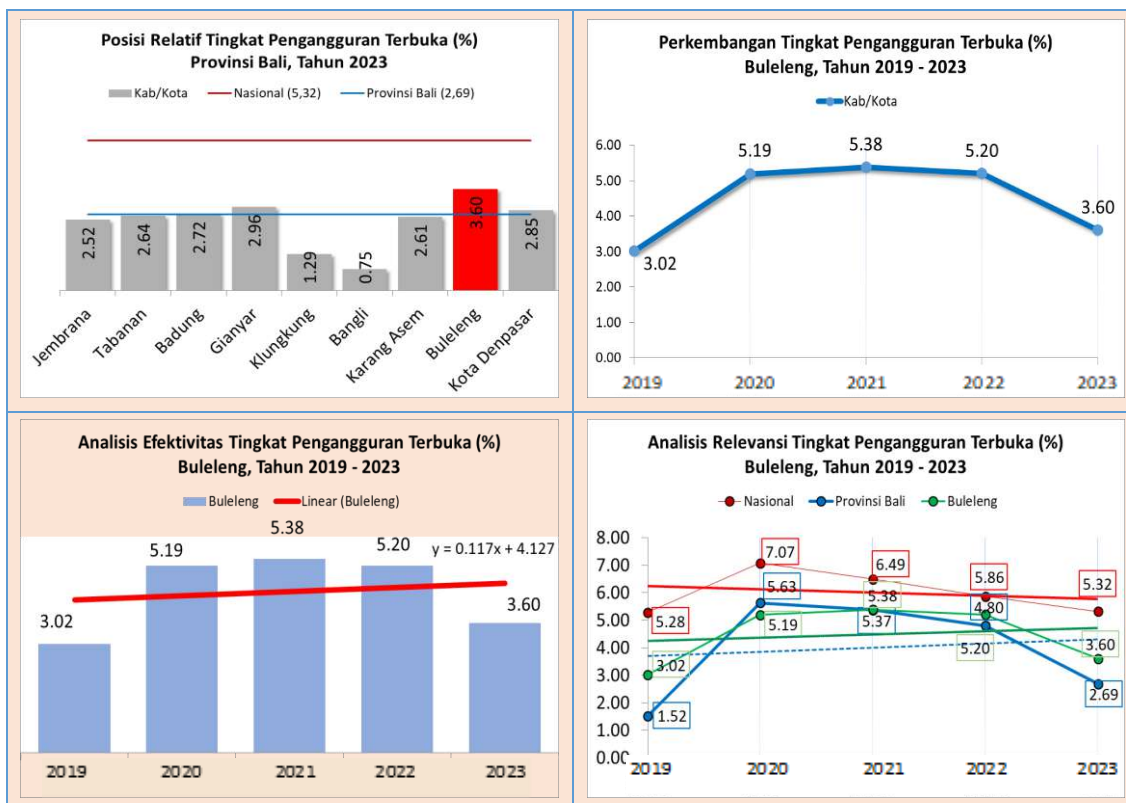
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Manfaat analisis terhadap indikator ini adalah untuk melihat keterjangkauan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi mengindikasikan adanya persoalan kemiskinan yang serius, masih tingginya penduduk yang belum memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Posisi relatif TPT di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 3,60% berada di atas capaian Provinsi Bali (2,69%), di bawah capaian nasional (5,32%). Dibandingkan dengan 9 kabupaten/kota se-Bali, capaian Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-1 tertinggi.

Perkembangan TPT di Kabupaten Buleleng selama kurun tahun 2019-2023 berfluktuasi dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar 0,58 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 3,02% dan menurun sebesar 1,60 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya (5,20%). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,117x + 4,127$ atau TPT dapat diproyeksikan meningkat sebesar 0,117 poin persen tiap tahunnya.



Grafik 3.23
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Tren perkembangan TPT pada tingkat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali dan nasional menunjukkan adanya relevansi, sama-sama terlihat mengalami peningkatan (memburuk) selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Capaian indikator TPT (%) tersebut menunjukkan masih adanya masalah. Dengan demikian, indikator tersebut menjadi prioritas intervensi untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan capaian indikator TPT diharapkan diikuti dengan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

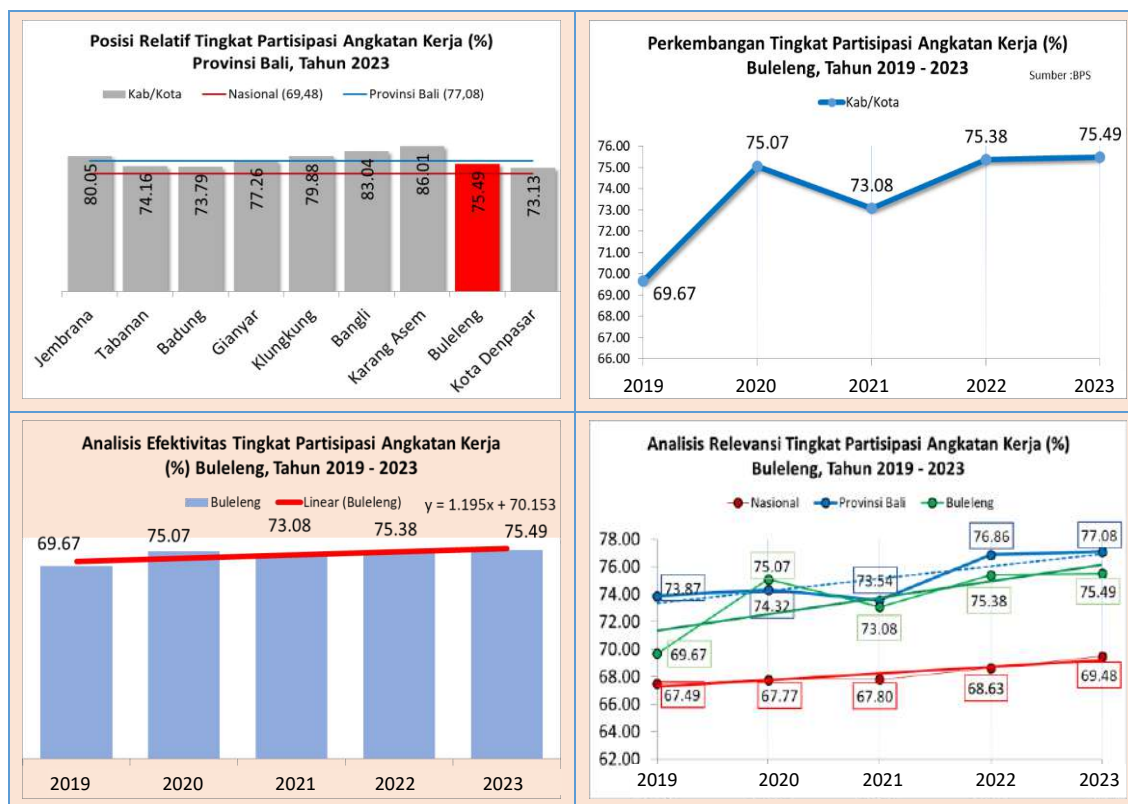
Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah memperoleh pekerjaan maupun yang belum. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin besar bagian dari penduduk



usia kerja yang terlibat atau yang berusaha terlibat dalam kegiatan yang produktif untuk memproduksi barang dan/jasa dalam kurun waktu tertentu.

Posisi relatif, perkembangan, efektivitas, dan relevansi TPAK di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.24
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Berdasarkan posisi relatif, capaian TPAK di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 75,49% berada di bawah capaian Provinsi Bali (77,08%), di atas capaian nasional (69,48%). Dibandingkan dengan Kabupaten/kota se-Bali, capaian Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-4 terendah di atas Kabupaten Badung, Tabanan, dan Kota Denpasar.

Perkembangan antar waktu TPAK di Kabupaten Buleleng selama kurun tahun 2019-2023 terlihat mengalami fluktuasi, dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar 5,82 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 69,67% dan meningkat sebesar 0,11 poin persen dari kondisi tahun 2022 (75,38%). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 1,195x$



+ 70,153 atau TPAK dapat diproyeksikan meningkat sebesar 1,195 poin persen tiap tahunnya.

Tren perkembangan TPAK pada tingkat Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali sama-sama terlihat mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan, capaian Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali relevan mendukung capaian nasional untuk meningkatkan TPAK khususnya.

c. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya angkatan kerja yang bekerja. Semakin tinggi nilai TKK, maka dapat diartikan bahwa kesempatan kerja semakin tinggi.

Berdasarkan posisi relatif, capaian TKK di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 96,40% berada di bawah capaian Provinsi Bali (97,31%), di atas capaian nasional (94,68%). Capaian TKK Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-1 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali.

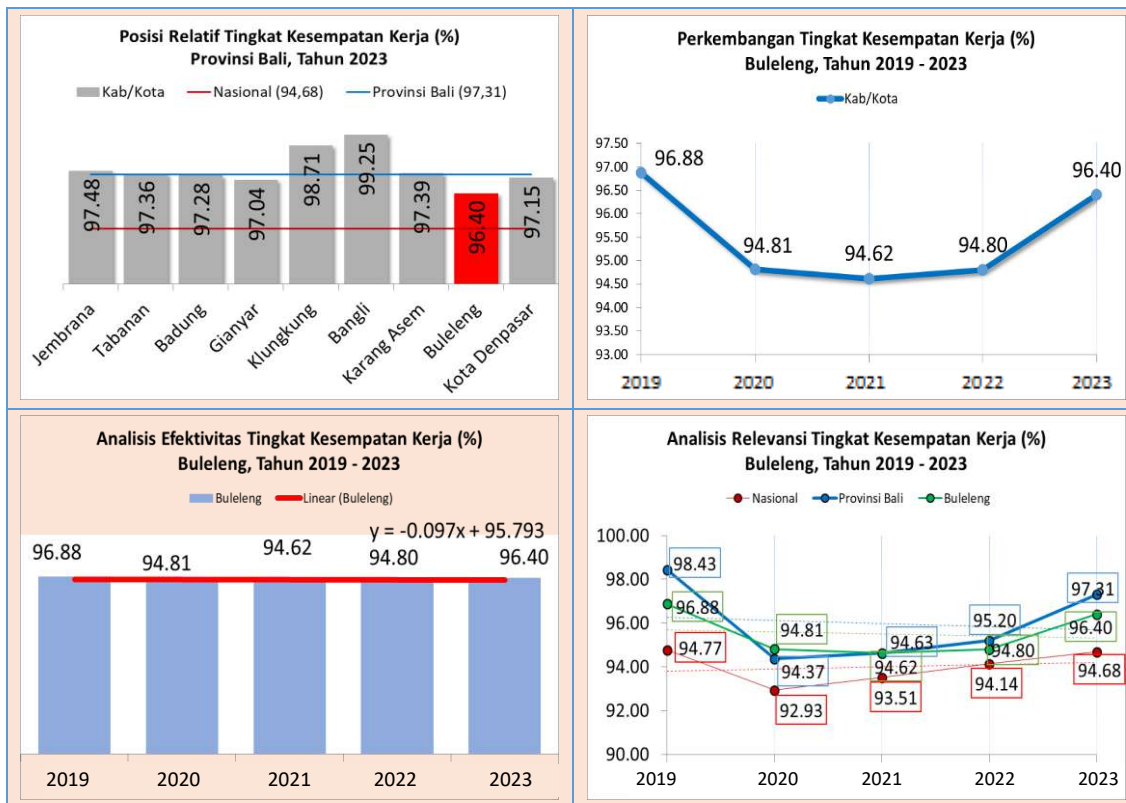
Perkembangan antar waktu TKK di Kabupaten Buleleng selama kurun tahun 2019-2023 terlihat berfluktuasi, dengan tren menurun. Penurunannya sebesar 0,48 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 96,88% namun meningkat sebesar 1,60 poin persen dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 94,80%. Tren penurunannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = -0,097x + 95,793$ atau dapat diproyeksikan menurun sebesar 0,097 poin persen tiap tahunnya.

Tren perkembangan TKK selama kurun waktu lima tahun terakhir pada tingkat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan nasional sama-sama terlihat mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi capaian Kabupaten Buleleng terhadap capaian Provinsi Bali dan nasional, khususnya pada capaian TKK ke arah yang memburuk.

Posisi relatif, perkembangan, efektivitas, dan relevansi TKK di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut.



Grafik 3.25
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Kesempatan Kerja (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Capaian indikator TKK (%) tersebut menunjukkan masih adanya masalah, dijadikan prioritas intervensi untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan capaian indikator TKK diharapkan diikuti dengan peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipetakan permasalahan isu kemiskinan bidang ketenagakerjaan seperti disajikan pada Tabel 3.10 berikut.



Tabel 3.10
Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Berdasarkan 4 (Empat) Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

KABUPATEN BULELENG		PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI
		Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi	
INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN BIDANG KETENAGAKERJAAN	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 1,60 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (3,60%) pada posisi ke-1 tertinggi dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di atas capaian Prov. Bali (2,69%), di bawah nasional (5,32%)	Belum Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,117 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang memburuk	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi masih bermasalah
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 meningkat sebesar 0,11 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (75,49%) pada posisi ke-4 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (77,08%), di atas nasional (69,48%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 1,195 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang memburuk	Efektivitas relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren menurun . Tahun 2023 meningkat sebesar 1,60 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (96,40%) pada posisi ke-1 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (97,31%), di atas nasional (94,68%)	Belum Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju penurunan sebesar 0,097 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang memburuk	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas, dan Relevansi masih bermasalah

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator-indikator ketenagakerjaan, semua indikator yang masih bermasalah dan perlu diprioritaskan untuk diintervensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

5. Karakteristik Kemiskinan Bidang Ekonomi

Dimensi kemiskinan pada bidang ekonomi difokuskan pada indikator utama pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi.



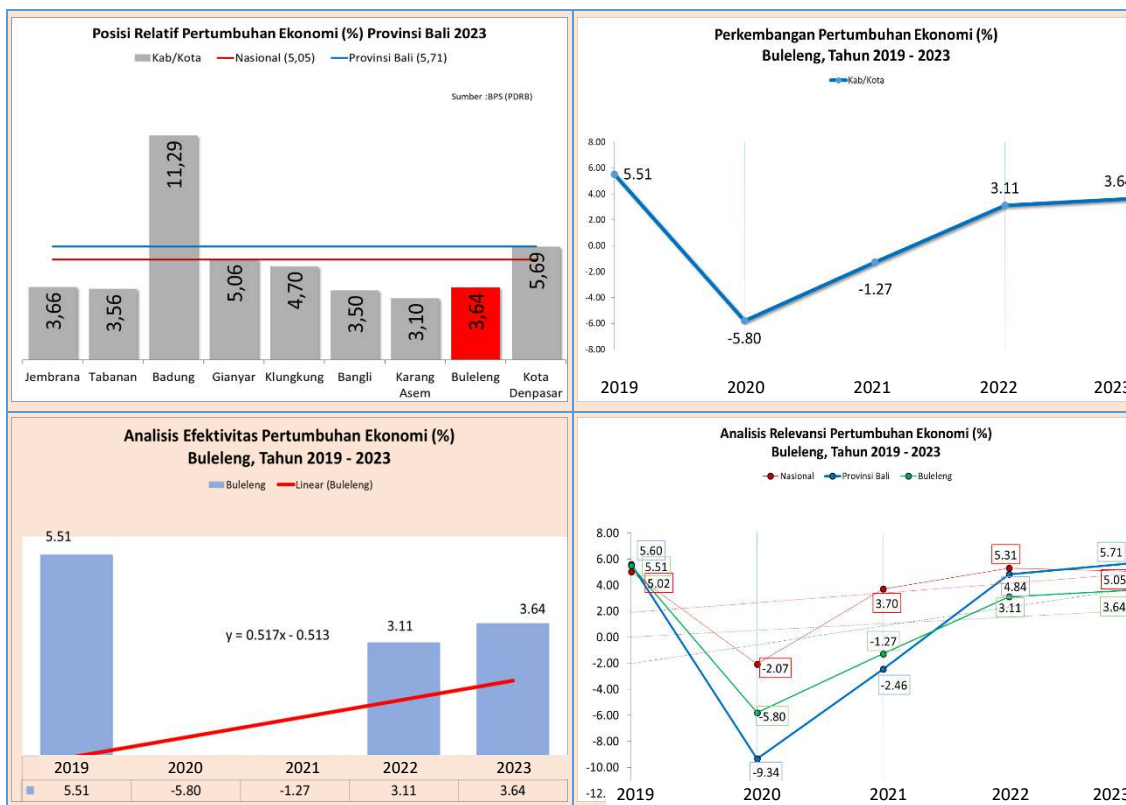
a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari suatu kurun waktu pada suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi mengindikasikan produksi barang dan jasa semakin meningkat, semakin baiknya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebesar 3,64% berada di bawah capaian Provinsi Bali (5,71%) dan capaian nasional (5,05%). Diantara 9 kabupaten/kota se-Bali, capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng berada pada urutan ke-4 terendah, di atas capaian Kabupaten Karangasem, Bangli, dan Tabanan.

Posisi relatif, Perkembangan, efektivitas, dan relevansi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.26
Posisi Relatif, Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Berdasarkan perkembangan antar waktunya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan tren meningkat.



Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 5,51% terjadi penurunan sebesar 1,87 poin persen, namun dibandingkan capaian tahun sebelumnya (3,11%) mengalami peningkatan sebesar 0,53 poin persen. Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,517x - 0,513$ atau dapat diproyeksikan meningkat sebesar 0,517 poin persen tiap tahunnya.

Penurunan atau kontraksi tertinggi ke arah negatif terjadi pada tahun 2020, yakni sebesar -5,80%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya bencana non alam pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kapasitas produksi, tingkat konsumsi dan investasi mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi juga melemah. Dampaknya masih dirasakan sampai tahun 2023 dengan indikasi pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun lambat.

Tren perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dan nasional selama kurun waktu lima tahun terakhir sama-sama terlihat mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan adanya relevansi antara capaian Kabupaten Buleleng terhadap capaian Provinsi Bali dan nasional, dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya.

Capaian indikator pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan masih adanya masalah. Dengan demikian, indikator pertumbuhan ekonomi harus dijadikan prioritas intervensi secara berkelanjutan untuk dilakukan perbaikan, dengan percepatan dan laju pertumbuhan positif.

b. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu masalah perekonomian dan determinan bidang kemiskinan. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di dalam negeri mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

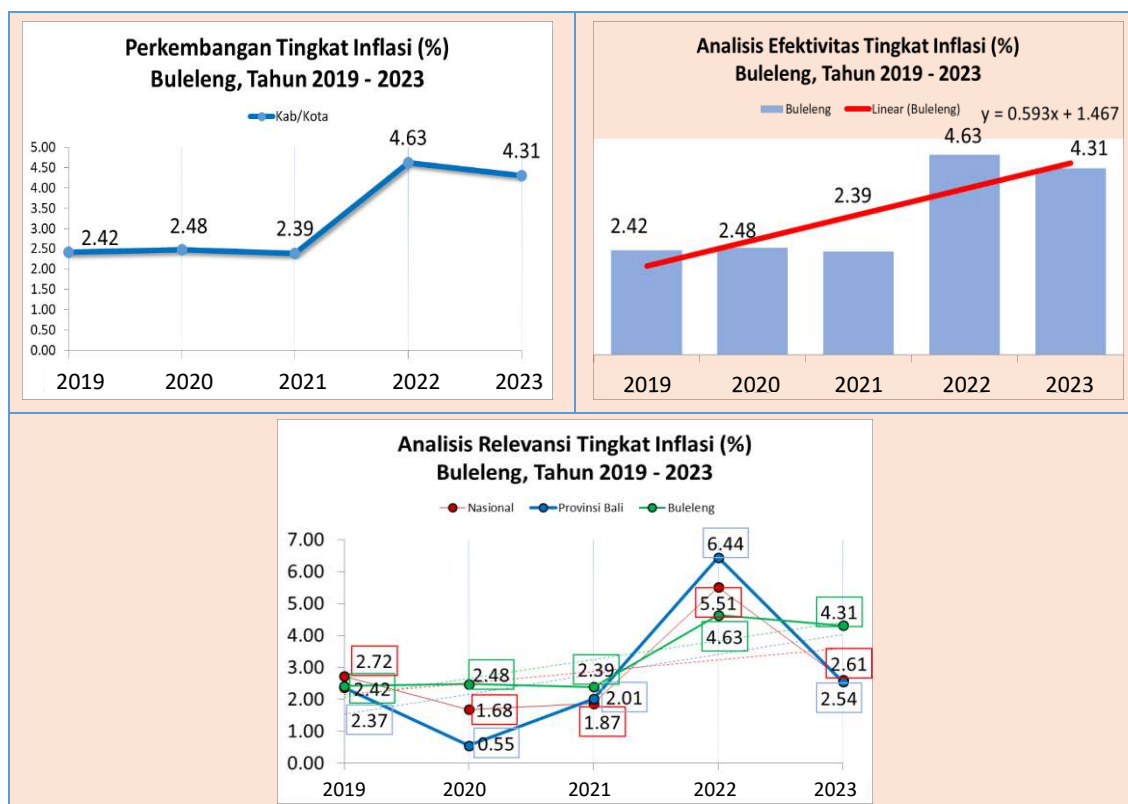
Perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar 1,89 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 2,42% menjadi 4,31% pada tahun 2023. Tingkat inflasi tahun 2023 berada pada kategori tidak terjaga dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 (4,63%), terjadi penurunan sebesar 0,32 poin persen. Tingkat penurunan angka inflasi tersebut



tidak menunjukkan angka yang signifikan atau masih dalam batas wajar ($\pm < 1\%$). Tren peningkatannya ditunjukkan dengan persamaan linier $y = 0,593x + 1,467$ atau dapat diproyeksikan meningkat sebesar 0,593 poin persen tiap tahunnya. Tren perkembangannya menunjukkan adanya relevansi dengan capaian tingkat inflasi Provinsi Bali dan nasional, yakni sama-sama menunjukkan tren peningkatan.

Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan harga bahan pokok makanan. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menekan penduduk yang berada di atas garis kemiskinan akan jatuh ke bawah garis kemiskinan sehingga berdampak kepada bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Grafik 3.27
Perkembangan, Efektivitas, dan Relevansi Tingkat Inflasi (%)
Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Capaian indikator inflasi tersebut menunjukkan kondisi belum dalam keadaan aman. Dengan demikian, indikator inflasi tetap harus dijadikan prioritas intervensi untuk menjaga stabilitas ekonomi. Khususnya untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.



Tabel 3.11
Karakteristik Masalah Kemiskinan Bidang Ekonomi Berdasarkan 4 (Empat)
Perspektif/Aspek Analisis, di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

KABUPATEN BULELENG		PERSPEKTIF/ASPEK ANALISIS				HASIL IDENTIFIKASI
		Perkembangan Antar Waktu	Posisi Relatif	Efektivitas	Relevansi	
INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN BIDANG EKONOMI	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 meningkat sebesar 0,53 poin % dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (3,64%) pada posisi ke-4 terendah dari capaian 9 Kabupaten/Kota se-Bali. Posisi di bawah capaian Prov. Bali (5,71%) dan nasional (5,05%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,517 poin % tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang membaik	Posisi Relatif masih bermasalah, Perkembangan Antar Waktu, Efektivitas, dan Relevansi tidak bermasalah namun tetap menjadi prioritas
	Inflasi (%)	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) berfluktuatif dengan tren meningkat . Tahun 2023 menurun sebesar 0,32 poin % ($\pm < 1\%$) dibandingkan tahun sebelumnya.	Capaian indikator di Kab. Buleleng (4,31%) tidak terjaga dalam kisaran sasaran $3,0 \pm 1\%$. Posisi di atas capaian Prov. Bali (2,54%), dan nasional (2,54%)	Efektif , capaian di Kab. Buleleng (2019-2023) dengan laju peningkatan sebesar 0,593 poin % ($\pm < 1\%$) tiap tahunnya	Pola perubahan capaian tahunan (2019-2023) di Kab. Buleleng relevan dengan Prov. Bali dan nasional ke arah yang meningkat	Perkembangan Antar Waktu, Posisi Relatif, Efektivitas dan Relevansi relatif masih bermasalah

6. Karakteristik Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan. Kemiskinan menyebabkan seseorang mempunyai keterbatasan akses ekonomi terhadap pangan. Kurangnya akses ekonomi terhadap pangan merupakan salah satu indikator tidak tercapainya ketahanan pangan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dijelaskan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Laju pertumbuhan pangan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2019–2023



menunjukkan perkembangan dengan tren yang konsisten menurun. Penurunannya sebesar 6,21 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 5,66% menjadi -0,55% pada tahun 2023. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 (-1,22%), terjadi penurunan namun dengan tingkat yang mengecil.

Tabel 3.12
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	5,66	-1,59	-0,92	-1,22	-0,55
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	-5,24	-6,29	-2,63	1,96	0,46
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,77	-6,52	1,52	4,02	3,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	7,24	-7,49	-2,18	7,22	9,96
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Manaagement & Remediation Activities</i>	2,71	-1,11	-11,96	-0,85	6,87
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,37	-3,61	0,08	3,23	1,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	7,37	-6,73	-0,65	4,45	5,76
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	5,97	-12,93	-5,48	3,90	9,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	4,95	-23,06	-10,58	12,76	13,10
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	5,57	6,10	2,75	-0,29	1,53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	7,43	-5,09	-4,74	8,91	14,31
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,10	0,56	1,19	1,19	0,96
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	5,48	-4,97	-3,26	6,78	7,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence; Compulsory Social Security</i>	3,34	0,07	1,98	0,03	-2,59
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	3,03	-0,91	1,74	0,03	-1,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,23	2,04	5,82	1,31	2,12
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	5,48	-6,21	-0,63	9,19	8,27
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		5,51	-5,80	-1,27	3,11	3,64

Catatan : * Data bersifat semetara, ** Data bersifat sangat sementara
Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024

Jika dilihat dari komposisi distribusi pangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2019-2023 (PDRB ADHB) menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2019



komposisi distribusinya sebesar 21,07% menjadi sebesar 20,90% tahun 2023. Dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21,54%, terjadi penurunan sebesar 0,64 poin persen. Dilihat dari komposisi distribusi per kelompok lapangan usaha, lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada posisi tertinggi. Uraianya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/ Industry		2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry & Fishing</i>	21,07	22,23	22,54	21,54	20,90
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining & Quarrying</i>	0,91	0,92	0,90	0,88	0,86
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,85	5,90	6,09	6,15	6,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity & Gas</i>	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Manaagement & Remediation Activities</i>	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	8,97	9,33	9,59	9,64	9,23
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles</i>	11,87	11,86	11,88	12,10	12,31
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation & Storage</i>	1,19	1,11	1,06	1,09	1,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation & food Service Activities</i>	18,69	14,82	13,18	14,55	16,15
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information & Communication</i>	5,42	6,13	6,35	5,98	5,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial & Insurance Activities</i>	4,20	4,13	4,16	4,63	5,04
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,34	4,73	4,84	4,74	4,60
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Bussiness Activities</i>	0,67	0,69	0,68	0,71	0,73
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration & Defence: Compulsory Social Security</i>	5,13	5,63	5,87	5,58	5,22
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	7,39	7,97	8,13	7,66	7,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,17	2,41	2,57	2,48	2,42
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	1,82	1,86	1,87	1,99	2,06
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Catatan : * Data bersifat semetara, ** Data bersifat sangat sementara
Sumber Data : Kabupaten Buleleng Dalam Angka, 2024



Kebutuhan pokok masyarakat atas pangan khususnya beras, selain memastikan ketersediaanya perlu mengendalikan akses, distribusi dan kualitasnya. Perkembangan harga rata-rata eceran beras di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 menunjukkan angka yang berfluktuatif, dengan tren meningkat. Peningkatannya sebesar Rp1.724,00 per Kg dilihat dari perbandingan harga tahun 2019 sebesar Rp11.230,00 menjadi Rp12.954,00 per Kg pada tahun 2023. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2022 sebesar Rp11.287,00 terjadi peningkatan rata-rata sebesar Rp.1.667,00 per Kg atau terjadi peningkatan sebesar 14,77%. Untuk lebih jelasnya, rata-rata harga eceran beras di Kabupaten Buleleng (Kota Singaraja) tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14
Rata-Rata Harga Eceran Beras Kota Singaraja
Tahun 2019-2023

Bulan	Harga Eceran Beras (Rp/Kg)				
	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023
Januari	11.270	11.267	11.283	11.147	12.047
Februari	11.270	11.283	11.283	11.147	12.672
Maret	11.294	11.299	11.283	11.147	12.802
April	11.238	11.303	11.283	11.147	12.606
Mei	11.158	11.303	11.283	11.147	12.577
Juni	11.167	11.336	11.181	11.126	12.558
Juli	11.212	11.283	11.147	11.126	12.551
Agustus	11.213	11.283	11.147	11.126	12.733
September	11.209	11.283	11.036	11.235	13.688
Oktober	11.216	11.283	11.057	11.708	14.072
November	11.256	11.283	11.109	11.693	14.191
Desember	11.261	11.283	11.147	11.696	N/A
Rata-Rata	11.230	11.291	11.187	11.287	12.954

Sumber Data: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2020-2024

Jika ditinjau dari perkembangan rata-rata harga eceran beras per kuartal, pada bulan Januari-Maret (Triwulan I) Rp12.507,00 per kg, bulan April-Juni (Triwulan II) Rp12.580,00 per kg, bulan Juli-September (Triwulan III) Rp12,991,00



per kg, dan bulan Oktober-Desember (Triwulan IV) Rp14.132,00 per kg. Dilihat dari kondisi rata-rata Triwulan III dengan Triwulan IV terjadi peningkatan sebesar Rp1.141,00 atau sebesar 8,78%.

Melihat perkembangan harga eceran beras tersebut diatas, baik secara YoY (14,77%) dan QoQ (8,78%) menunjukkan kondisi yang tidak terkendali, dibandingkan dengan target inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,5-3,5%.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa perkembangan harga eceran beras berkorelasi memengaruhi laju pertumbuhan dan distribusi lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk itu perlu langkah-langkah strategis dan intervensi program dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan, akses, distribusi, dan kualitas pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang layak.

3.2.4. Kondisi Kemiskinan Mikro

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2025 mengamanatkan untuk menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN digunakan dalam menentukan sasaran program, termasuk program sekolah rakyat, yang berkaitan dengan strategi kebijakan nasional pengentasan kemiskinan. Strategi kebijakan dimaksud, antaranya adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sebagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025, DTSEN digunakan sebagai acuan untuk program Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan/atau Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial yang menyelenggarakan pemerintahan pada urusan sosial telah memiliki DTSEN secara agregat. DTSEN diperoleh melalui portal resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia yakni Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dari aplikasi SIKS-NG, hasil unduhan DTSEN mencakup jumlah keluarga dan anggota keluarga per Kecamatan dan per Desa/Kelurahan yang sudah dipilah berdasarkan tingkat kesejahteraannya per desil.



Tabel 3.15
Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Berdasarkan Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN) Per Kecamatan di Kabupaten Buleleng,
per 16 Juli 2025

No	Kecamatan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
1	Gerokgak	31.796	102.159
2	Seririt	30.255	92.489
3	Busungbiu	16.330	52.408
4	Banjar	28.190	85.836
5	Sukasada	28.644	95.224
6	Buleleng	47.578	150.304
7	Sawan	26.067	83.061
8	Kubutambahan	22.562	72.683
9	Tejakula	23.634	75.433
	Kabupaten Buleleng	255.056	809.597

Sumber Data : DTSEN, 2025

Tabel 3.16
Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Berdasarkan Data Tunggal Sosial
Ekonomi Nasional (DTSEN) Per Desil di Kabupaten Buleleng,
per 16 Juli 2025

No	Uraian	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
1	Desil 1	11.877	42.627
2	Desil 2	21.070	72.835
3	Desil 3	24.876	82.980
4	Desil 4	25.492	78.170
5	Desil 5	24.906	80.428
6	Desil 6-10	124.637	398.642
7	Belum Pemingkatan	22.149	53.676
8	Non Aktif	49	239
	Total	255.056	809.597

Sumber Data : DTSEN, 2025



Dalam menentukan prioritas sasaran program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem difokuskan pada keluarga dan anggota keluarga yang tingkat kesejahteraannya berada pada desil 1 sampai dengan desil 5. Total sasaran pada desil 1-5 sebanyak 108.221 jiwa (keluarga) dengan 357.040 jiwa (anggota keluarga). Dari 148 desa/kelurahan di Kabupaten Buleleng, keluarga sasaran program pengentasan kemiskinan tertinggi ada di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt yakni sebanyak 2.248 jiwa dan terendah ada di Kelurahan Beratan Kecamatan Buleleng sebanyak 76 jiwa. Berdasarkan sasaran anggota keluarga, sasaran tertinggi ada di Desa Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan yakni sebanyak 7.840 jiwa dan terendah ada di Kelurahan Beratan Kecamatan Buleleng sebanyak 216 jiwa. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17
Jumlah Keluarga dan Anggota Keluarga Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng Per Desa/Kelurahan Tahun 2025-2029

No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)	No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
1	Pegadungan	523	1600	75	Tukadsumaga	631	2164
2	Padangbulia	534	1723	76	Bengkala	137	449
3	Sambangan	447	1427	77	Bila	103	359
4	Panji	1480	4834	78	Bontihing	254	1042
5	Panji Anom	943	3081	79	Bukti	162	632
6	Tegallinggah	1443	4921	80	Bulian	284	1139
7	Selat	1006	3826	81	Depeha	385	1573
8	Kayuputih	1053	3793	82	Kubutambahan	359	1603
9	Banyuasri	285	877	83	Mengening	107	394
10	Banjar Tegal	198	565	84	Pakistan	329	1188
11	Kendran	165	464	85	Tajun	131	521
12	Paket Agung	141	409	86	Tambakan	141	560
13	Kampung Singaraja	148	487	87	Tamblang	103	462
14	Liligundi	114	344	88	Tunjung	206	670


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)	No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
15	Beratan	76	216	89	Bebetin	191	816
16	Banyuning	1194	3906	90	Bungkulan	94	423
17	Penarukan	935	3147	91	Galungan	134	519
18	Kampung Kajanan	516	1684	92	Giri Emas	52	171
19	Astina	174	528	93	Jagaraga	149	553
20	Banjar Jawa	400	1357	94	Kerobokan	28	99
21	Kaliuntu	259	820	95	Lemukih	263	988
22	Kampung Anyar	950	3273	96	Menyali	167	609
23	Kampung Bugis	340	1044	97	Sangsit	148	577
24	Banjar Bali	252	956	98	Sawan	92	286
25	Kampung Baru	639	2168	99	Sekumpul	124	441
26	Kalibukbuk	379	1310	100	Sinabun	163	571
27	Anturan	513	1716	101	Sudaji	391	1555
28	Tukadmungga	309	975	102	Suwug	83	309
29	Pemaron	225	695	103	Banjarasem	159	660
30	Baktiseraga	285	876	104	Bestala	42	105
31	Sarimekar	532	1617	105	Bubunan	115	469
32	Nagasepaha	264	763	106	Gunungsari	112	437
33	Petandakan	382	1227	107	Joanyar	293	946
34	Alasangker	1134	3729	108	Kalianget	186	677
35	Poh Bergong	624	1993	109	Kalisada	139	476
36	Jinengdalem	633	2017	110	Lokapaksa	784	3127
37	Penglatan	429	1367	111	Mayong	198	726
38	Lemukih	873	2905	112	Munduk Bestala	40	99
39	Galungan	361	1199	113	Pangkungparuk	645	2345
40	Sekumpul	301	973	114	Patemon	191	810
41	Bebetin	1015	3314	115	Pengastulan	123	471
42	Sudaji	1559	5559	116	Rangdu	76	207


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)	No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
43	Sawan	327	1015	117	Ringdikit	291	1046
44	Menyali	704	2427	118	Seririt	49	226
45	Suwug	878	2835	119	Sulanyah	58	148
46	Jagaraga	565	1745	120	Tanguwisia	71	249
47	Sinabun	912	2886	121	Ularan	234	771
48	Kerobokan	159	501	122	Umeanyar	49	117
49	Sangsit	1189	3798	123	Unggahan	157	511
50	Bungkulan	1209	4140	124	Ambengan	126	441
51	Giri Emas	295	947	125	Gitgit	114	462
52	Tambakan	599	2004	126	Kayuputih	301	1176
53	Pakistan	1010	3254	127	Padangbulia	132	518
54	Bontihing	1112	3668	128	Pancasari	33	181
55	Tajun	873	3026	129	Panji	326	1229
56	Tunjung	897	3025	130	Panji Anom	182	723
57	Depeha	1295	4480	131	Pegadungan	147	455
58	Tamblang	803	2816	132	Pegayaman	548	2477
59	Bulian	812	2736	133	Sambangan	102	326
60	Bila	403	1266	134	Selat	303	1222
61	Bengkala	457	1416	135	Silangjana	221	740
62	Kubutambahan	2190	7840	136	Sukasada	130	537
63	Bukti	784	2718	137	Tegallinggah	458	1809
64	Mengening	321	1087	138	Wanagiri	149	608
65	Sembiran	1018	3684	139	Bondalem	387	1583
66	Pacung	602	2236	140	Julah	111	374
67	Julah	839	2823	141	Les	392	1393
68	Madenan	677	2290	142	Madenan	171	667
69	Bondalem	1776	6112	143	Pacung	130	551
70	Tejakula	1420	4648	144	Penuktukan	316	1105


BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)	No	Desa/ Kelurahan	Keluarga (jiwa)	Anggota Keluarga (jiwa)
71	Les	1487	4915	145	Sambirenteng	92	313
72	Penuktukan	961	3179	146	Sembiran	288	1124
73	Sambirenteng	725	2259	147	Tejakula	267	992
74	Tembok	1200	3791	148	Tembok	358	1182

Sumber Data : DTSEN, 2025



BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1. Pengembangan Logika Program (TOC)

Theory of Change (ToC) adalah metodologi untuk menentukan *outcome* yang ingin dicapai sekaligus memproyeksikan langkah untuk mencapainya melalui intervensi program kebijakan. *Theory of Change* mendefinisikan tujuan jangka panjang atau menengah dan kemudian memetakan ke belakang untuk mengidentifikasi prasyarat yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

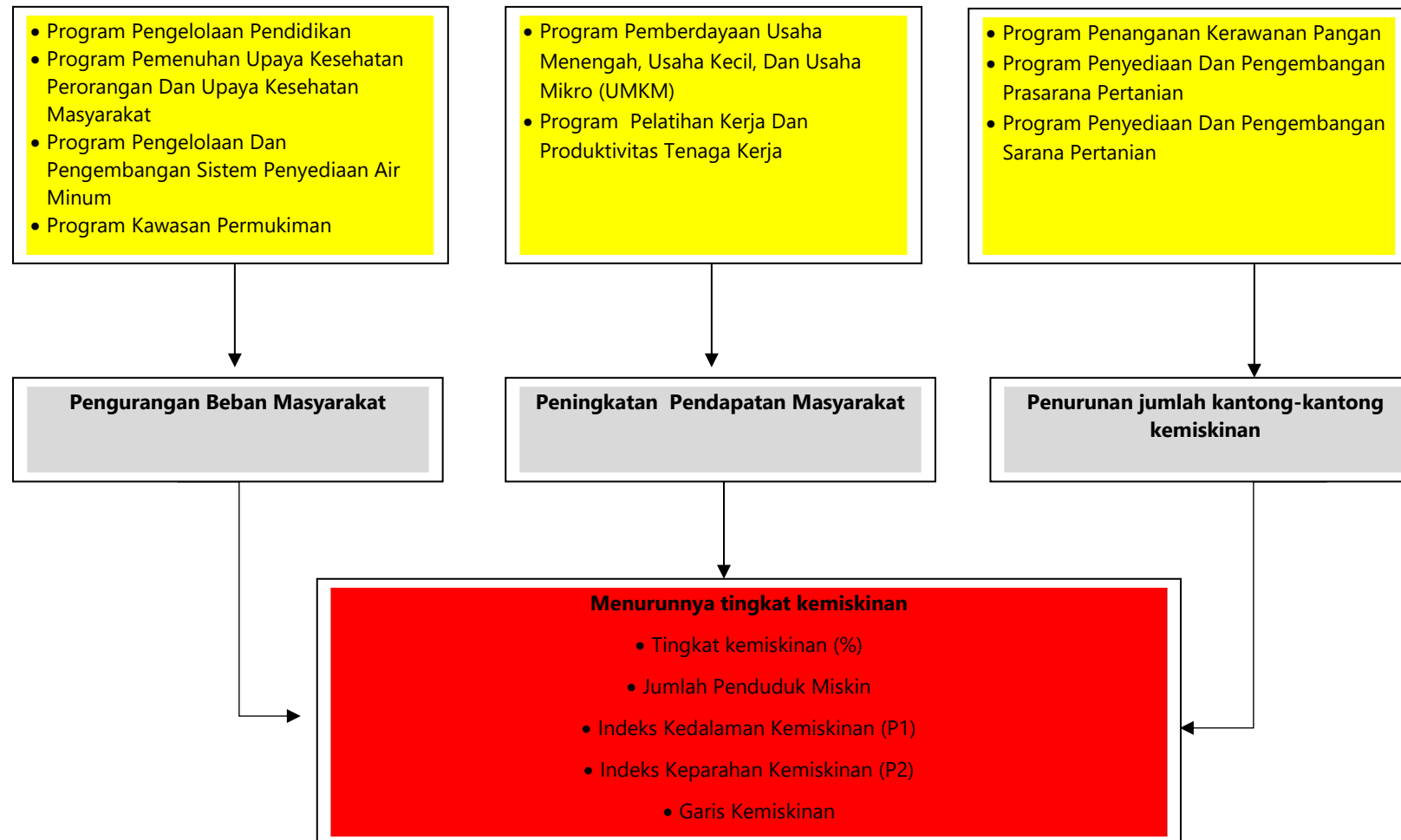
Metodologi ini digunakan sebagai persyaratan wajib dalam merancang sebuah proyek kebijakan yang efektif dalam proses perencanaan yang dilakukan. Dengan menggunakan prinsip *Theory of Change*, maka logika program akan menjelaskan mengapa sebuah program atau kebijakan diambil, dan nantinya akan bermanfaat sebagai basis untuk pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan teori perubahan dapat diawali dengan mengumpulkan dan mengkaji ulang seluruh hasil kajian dan evaluasi yang pernah dilakukan. Kemudian dari bahan tersebut dapat diperkirakan apa yang terjadi jika intervensi dilakukan. Diharapkan setelah mengerjakan metodologi ini, maka praktisi dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang strategi dan taktik yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Berikut pengembangan beberapa Logika Program (*Theory of Change*) berdasarkan permasalahan penyebab kemiskinan di Kabupaten Buleleng yang telah dibahas pada Bab III sebelumnya.



BAB IV PRIORITAS PROGRAM

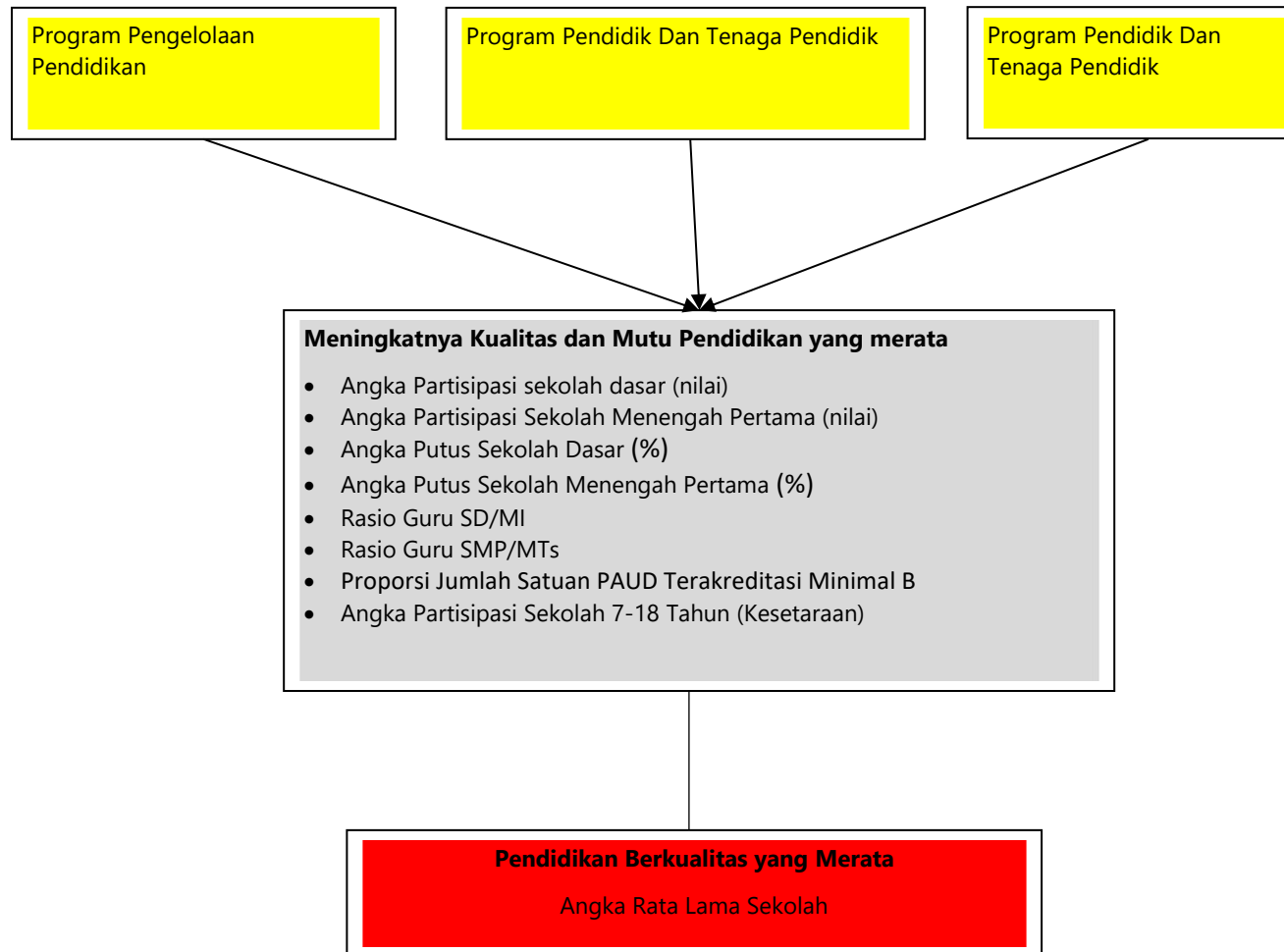
Gambar 4.1 Logika Program (TOC) Kemiskinan Konsumsi





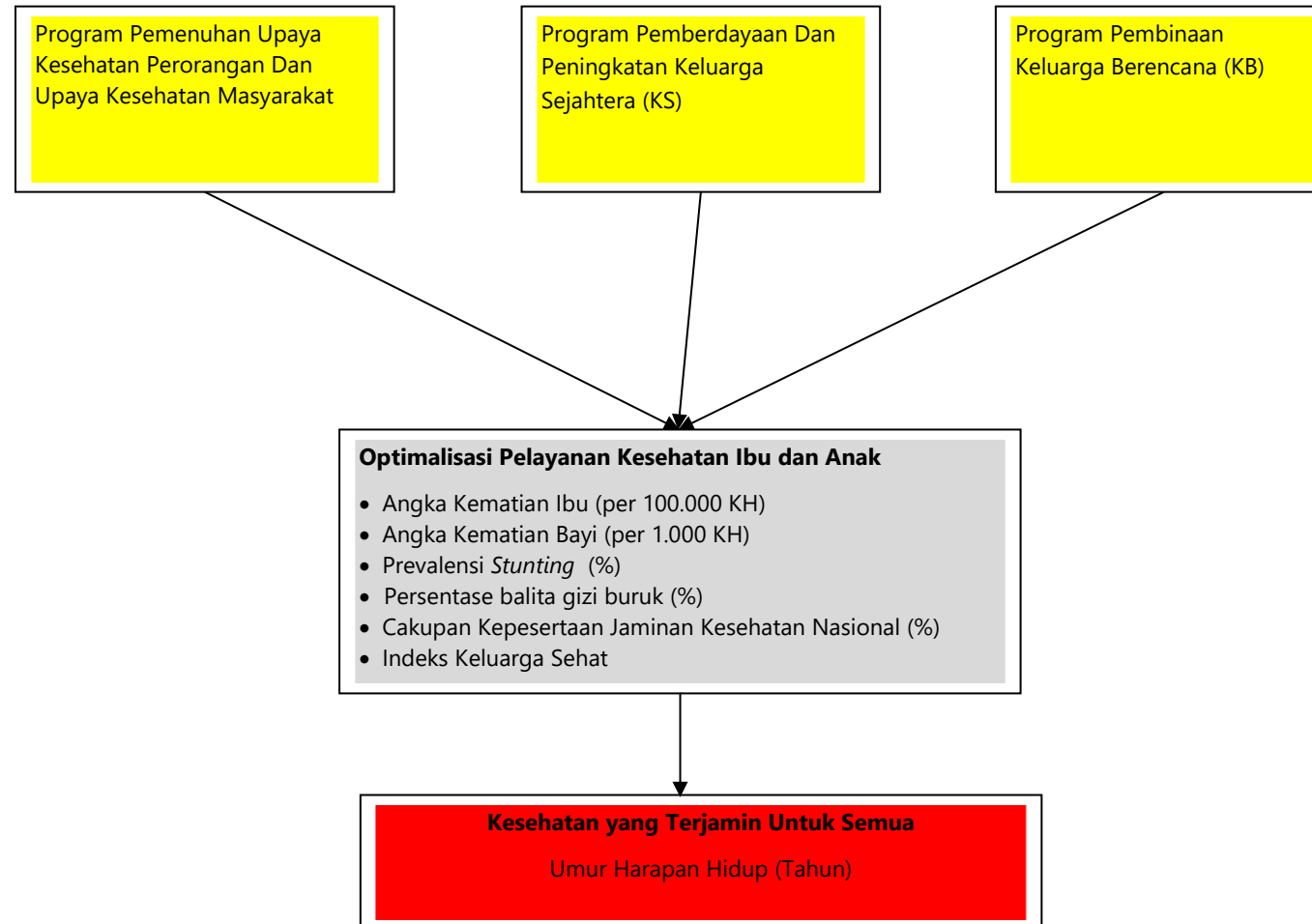
BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Gambar 4.2 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Pendidikan





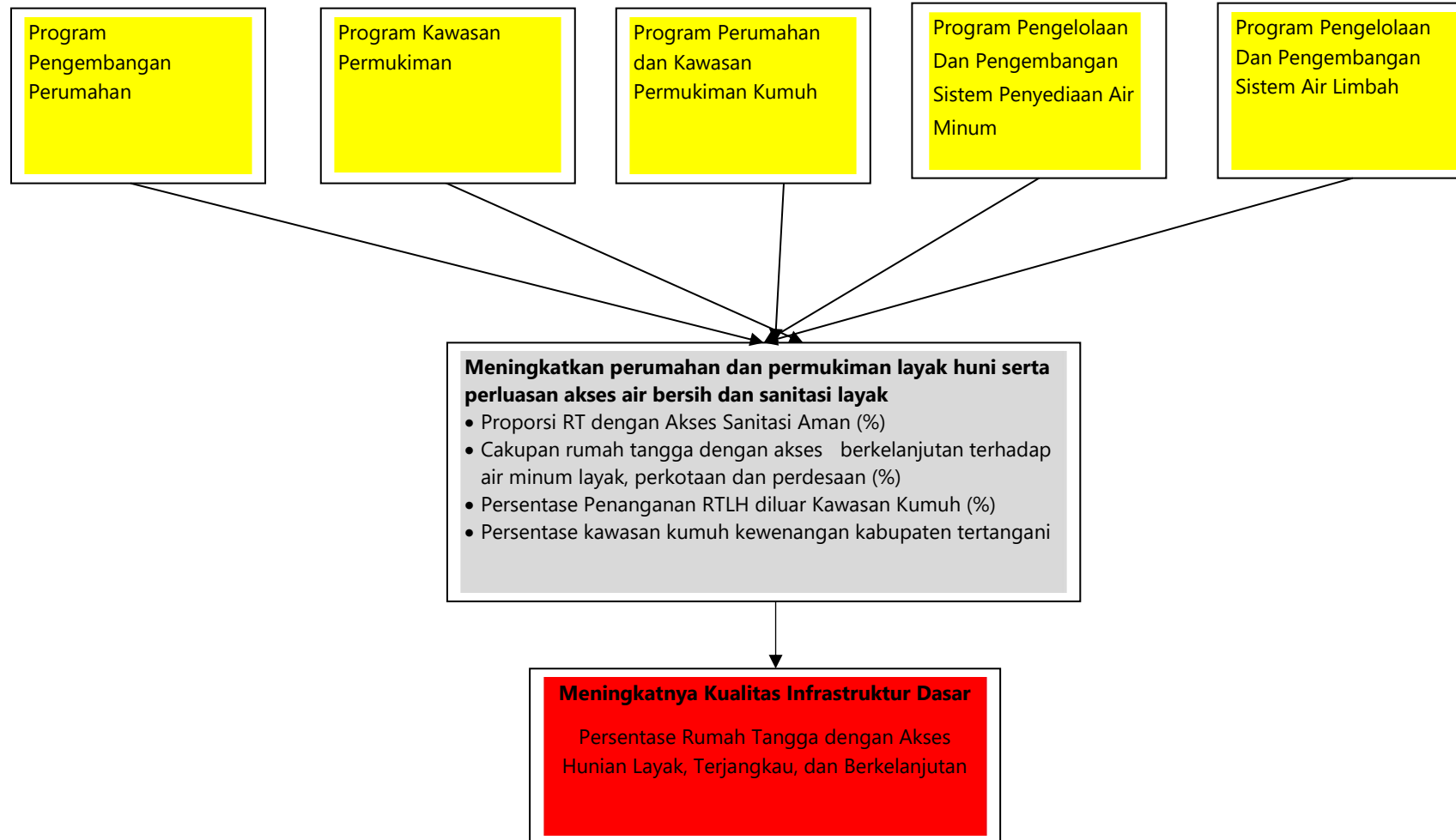
Gambar 4.3 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Kesehatan





BAB IV PRIORITAS PROGRAM

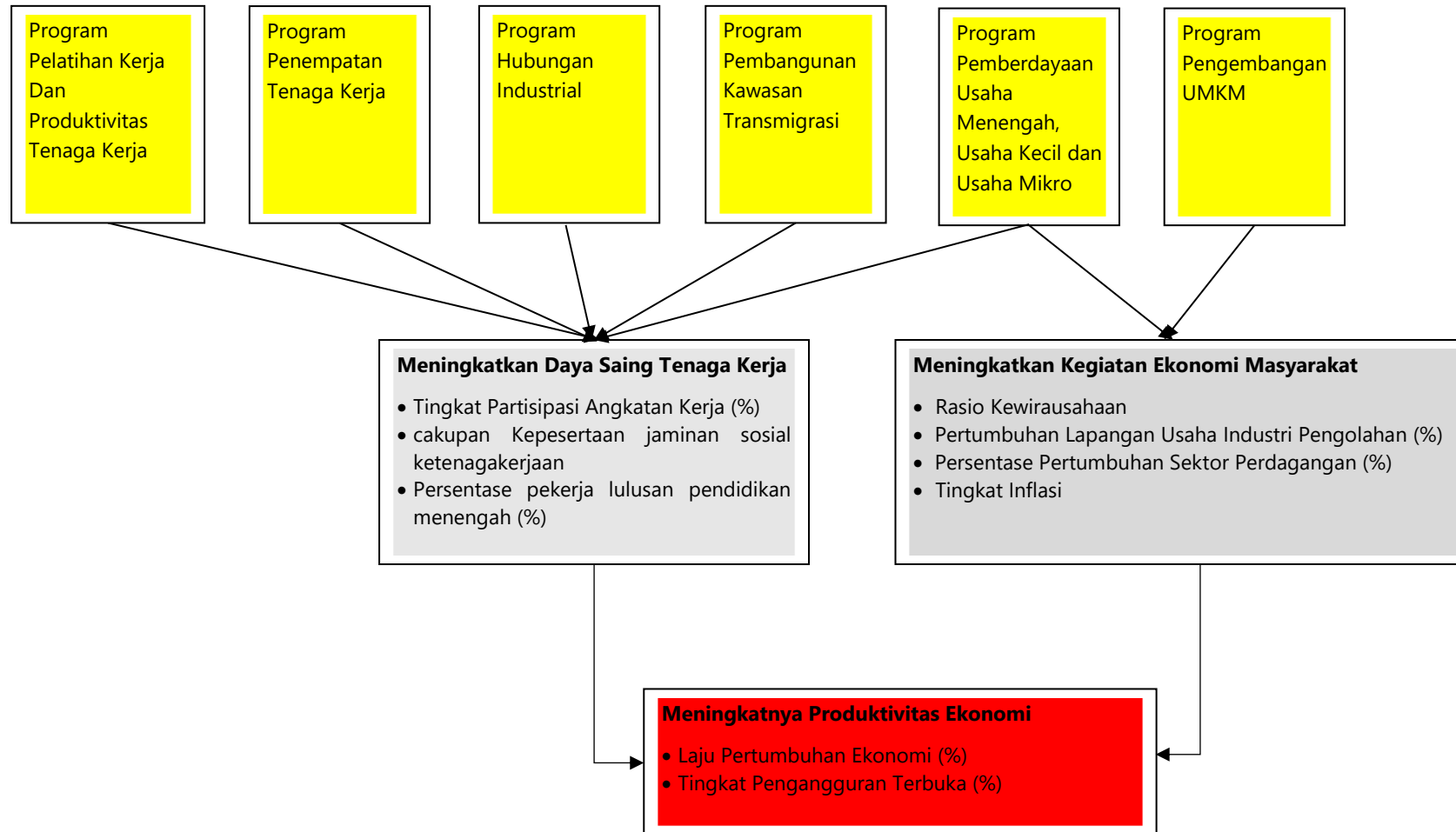
Gambar 4.4 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar





BAB IV PRIORITAS PROGRAM

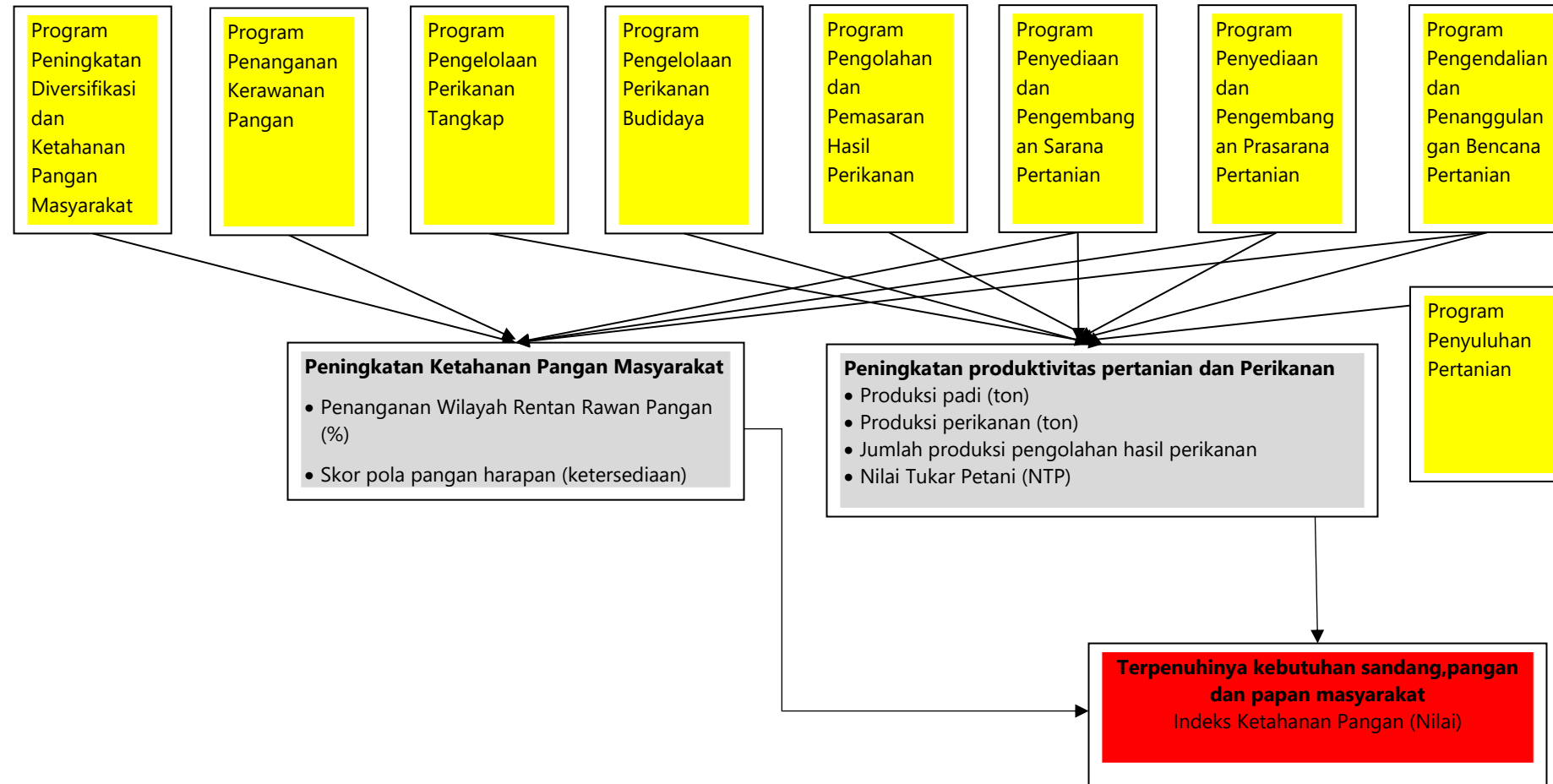
Gambar 4.5 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan





BAB IV PRIORITAS PROGRAM

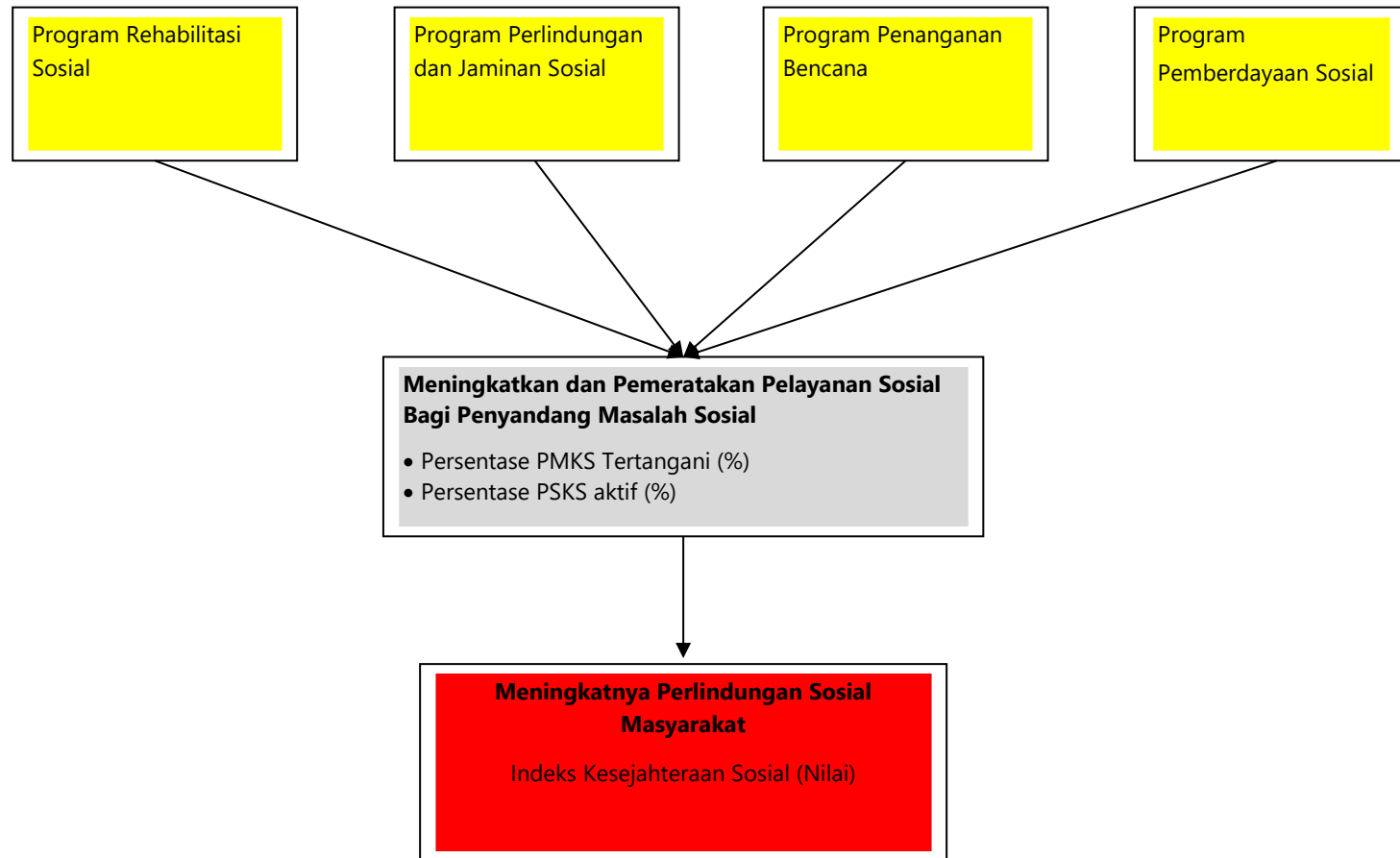
Gambar 4.6 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan





BAB IV PRIORITAS PROGRAM

Gambar 4.7 Logika Program (TOC) Kemiskinan Bidang Sosial





4.1. Strategi, Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Penanggulangan

Kemiskinan

a. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan suatu tujuan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran dilakukan melalui strategi yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, dan
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pembangunan dalam jangka waktu 5 (lima) mendatang Tujuan ini juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi pembangunan Kabupaten Buleleng khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dalam lima tahun mendatang. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng yang diperoleh dari pencapaian outcome program penanggulangan kemiskinan.

Adapun strategi kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator sasaran penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029 sebagai berikut :



Tabel 4. 1
Strategi Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng
Tahun 2025-2029

NO	STRATEGI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
		Tujuan Utama : Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan (%)			5.3	5.09	4.87	4.66	4.44
1	Pengurangan Beban Masyarakat	Pendidikan Berkualitas Dan Merata	Angka Rata-Rata Lama Sekolah			7.76	7.83	7.9	7.97	8.04
				Meningkatnya Kualitas Dan Mutu Pendidikan Yang Merata	Angka Partisipasi Sekolah Dasar (Nilai)	100	100	100	100	100
					Angka Partisipasi Sekolah Menengah Pertama (Nilai)	100	100	100	100	100
					Angka Putus Sekolah Sekolah Dasar (Nilai)	0	0	0	0	0
					Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (Nilai)	0	0	0	0	0
					Rasio Guru Sd/Mi	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
					Rasio Guru Smp/Mts	1:20	1:20	1:20	1:20	1:20
		Proporsi Jumlah Satuan Paud Terakreditasi Minimal B	90.76	92.61	94.46	96.3	98.15			



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

NO	STRATEGI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
					Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun (Kesetaraan)	6.64	12.48	18.31	24.15	29.98
		Kesehatan Yang Terjamin Untuk Semua	Umur Harapam Hidup (Nilai)			75.03	75.29	75.55	75.81	76.07
				Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kh)	94.8	93.81	92.82	91.83	90.84
					Angka Kematian Bayi (Per 1.000 KH)	12	11.5	11	10.5	10
					Persentase Prevalensi Stunting (%)	14.3	13.8	13.3	12.8	12.3
					Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0.2	0.19	0.18	0.17	0.16
					Indeks Keluarga Sehat	0.55	0.57	0.58	0.6	0.61
					Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98.7	98.74	98.78	98.82	98.86
		Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat	Indeks Kesejahteraan Sosial (Nilai)			58.38	58.4	58.45	58.5	58.55
				Meningkatkan Dan Pemerataan Pelayanan Sosial Bagi Penyandang Masalah Sosial	Persentase Psks Yang Aktif (%)	95.84	95.85	95.86	95.87	95.88
					Persentase Pmks Tertangani (%)	43.23	44.23	45.23	46.23	47.23



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

NO	STRATEGI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET						
						2025	2026	2027	2028	2029		
					Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial (%)	100	100	100	100	100		
2	Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			5.04	5.12	5.4	5.6	5.8		
			Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.	Rasio Kewirausahaan	0.24	0.36	0.48	0.6	0.72			
				Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	4.8	4.82	4.85	4.87	4.89			
				Persentase Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	9.15	9.2	9.25	9.28	9.32			
				Tingkat Inflasi	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1	2,5±1			
			Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka(%)									
			Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	80	80.2	80.4	80.6	80.8			
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	70.54	71.00	71.50	72.00	72.50			
				Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah (%)	27	27.2	27.4	27.6	27.8			



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

NO	STRATEGI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
3	Penurunan Jumlah Kantong-Kantong Kemiskinan	Terpenuhinya Kebutuhan Sandang, Pangan Dan Papan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan (Nilai)			83.36	83.46	83.56	83.66	83.76
			Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Ketersediaan)		90.25	90.5	90.75	90.8	91
				Persentase Penanganan Wilayah Rentan Rawan Pangan (%)		62	65	70	75	85
			Peningkatan Produktivitas Pertanian Dan Perikanan	Produksi Padi (Ton)		109,988.31	110,098.30	110,208.40	110,318.61	110,428.92
				Produksi Perikanan (Ton)		23,310.72	23,470.63	23,582.71	23,681.96	23,818.93
				Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan		2,389.72	2,469.63	2,500.71	2,517.96	2,571.93
				Nilai Tukar Petani (Ntp)		95.41	95.45	95.48	95.52	95.57
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, Dan Berkelanjutan		98.09	98.2	98.29	98.38	98.46	
			Meningkatkan Perumahan Dan Permukiman Layak		4.81	5.21	5.61	6.01	6.41	
			Proporsi Rt Dengan Akses Sanitasi Aman (%)		4.81	5.21	5.61	6.01	6.41	



BAB IV

PRIORITAS PROGRAM

NO	STRATEGI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET				
						2025	2026	2027	2028	2029
				Huni Serta Perluasan Akses Air Bersih Dan Sanitasi Layak	Cakupan Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Perdesaan (%)	89	89.5	90	90.5	91
					Persentase Penanganan Rtlh Diluar Kawasan Kumuh (%)	10.61	21.23	31.84	42.45	53.07
					Persentase Kawasan Kumuh Kewenangan Kabupaten Tertangani	50	66.67	83.33	89.74	94.96



4.2. Analisis Keterkaitan (*Causal Relationship*)

Causal relationship adalah merupakan metode untuk menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan (*causes*) terjadinya suatu peristiwa atau perilaku tertentu. *Causal relationship* ini menjelaskan bahwa perubahan dapat terjadi akibat dilakukannya intervensi terhadap determinan-determinan tertentu baik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Sebagai contoh adalah masalah kemiskinan yang menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia. Atribut penyebab kemiskinan dilakukan untuk mengetahui dimensi lain yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan kemiskinan untuk secara bersama-sama diintervensi melalui kebijakan dan rencana-rencana strategis daerah.

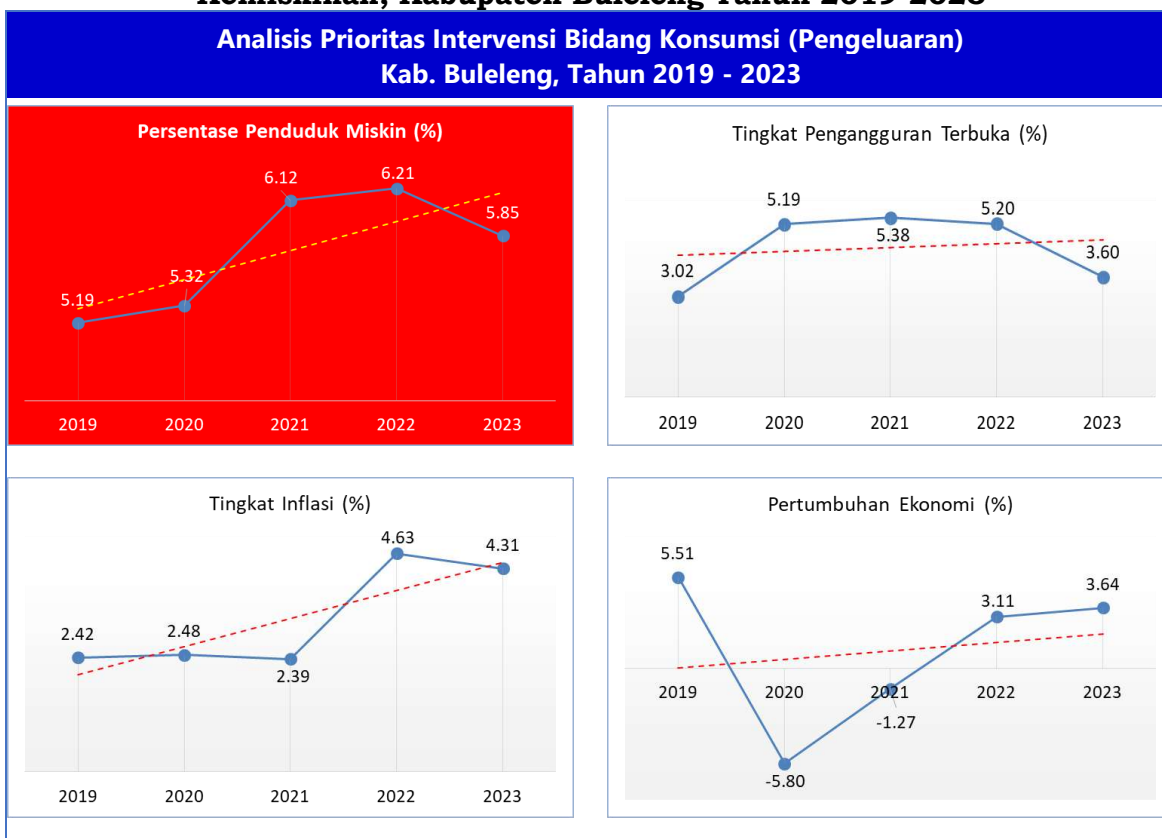
a. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Konsumsi

Pada bidang kemiskinan konsumsi terdapat beberapa indikator penting untuk menggambarkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Guna mengetahui keterkaitan antara berbagai indikator kemiskinan konsumsi, dilakukan analisis permasalahan atas pencapaian target-target makro yang belum optimal. Analisis keterkaitan bidang kemiskinan konsumsi dilakukan dengan melihat tren indikator utama tujuan (*final outcome*) dengan tren indikator pendukungnya. Indikator utama yang dianalisis adalah Persentase Penduduk Miskin dengan indikator pendukung Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi.

Penduduk miskin di Kabupaten Buleleng cenderung meningkat dalam kurun tahun 2019-2023. Begitu pula dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi kecenderungannya meningkat sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Grafik 4.1
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Konsumsi Indikator Utama Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



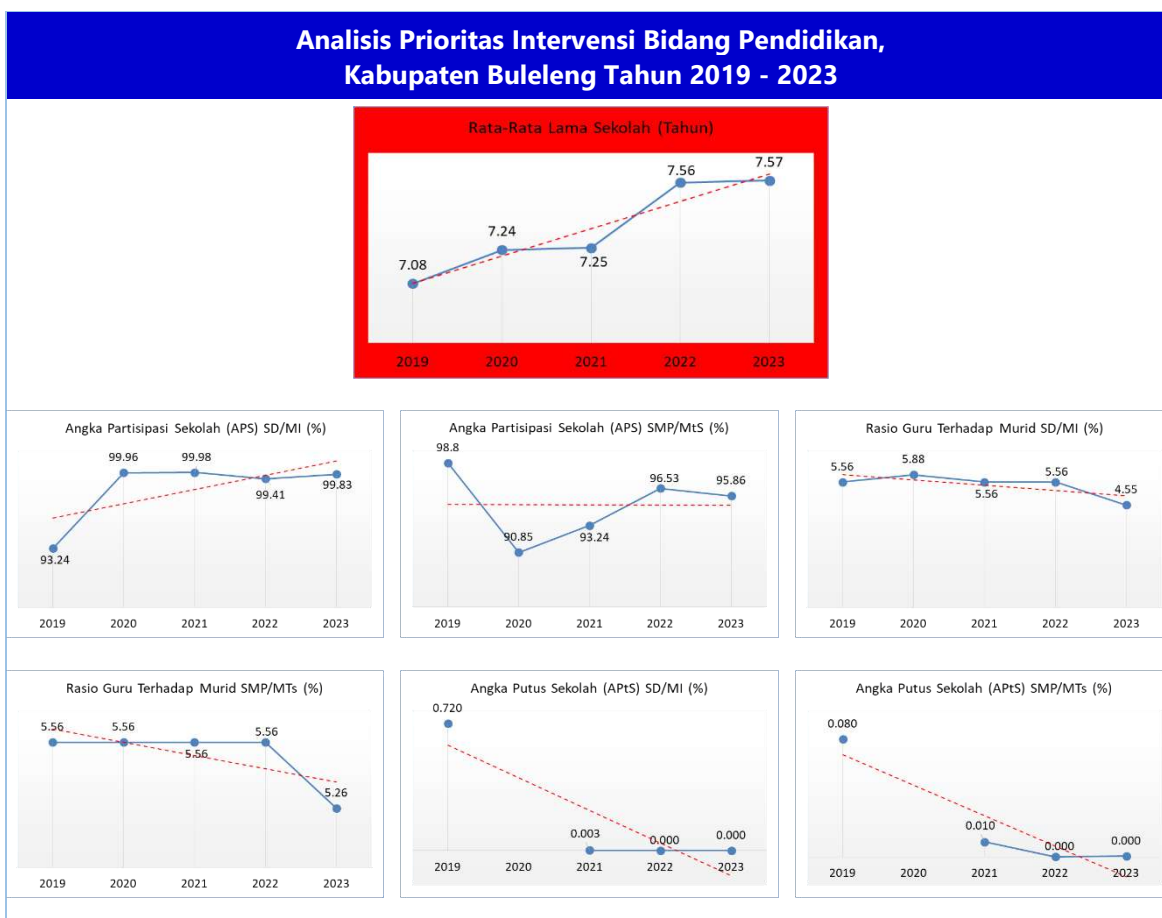
Pada grafik diatas menjelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat inflasi berkorelasi memengaruhi tingkat kemiskinan. Perkembangan TPT dan tingkat inflasi yang meningkat dibarengi dengan peningkatan tingkat kemiskinan. Sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan tren peningkatan terlihat tidak berkorelasi positif untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, determinan indikator TPT dan Inflasi menjadi prioritas intervensi yang harus dikendalikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi juga merupakan indikator penting yang harus diperhatikan. Dalam makro ekonomi, indikator TPT, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi adalah indikator yang saling terpengaruh dan memengaruhi.



b. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan terdapat beberapa indikator penting untuk menggambarkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Buleleng sesuai dengan kewenangan daerah. Guna mengetahui keterkaitan antara berbagai indikator pendidikan, dilakukan analisis permasalahan atas pencapaian target-target pendidikan yang belum optimal. Indikator utama yang dianalisis adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dengan indikator pendukung Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio Guru terhadap Murid dan Angka Putus Sekolah (APtS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

Grafik 4.2
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Pendidikan Indikator Utama Rata-Rata Lama Sekolah, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023





Dari grafik tersebut terlihat tren RLS sebagai indikator utama meningkat dalam kurun tahun 2019-2023 sejalan atau berkorelasi positif dengan indikator APS SD/MI, Rasio Guru terhadap Murid dan APtS pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan indikator APS SMP/MTs yang menunjukkan tren menurun tidak sejalan atau berkorelasi negatif mendukung indikator tujuan RLS.

Selain sebagai indikator pendukung tercapainya tujuan indikator RLS, indikator APS dapat dilihat sebagai indikator sasaran antara (*intermediate outcome*) yang dianalisis akar masalahnya. Dimana APS SD/MI dengan tren meningkat berkorelasi positif dengan penurunan Rasio Guru terhadap Murid dan APtS SD/MI. Sedangkan tren penurunan APS SMP/MTs berkorelasi negatif dengan penurunan Rasio Guru terhadap Murid dan APtS SMP/MTs. Mengindikasikan bahwa Rasio Guru terhadap Murid dan APtS bukan faktor yang secara langsung memengaruhi penurunan APS jenjang pendidikan SMP/MTs.

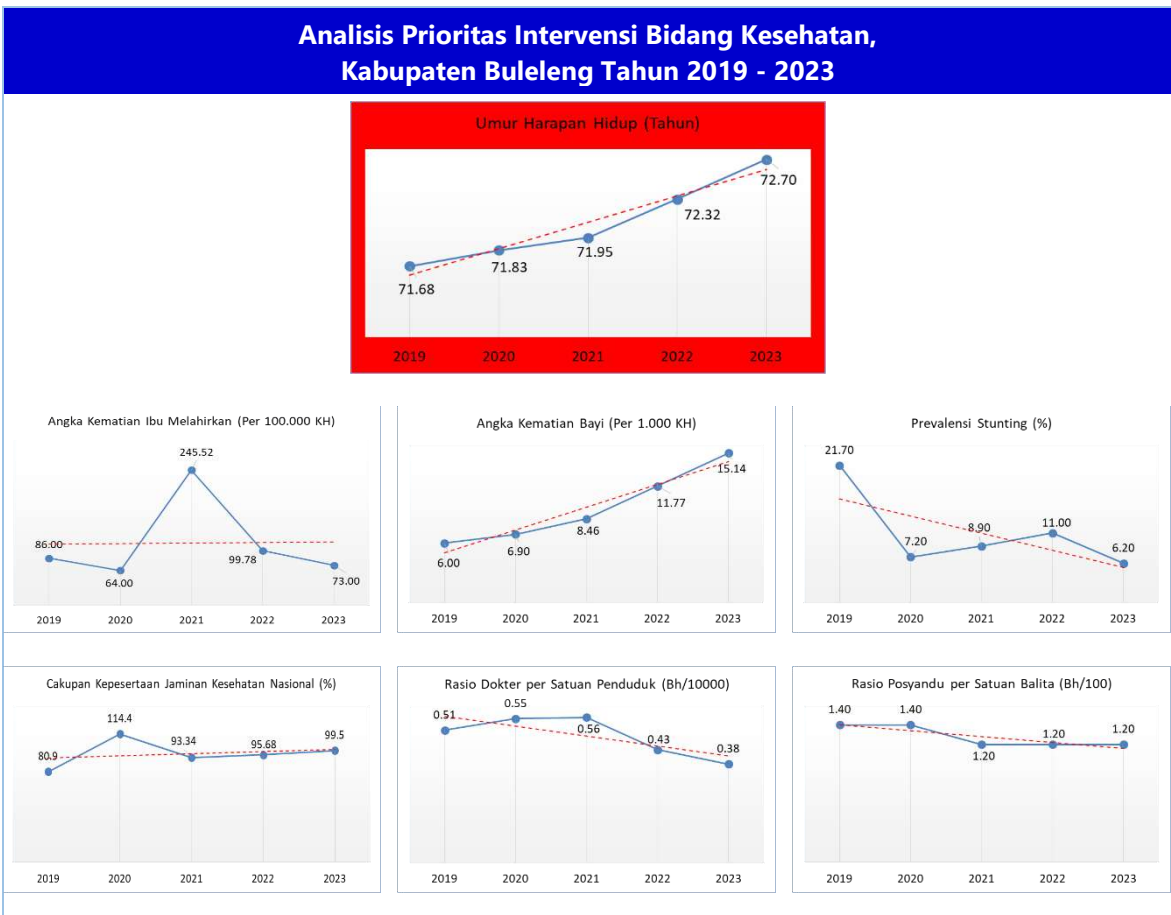
Hipotesa dari uraian tersebut bahwa APS SMP/MTs berkorelasi dan merupakan determinan yang berpengaruh signifikan terhadap capaian indikator RLS. Untuk itu, indikator APS SMP/MTs menjadi prioritas intervensi melalui program-program peningkatan partisipasi sekolah khususnya jenjang pendidikan SMP/MTs. Indikator pendukung lainnya masih merupakan indikator yang wajib ditangani. Seperti rasio guru terhadap murid yang semakin menurun atau menjauh dari ideal akan berdampak terhadap kualitas murid. Peningkatan APtS tentu akan berdampak langsung pada penurunan APS di masing-masing jenjang pendidikan yang akhirnya memengaruhi RLS.

c. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Kesehatan

Analisis pada bidang kesehatan berkaitan dengan kondisi kesehatan dan akses layanan kesehatan kepada masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat dilihat pada Umur Harapan Hidup (UHH) sebagai indikator utama, Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan, Angka Kematian Bayi (AKB), Prevalensi *Stunting*, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rasio Dokter per Satuan Penduduk, dan Rasio Posyandu per Satuan Balita sebagai indikator pendukung.



Grafik 4.3
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Kesehatan Indikator Utama Umur Harapan Hidup, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



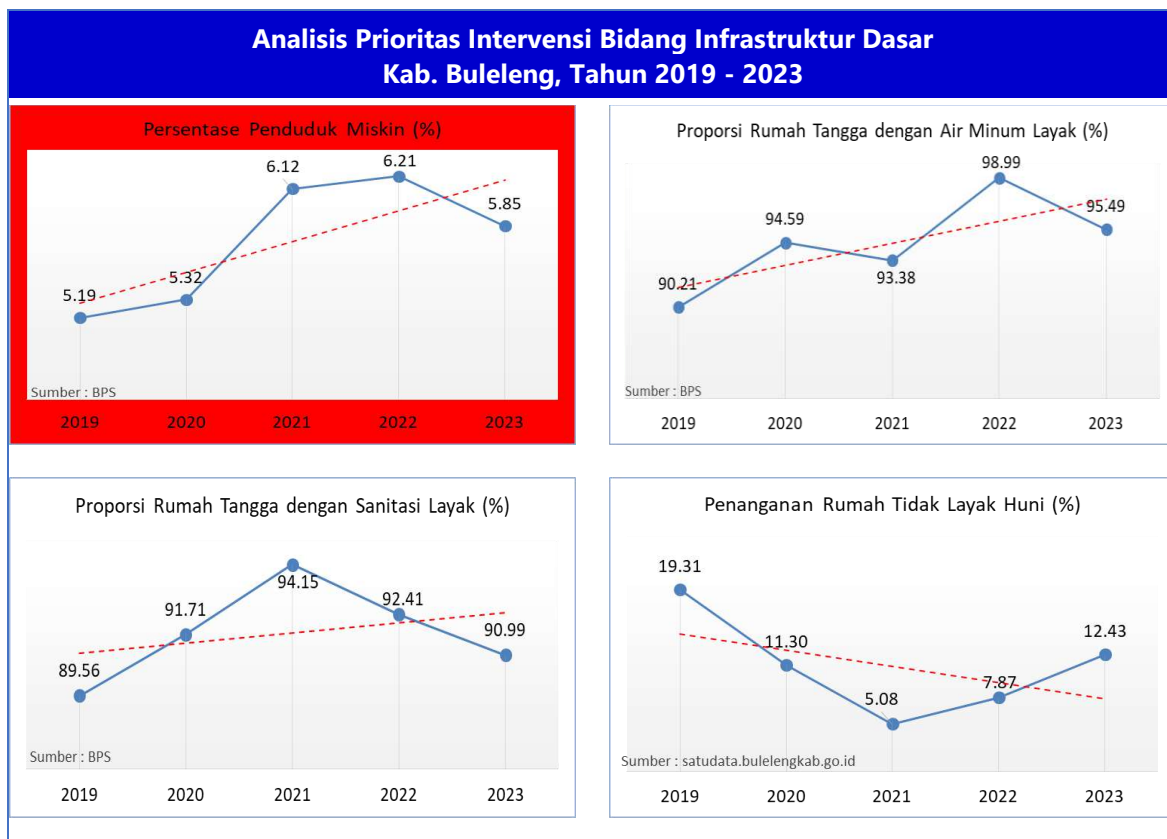
Grafik diatas menunjukkan indikator utama UHH selama kurun tahun 2019-2023 mengalami peningkatan namun capaiannya masih dibawah Provinsi Bali (72,98) di atas nasional (72,13) sebagaimana telah dijabarkan pada Bab III. Peningkatan UHH berkorelasi positif atau ada indikasi didukung oleh indikator *Prevalensi Stunting* yang menurun dan peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN. Sementara itu, tren capaian indikator AKI dan AKB yang meningkat dan indikator rasio dokter per satuan penduduk dan rasio posyandu per satuan balita yang menurun tidak menunjukkan adanya korelasi. Indikator-indikator pendukung tersebut, baik yang berkorelasi maupun yang tidak berkorelasi, menjadi indikator penting untuk ditangani karena dapat memengaruhi peningkatan UHH.



d. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar

Pada bidang infrastruktur dasar, analisis dilihat dari Persentase Penduduk Miskin sebagai indikator utama. Indiator pendukungnya dilihat dari Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak, Proporsi Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Grafik 4.4
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Infrastruktur Dasar Indikator Utama Persentase Penduduk Miskin, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Dari Grafik di atas menunjukkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan air minum layak dalam kurun tahun 2019-2023 trennya meningkat, sedangkan penanganan rumah tidak layak huni menurun. Penurunan tren penanganan rumah tidak layak huni menjelaskan bahwa setiap tahun ada penanganan namun tingkat penanganan atau jumlahnya yang terjadi penurunan.

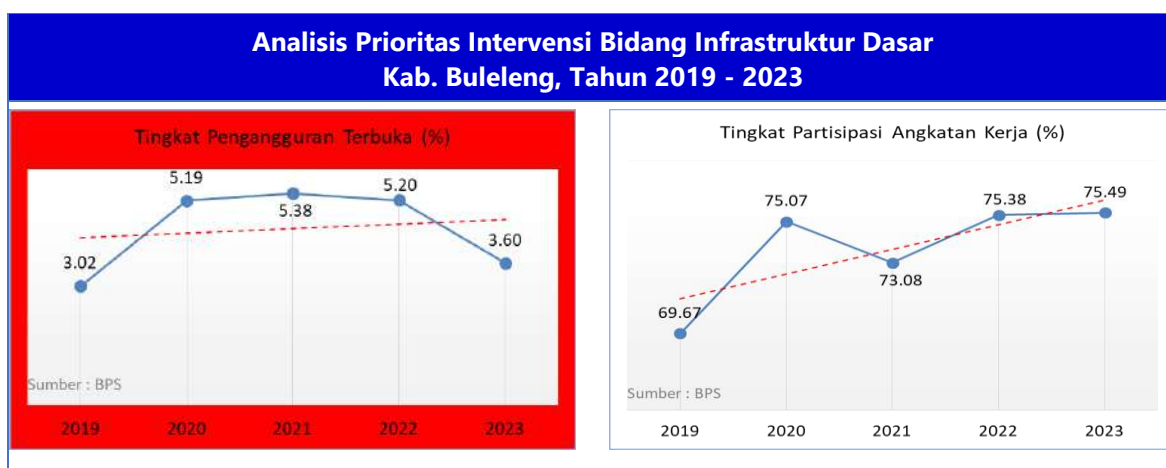


Jika melihat tren persentase penduduk miskin yang meningkat, mengindikasikan indikator pendukung proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak, air minum layak, dan penanganan rumah tidak layak huni tidak berpengaruh signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa indikator pendukung bidang infrastruktur bukan satu-satunya indikator atau bukan indikator terpenting yang memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun demikian, indikator pendukung tersebut tetap menjadi prioritas penanganan untuk menekan peningkatan tingkat kemiskinan. Termasuk ketersediaan akses infrastruktur dasar lain seperti akses layanan penerangan listrik dan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Buleleng.

e. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan

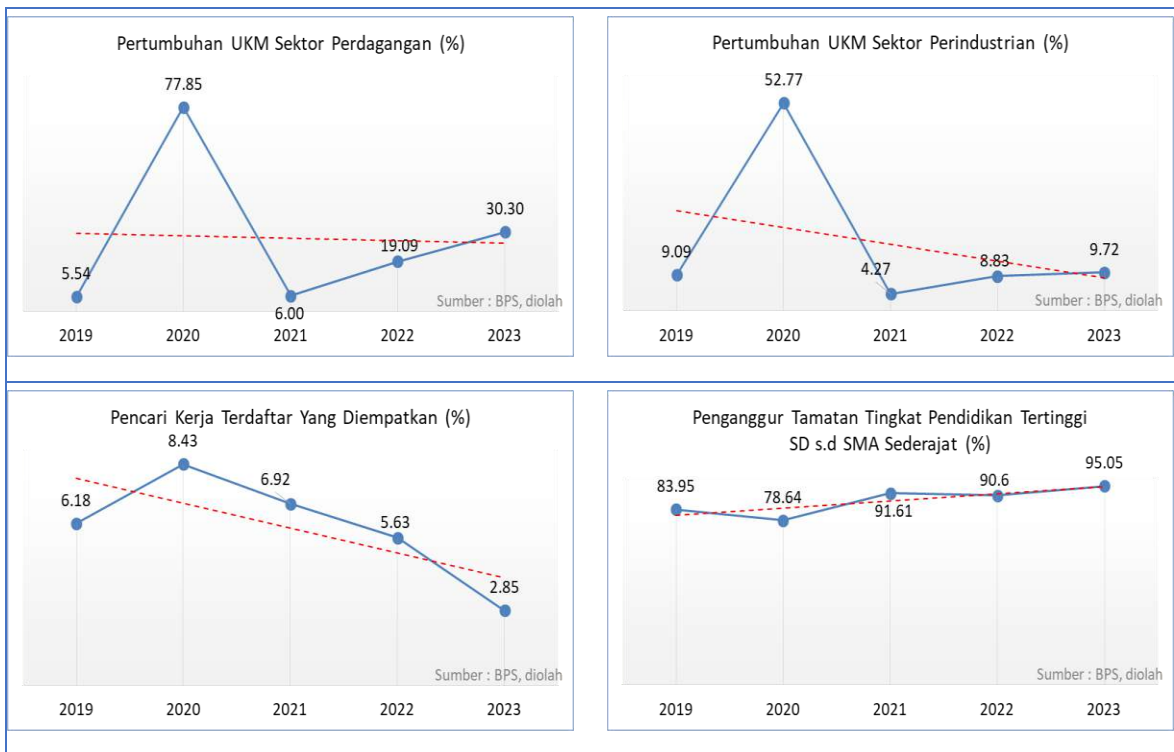
Analisis pada bidang ketenagakerjaan menggunakan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang bermasalah menjadi indikator utama. Indikator pendukungnya menggunakan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan, Pertumbuhan UKM Sektor Perindustrian, Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan, dan Penganggur Tamatan Tingkat Pendidikan Tertinggi SD s.d SMA Sederajat.

Grafik 4.5
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketenagakerjaan Indikator Utama
Tingkat Pengangguran Terbuka, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023





BAB IV PRIORITAS PROGRAM



Dari Grafik di atas menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam kurun tahun 2019-2023 dengan tren meningkat, sedangkan pada tiga tahun terakhir terlihat menurun. Peningkatan TPT berkorelasi dengan tren peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), penurunan Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan dan Perindustrian, dan Penurunan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan.

Jika dilihat dalam kurun tahun 2021-2023, tren penurunan TPT tersebut berkorelasi dengan peningkatan Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan dan Perindustrian. Sedangkan peningkatan TPAK dan Penurunan Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan tidak menunjukkan adanya korelasi. Hal ini mengindikasikan bahwa Pertumbuhan UKM Sektor Perdagangan dan Perindustrian mampu menekan TPT secara signifikan.

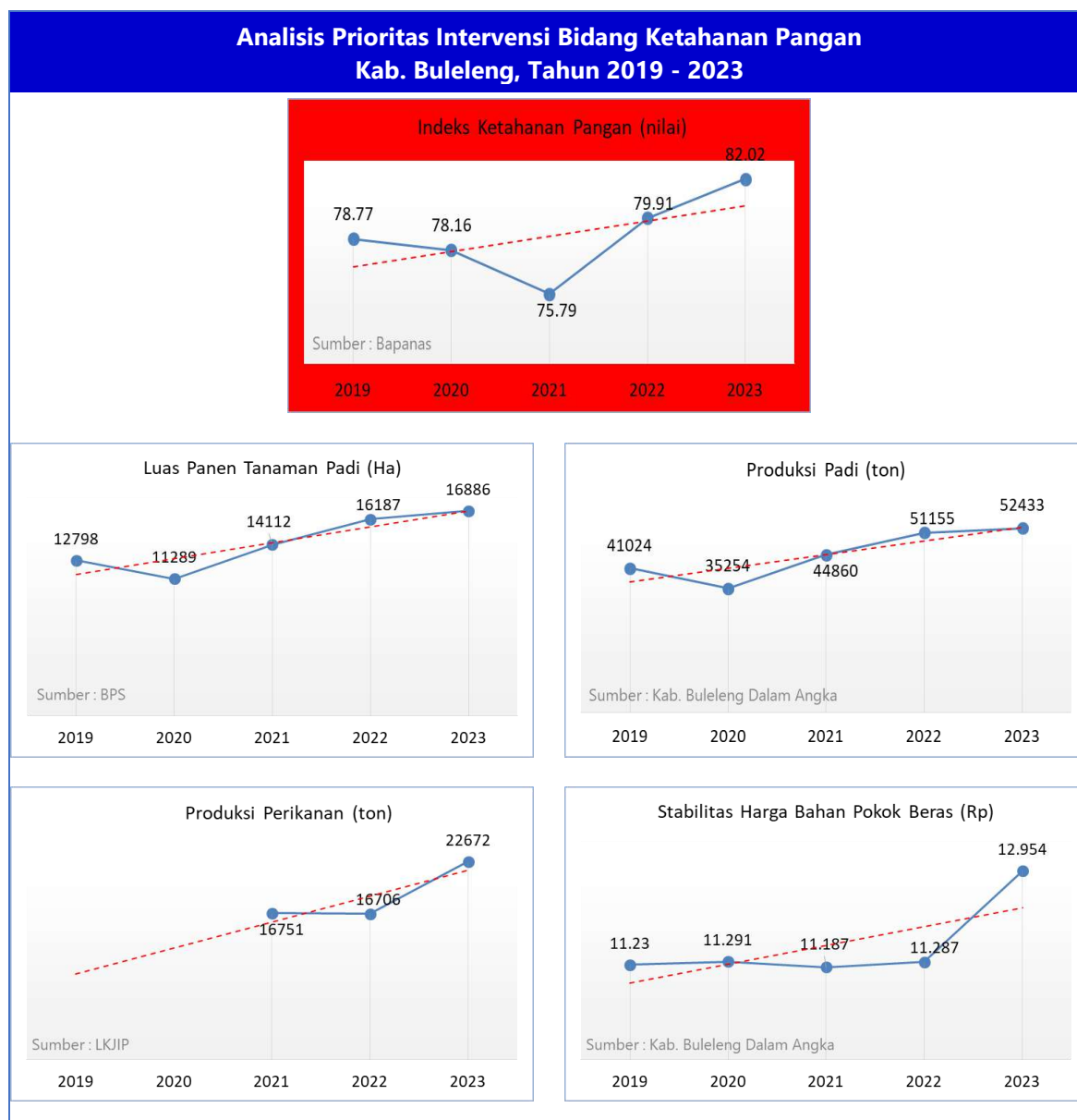
Dari uraian diatas maka, indikator-indikator pendukung tersebut merupakan indikator penting dan prioritas yang harus ditangani untuk menekan TPT. Melihat besarnya tamatan tertinggi penganggur berada pada tingkat pendidikan SD sampai dengan SMA dan cenderung meningkat maka peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan menjadi bagian yang diprioritaskan.



f. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan

Analisis pada bidang ketahanan pangan menggunakan *outcome* tujuan Indeks Ketahanan Pangan sebagai indikator utama. Luas panen tanaman padi, produksi padi, produksi perikanan, dan stabilitas harga bahan pokok beras sebagai indikator pendukung.

Grafik 4.6
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Ketahanan Pangan Indikator Utama
Indeks Ketahanan Pangan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



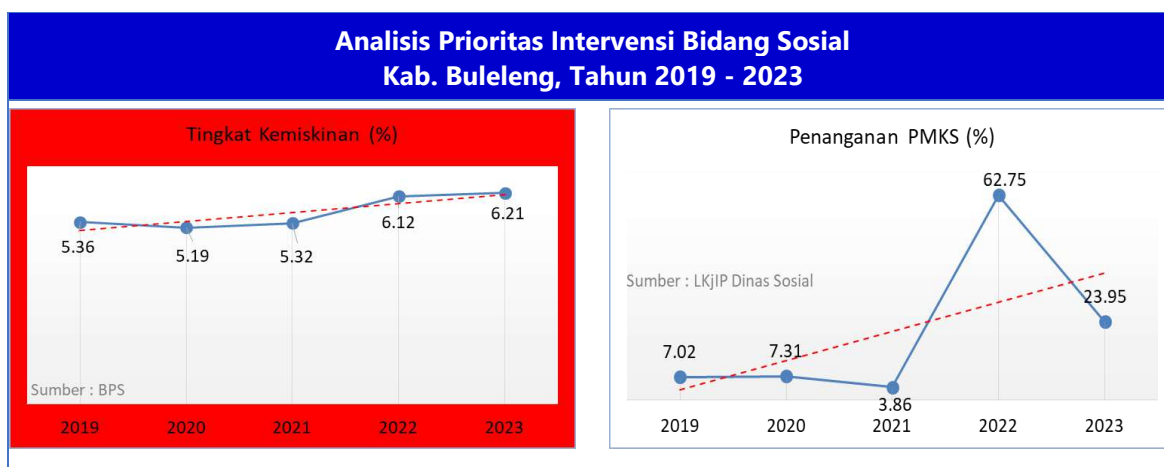


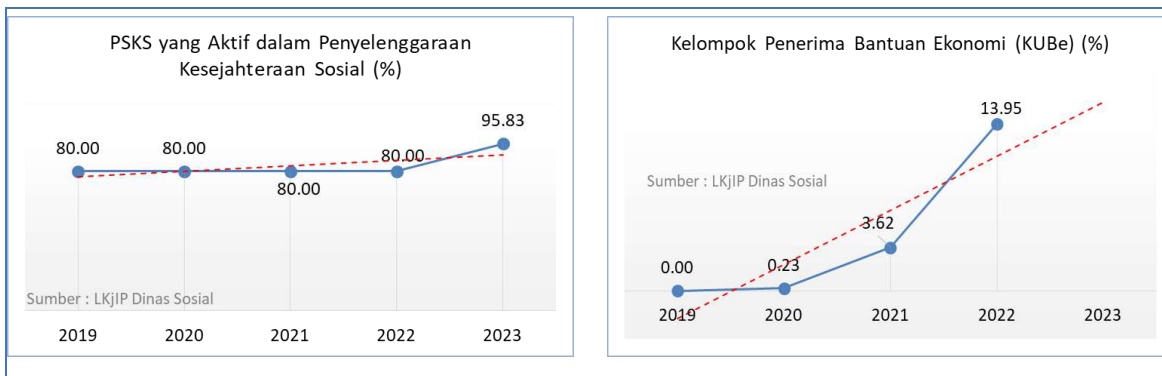
Dari grafik diatas dapat dijelaskan, indikator utama indeks ketahanan pangan berkorelasi dengan indikator pendukung luas panen tanaman padi, produksi padi, produksi perikanan, dan stabilitas harga bahan pokok beras. Dimana peningkatan tren indikator pendukung selama kurun tahun 2019-2023 memengaruhi terjadinya peningkatan indikator utama. Dengan demikian, indikator pendukung tersebut menjadi prioritas penanganan yang harus ditingkatkan dan dikendalikan untuk menjaga pemenuhan ketersediaan pangan yang cukup, aman dan bergizi, serta menjaga kestabilan harga beras. Ketersediaan pangan selain beras dan akses distribusi merupakan indikator penting yang perlu diintervensi untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan.

g. Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Sosial

Pada analisis kemiskinan bidang sosial menggunakan indikator tingkat kemiskinan sebagai indikator utama. Indikator pendukungnya menggunakan indikator penanganan PMKS, PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kelompok penerima bantuan ekonomi (KUBE).

Grafik 4.7
Analisis Keterkaitan Kemiskinan Bidang Sosial Indikator Utama Tingkat Kemiskinan, Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023





Grafik diatas menunjukkan indikator penanganan PMKS, PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan kelompok penerima bantuan ekonomi trennya meningkat dalam kurun tahun 2019-2023. Tren peningkatan indikator pendukung diikuti dengan peningkatan indikator utama, tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi dan mengindikasikan intervensi terhadap indikator pendukung belum memengaruhi penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Namun demikian, indikator pendukung tersebut merupakan determinan yang penting dan prioritas untuk menekan tingkat kemiskinan.

4.3. Analisis Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD sebagai bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Sususnannya dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu. Dengan demikian APBD dijadikan salah satu bentuk instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis pengelolaan keuangan daerah pelaksanaan APBD selama 5 (lima) tahun untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan



keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi.

Tabel 4.2
Realisasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019–2023

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
A.	PENDAPATAN					
1	Pendapatan Asli Daerah	365.596.494.163,38	318.986.891.632,31	391.988.445.424,21	410.564.891.258,14	460.500.058.608,71
2	Pendapatan Transfer	1.829.591.780.269,02	1.573.171.787.153,58	1.574.989.396.000,75	1.645.523.802.691,00	1.723.164.796.195,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	93.209.832.610,00	111.060.410.000,00	116.236.876.264,00	22.863.932.045,00	33.203.452.035,65
	Jumlah Pendapatan	2.288.398.107.042,40	2.003.219.088.785,89	2.083.214.717.688,96	2.078.952.625.994,14	2.216.868.306.839,36
B.	BELANJA					
1	Belanja Operasi	1.723.936.119.289,43	1.464.223.634.793,85	1.625.692.312.146,49	1.679.161.875.608,90	1.752.101.099.431,13
2	Belanja Modal	274.879.718.610,37	259.440.204.132,01	202.523.213.564,37	155.220.622.262,10	189.949.646.989,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.331.986,00	46.090.243.621,54	5.190.431.459,00	785.960.776,00	361.250.000,00
3	Belanja Transfer	255.138.138.500,00	236.347.401.663,28	236.969.598.800,00	244.567.671.656,00	262.711.105.571,00
	Jumlah Belanja	2.253.959.308.385,80	2.006.101.484.210,68	2.070.375.555.969,86	2.079.736.130.303,00	2.205.123.101.991,13
	Surplus/Defisit	34.438.798.656,60	-2.882.395.424,79	12.839.161.719,10	-783.504.308,86	11.745.204.848,23
C.	PEMBIAYAAN					
1	Penerimaan Pembiayaan	56.475.714.227,71	75.834.129.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.157.443.084,00	4.400.000.000,00	9.000.000.000,00	15.681.600.000,00	5.557.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	41.318.271.143,71	71.434.129.800,31	59.551.734.375,52	56.709.296.094,62	50.368.791.785,76
	SiLPA	75.757.069.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.996.633,99

Sumber data : LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng (diolah)

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir terjadi defisit riil pada realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2022 sedangkan surplus terjadi di



tahun 2019, 2021 dan 2023. Meskipun terjadi defisit riil, saldo penggunaan penerimaan pembiayaan relatif cukup besar sehingga masih menghasilkan realisasi SILPA yang dapat digunakan untuk menutup defisit riil pada tahun selanjutnya.

4.3.1 Struktur Anggaran Pendapatan

Tabel 4.3
Realisasi Pendapatan Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Pendapatan					
1	Pendapatan Asli Daerah	365.596.494.163,38	318,986,891,632.310	391,988,445,424.210	410,564,891,258.140	460,500,058,608.710
	Pajak Daerah	155,755,834,812.60	118,257,303,529.90	136,710,405,062.61	172,689,999,523.41	221,543,885,845.93
	Retribusi Daerah	20,319,816,298.00	19,809,775,071.00	36,150,491,390.00	30,078,820,360.00	34,103,424,122.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17,168,853,955.32	19,823,539,604.20	20,045,797,893.06	15,581,604,414.65	24,631,695,198.13
	Lain - Lain PAD yang Sah	172,351,989,097.46	161,096,273,427.21	199,081,751,078.54	192,214,466,960.08	180,221,053,442.65
2	Pendapatan Transfer	1.300.735.814.719,00	1,573,171,787,153.58	1,574,989,396,000.75	1,645,523,802,691.00	,723,164,796,195.00
	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1,300,735,814,719.00	1,177,658,540,453.00	1,225,794,143,075.00	1,269,014,740,424.00	1,320,272,885,965.00
	Dana Bagi Hasil Pajak	20.364.407.699,00	32,058,237,160.00	32,310,887,537.00	26,434,185,592.00	21,729,585,254.00
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	637.746.255,00	788,276,289.00	2,938,393,438.00	2,846,901,931.00	2,968,624,860.00
	Dana Alokasi Umum	998.167.419.000,00	904,071,781,000.00	890,141,572,000.00	887,085,023,949.00	932,206,178,954.00
	Dana Alokasi Khusus	281.566.241.765,00	240,740,246,004.00	300,403,290,100.00	352,650,628,952.00	363,368,496,897.00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	167.829.785.000,00	175,907,577,000.00	159,217,187,000.00	178,226,158,000.00	170,226,374,000.00
	Dana Penyesuaian	167.829.785.000,00	175,907,577,000.00	159,217,187,000.00	178,226,158,000.00	170,226,374,000.00



	Transfer Pemerintah Provinsi	361,026,180,550.02	219,605,669,700.58	189,978,065,925.75	198,282,904,267.00	232,665,536,230.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	174.670.617.177,02	142,162,195,730.58	115,018,073,909.64	173,694,333,241.00	202,713,278,174.00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	186,355,563,373.00	77,443,473,970.00	74,959,992,016.11	24,588,571,026.00	29,952,258,056.00
	Bantuan Keuangan Provinsi Lainnya	186.355.563.373,00	77,443,473,970.00	74,959,992,016.11	24,588,571,026.00	29,952,258,056.00
3	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	93,209,832,610.00	111,060,410,000.00	116,236,876,264.00	22,863,932,045.00	33,203,452,035.65
	Lain - lain Pendapatan daerah yang Sah	93,209,832,610.00	111,060,410,000.00	116,236,876,264.00	22,863,932,045.00	33,203,452,035.65
	JUMLAH	2,288,398,107,042.40	2,003,219,088,785.89	2,083,214,717,688.96	2,078,952,625,994.14	2,216,868,306,839.36

Sumber Data : LKD Pemerintah Kabupaten Buleleng (diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat bahwa perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selama lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi dengan tren menurun secara linier. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2019 sebesar Rp2.288.398.107.042,40 turun menjadi Rp2.003.219.088.785,89 di tahun 2020. Penurunan tersebut terjadi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan pendapatan pajak daerah dan beberapa jenis pendapatan lainnya. Pendapatan daerah tahun 2023 sebesar Rp2.216.868.306.839,36 dibandingkan dengan kondisi pendapatan tahun 2019 terjadi penurunan sebesar Rp71.529.800.203,04 namun meningkat sebesar Rp137.915.680.845,22 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.3.2 Kapasitas dan Rasio Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah dan Rasio Fiskal adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran



pembiayaan daerah tertentu. Semakin besar kapasitas fiskal suatu daerah, maka akan semakin mudah bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan bagi program dan kegiatan termasuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Untuk mengetahui gambaran kemampuan keuangan daerah, dikelompokkan berdasarkan rasio Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dengan uraian sebagai berikut.

Formula Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah :

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{[\text{pendapatan} + \text{penerimaan pembiayaan tertentu}] - [\text{pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu} + \text{pengeluaran pembiayaan tertentu}]}{}$$

Keterangan :

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota}$$

Formula Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah :

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \frac{KFD_{kabupaten/kota-i}}{\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i}}$$

Keterangan :

$$RKFD_{kabupaten/kota-i} = \text{Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota}$$

$$KFD_{kabupaten/kota-i} = \text{Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota}$$

$$\text{Belanja Pegawai}_{kabupaten/kota-i} = \text{Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah, dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah berikut :



RENTANG RKFD	KATEGORI KFD
$RKFD < 0,947$	Sangat Rendah
$0,947 \leq RKFD < 1,203$	Rendah
$1,203 \leq RKFD < 1,459$	Sedang
$1,459 \leq RKFD < 1,715$	Tinggi
$1,715 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Perkembangan Kapasitas Fiskal Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Perkembangan Kapasitas Fiskal dan Rasio Kapasitas Fiskal
Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Jumlah Pendapatan + Silpa	2.364.155.176.842,71	2.071.770.823.161,41	2.155.605.613.783,58	2.134.878.417.779,90	2.278.982.303.473,35
1	Pendapatan Daerah	2.288.398.107.042,40	2.003.219.088.785,89	2.083.214.717.688,96	2.078.952.625.994,14	2.216.868.306.839,36
2	Penerimaan pembiayaan tertentu (Silpa)	75.757.069.800,31	68.551.734.375,52	72.390.896.094,62	55.925.791.785,76	62.113.996.633,99
B	Jumlah Belanja Tertentu	1.101.263.908.325,15	1.043.378.182.811,04	1.084.810.458.077,00	1.129.277.528.195,00	1.217.284.067.540,00
1	Belanja pegawai	846.125.769.825,15	807.030.781.147,76	847.840.859.277,00	884.709.856.539,00	954.572.961.969,00
2	Belanja bagi hasil	255.138.138.500,00	236.347.401.663,28	236.969.598.800,00	244.567.671.656,00	262.711.105.571,00
	Total (KFD) Kapasitas Fiskal Daerah (A-B)	1.262.891.268.517,56	1.028.392.640.350,37	1.070.795.155.706,58	1.005.600.889.584,90	1.061.698.235.933,35
	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD : Belanja Pegawai)	1,49	1,27	1,26	1,14	1,11

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa Kapasitas Fiskal Kabupaten Buleleng fluktuatif sepanjang tahun 2019-2023. Kondisi Kapasitas fiskal mencapai level tertinggi pada Tahun 2019 sebesar Rp. 1.262.891.268.517,56 dengan rasio KFD sebesar 1,49 dan capaian terendah pada



tahun 2022 sebesar 1.005.600.889.584,90 dengan rasio KFD sebesar 1,14. Dilihat dari kelompok Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2022 dan 2023 berada pada kategori **rendah** dengan rentang nilai $0,947 \leq RKFD < 1,203$.

Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik masih terbatas, tidak bisa dilakukan secara mandiri atau masih tergantung pada sumber pendapatan lainnya. Dengan demikian, kurangnya keleluasaan dalam perencanaan dan penganggaran program kegiatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan.

4.3.3 Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Buleleng dari Tahun 2019-2023 dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.5
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023

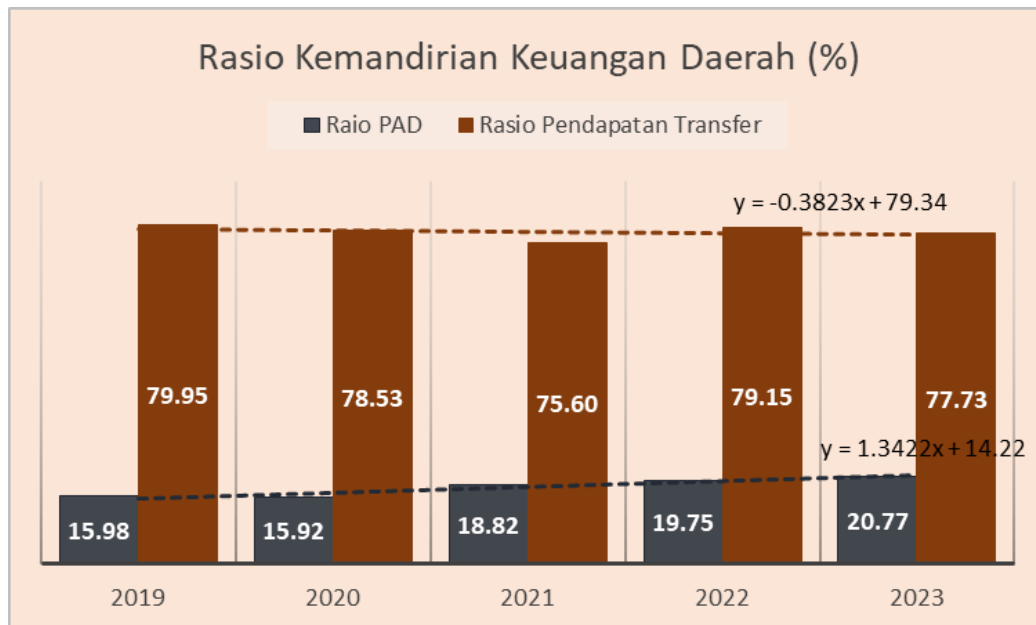
URAIAN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PENDAPATAN	,288,398,107,041.40	2,003,219,088,785.89	2,083,214,717,688.96	2,078,952,625,994.14	2,216,868,306,839.36
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	365,596,494,163.38	318,896,891,632.31	391,998,445,424.21	410,564,891,258.14	460,500,058,608.71
RASIO PAD	15.98	15.92	18.82	19.75	20.77
Pendapatan Transfer	1,829,591,780,269.02	1,573,171,787,153.58	1,574,989,396,000.75	1,645,523,802,691.00	1,723,164,796,195.00
Rasio Pendapatan Transfer	79.95	78.53	75.60	79.15	77.73

Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)



Dari tabel diatas dapat disajikan dalam grafik berikut :

Grafik 4.8
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2019 - 2023



Grafik di atas menunjukkan tren rasio kemandirian daerah Kabupaten Buleleng dalam kurun tahun 2019-2023 meningkat, berbanding terbalik dengan rasio pendapatan transfer daerah yang rasionya mengalami penurunan. Dilihat dari rata-rata (5 tahun) rasio PAD sebesar 18,25% sedangkan rasio Pendapatan Transfer sebesar 78,19%.

Dari uraian tersebut mengindikasikan kemandirian keuangan daerah sudah semakin membaik, namun masih memiliki ketergantungan dari pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan sah lainnya dalam pembangunan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

4.4. Evaluasi Anggaran Belanja

Evaluasi anggaran belanja dilakukan untuk melihat proporsi belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga yang berkaitan dengan perbaikan indikator utama pada tiap bidang. Evaluasi anggaran belanja



pertama kali dilakukan dengan melihat komposisi belanja beserta masing-masing komponennya, dalam analisis antar waktu untuk melihat perkembangan belanjannya. Poin-poin yang perlu dilihat adalah berapa (nominal dan proporsi) dan untuk apa belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tak terduga. Kemudian evaluasi belanja dilakukan pada setiap bidang untuk melihat relevansi dan efektivitas belanja terhadap program prioritas dan perbaikan capaian program tersebut dari waktu ke waktu.

Perkembangan belanja daerah pada APBD Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2023 berdasarkan jenis belanja ditunjukkan pada Tabel 4.6 dan Grafik berikut.

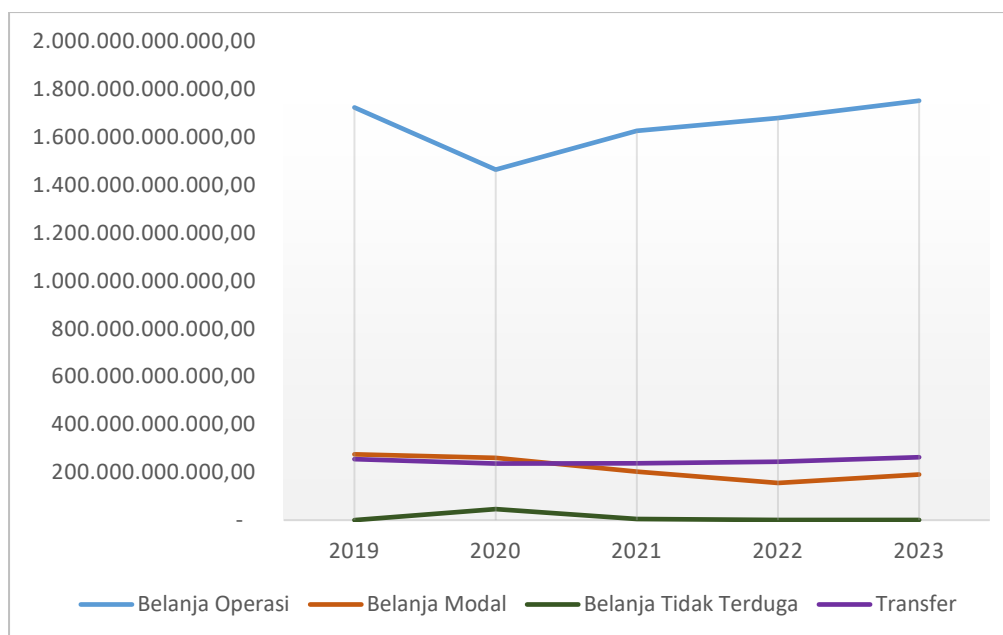
Tabel 4.6
Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Sesuai Proporsi Jenis Belanja
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Belanja Operasi	1.723.936.119.289,43	1.464.223.634.793,85	1.625.692.312.146,49	1.679.161.875.608,90	1.752.101.099.431,13
2	Belanja Modal	274.879.718.610,37	259.440.204.132,01	202.523.213.564,37	155.220.622.262,10	189.949.646.989,00
3	Belanja Tidak Terduga	5.331.986,00	46.090.243.621,54	5.190.431.459,00	785.960.776,00	361.250.000,00
4	Transfer	255.138.138.500,00	236.347.401.663,28	236.969.598.800,00	244.567.671.656,00	262.711.105.571,00
TOTAL BELANJA DAERAH		2.253.959.308.385,80	2.006.101.484.210,68	2.070.375.555.969,86	2.079.736.130.303,00	2.205.123.101.991,13

Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)



Grafik 4.9
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Sesuai Proporsi Jenis Belanja Tahun 2019-2023



Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)

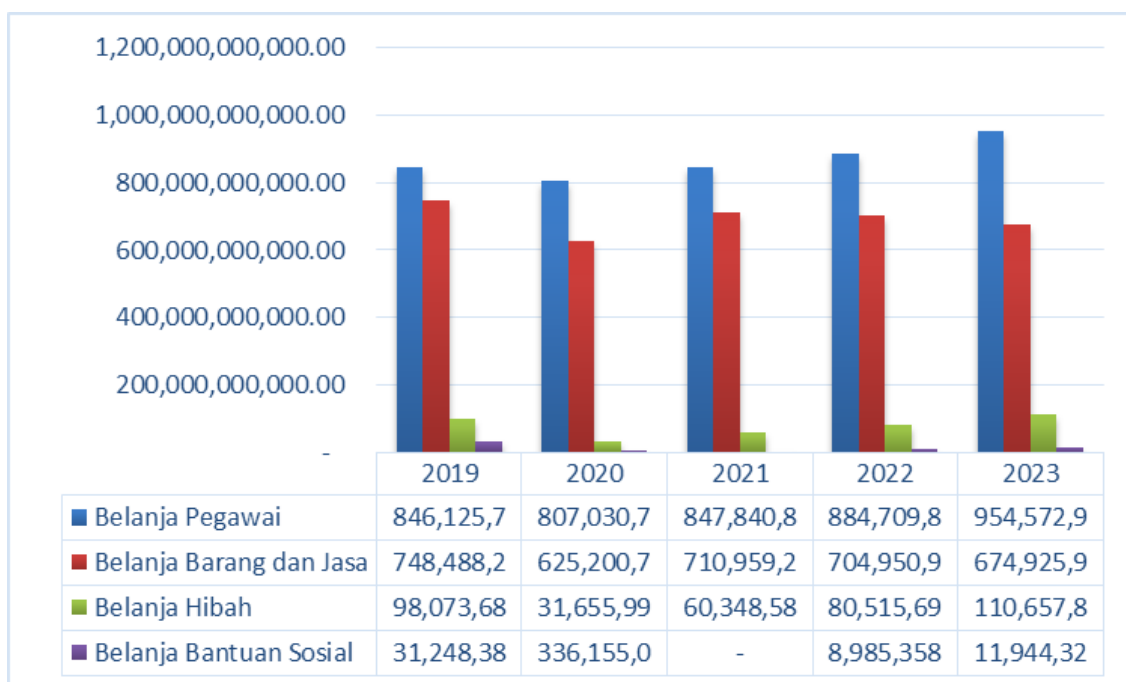
Perkembangan belanja daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 sebagaimana grafik diatas terlihat berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Belanja daerah didominasi oleh belanja operasi dibandingkan dengan jenis belanja lainnya. Belanja operasi semakin meningkat setiap tahunnya yang mengindikasikan belanja untuk publik semakin besar. Belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bansos dan belanja hibah.

4.4.1 Proporsi Belanja Operasi

Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bansos dan belanja hibah. Perkembangan proporsi komponen belanja operasi APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023 disajikan pada grafik berikut.



Grafik 4.10
Perkembangan Belanja Operasi APBD Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023



Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan proporsi belanja operasi APBD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 didominasi oleh belanja pegawai dengan kecenderungan yang meningkat. Diikuti oleh belanja barang dan jasa yang berfluktuatif, belanja hibah yang cenderung meningkat sedangkan belanja bansos cenderung menurun. Komposisi belanja tersebut mengindikasikan adanya keberpihakan program kegiatan untuk masyarakat. Namun demikian, Belanja operasi perlu dioptimalkan agar diprioritaskan mendukung capaian indikator dimensi kemiskinan, intervensi pada belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bansos.

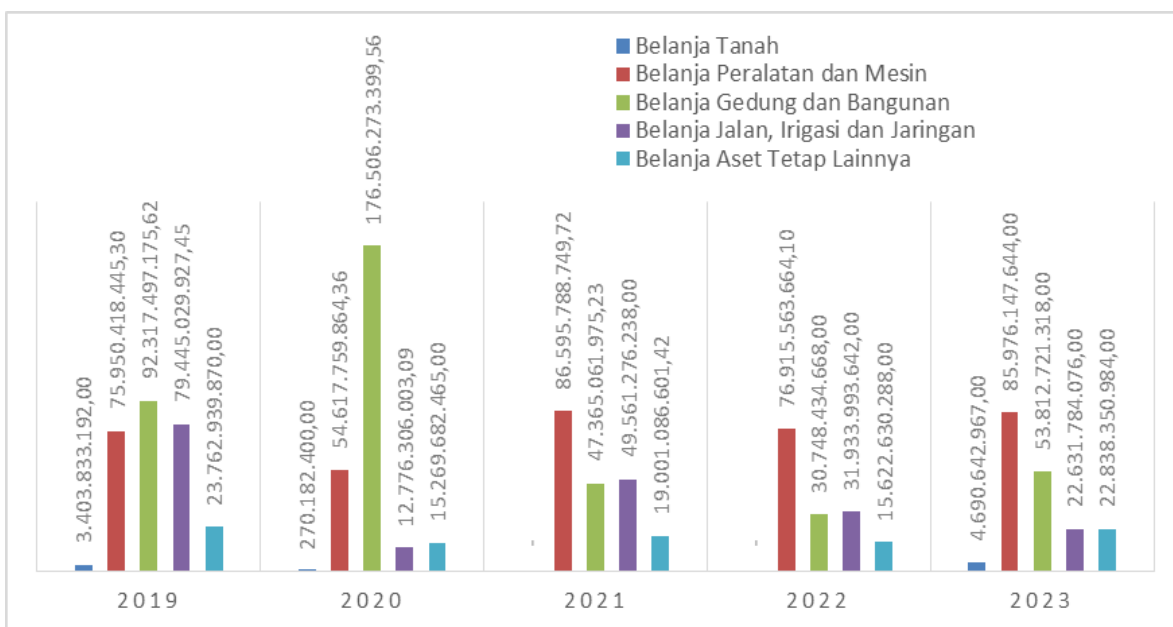
4.4.2 Proporsi Belanja Modal

Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja



asset tetap lainnya. Perkembangan proporsi komponen belanja modal APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 4.11
Perkembangan Belanja Modal APBD Kabupaten Buleleng
Tahun 2019-2023



Sumber : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)

Grafik diatas menunjukkan proporsi belanja modal APBD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 lebih banyak didominasi oleh belanja peralatan dan mesin kecuali pada tahun 2019 dan 2020 didominasi oleh belanja gedung dan bangunan. Diikuti oleh belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya. Untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan pada strategi meminimalkan wilayah kantong-kantong kemiskinan agar lebih diprioritaskan pada belanja jalan, irigasi dan jaringan.

4.4.3 Proporsi Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang



sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Belanja transfer sesuai ketentuan perundang-undangan, dimana 10 persen dari pajak daerah dan retribusi daerah dialokasikan untuk bagi hasil pada pemerintah desa dan 10 persen dari dana transfer umum untuk bantuan keuangan umum pada desa.

Perkembangan belanja tak terduga dan belanja transfer APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023 disajikan pada table berikut.

Grafik 4.12
Perkembangan Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



Sumber Data : Laporan Keuangan Daerah (data diolah)

Grafik di atas menunjukkan belanja tidak terduga pada tahun 2020 terjadi lonjakan yang sangat signifikan, selanjutnya hingga tahun 2023 terjadi penurunan. Lonjakan tersebut terjadi akibat adanya pandemi covid-19 sehingga berdampak pada *refocusing* belanja, yang diarahkan untuk penanggulangan pandemi.

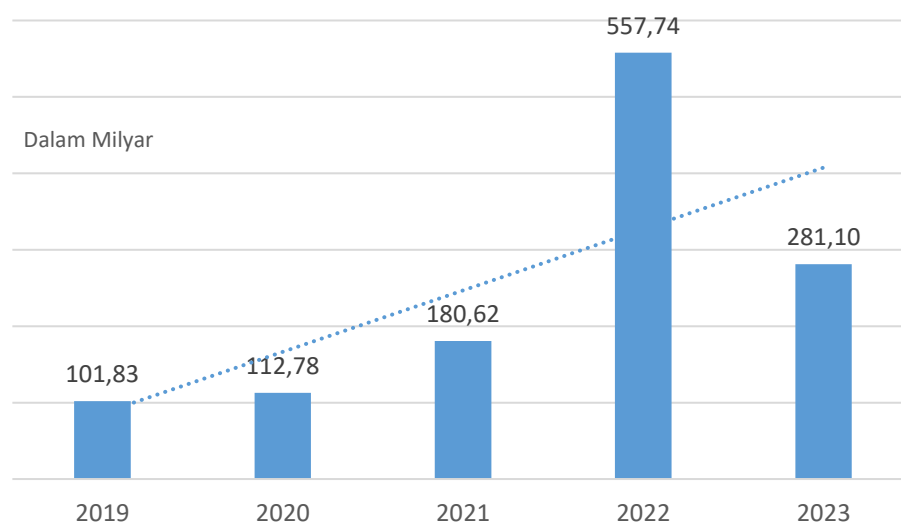


Belanja transfer pada APBD Kabupaten Buleleng tahun 2020 terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi selanjutnya hingga tahun 2023 meningkat secara konsisten. Belanja transfer tersebut dialokasikan untuk pemerintah desa berupa bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bantuan keuangan dan dana desa.

4.4.4. Analisis Belanja Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan

Perkembangan alokasi belanja daerah pada program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Buleleng tahun 2019-2023 ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 4.13
Perkembangan Alokasi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Bersumber APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2023



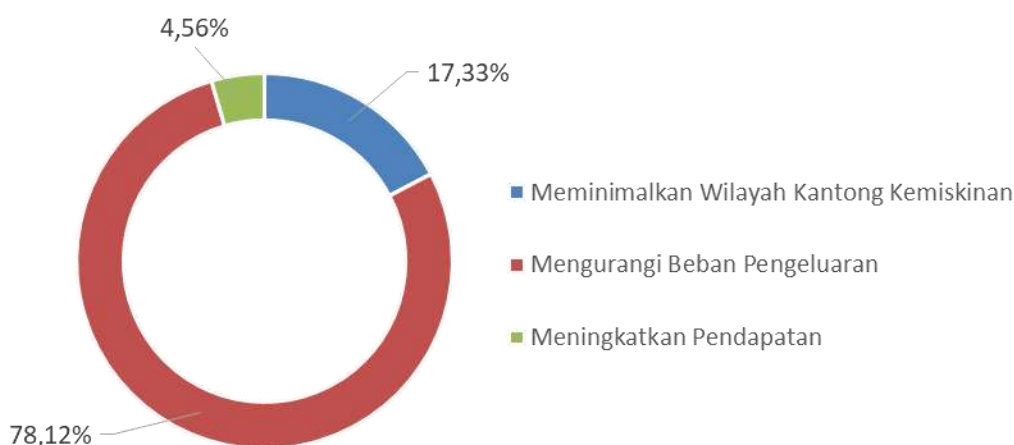
Sumber Data : Laporan Kemiskinan SKPD (Data diolah)

Grafik di atas menjelaskan bahwa perkembangan alokasi anggaran penanggulangan kemiskinan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang



bersumber APBD Kabupaten Buleleng berfluktuasi dengan tren meningkat. Anggaran penanggulangan kemiskinan tahun 2019 sebesar Rp101,83 Milyar menjadi Rp281,10 Milyar di tahun 2023. Peningkatan anggaran penanggulangan kemiskinan secara signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi sebesar Rp557,74 Milyar. Peningkatan alokasi anggaran tersebut akibat dari kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial tunai kepada masyarakat berpenghasilan rendah akibat dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain itu, pemberian hibah/bansos kepada masyarakat/lembaga dari usulan pokok pikiran DPRD Kabupaten Buleleng. Perkembangan alokasi anggaran tahun 2019-2023 menunjukkan, bahwa Kebijakan Anggaran Pemerintah Kabupaten Buleleng fokus mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Grafik 4.14
Komposisi Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Tujuan Program (Strategi), Kabupaten Buleleng Tahun 2023



Anggaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2023 sebesar Rp281.105.866.865,00 terdiri dari 3 (tiga) kelompok sesuai tujuan program (strategi) nasional penanggulangan kemiskinan. Program yang bertujuan untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan sebesar 17,33% dan 78,12% untuk mengurangi beban pengeluaran serta 4,56% untuk meningkatkan pendapatan. Pada tujuan program untuk mengurangi beban pengeluaran, didominasi pada



urusan pendidikan sebesar Rp132.530.394.567,00 dan urusan kesehatan Rp78.354.002.525,00.

Tabel 4.7
Jumlah Anggaran Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Tujuan Program (Strategi) per Perangkat Daerah

No	Perangkat Daerah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Grand Total
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		295.135.000		295.135.000
2	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	129.080.128			129.080.128
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		609.465.176		609.465.176
4	Dinas Kesehatan		78.354.002.525		78.354.002.525
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	222.596.205	100.055.530	2.570.458.218	2.893.109.953
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	6.970.858.931			6.970.858.931
7	Dinas Lingkungan Hidup			377.783.970	377.783.970
8	Dinas Pariwisata			1.778.446.004	1.778.446.004
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.575.960.904			3.575.960.904
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.269.084.887			1.269.084.887
11	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	13.314.265.253	132.530.394.567		145.844.659.820



No	Perangkat Daerah	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	Mengurangi Beban Pengeluaran	Meningkatkan Pendapatan	Grand Total
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	7.540.660.500	167.120.510		7.707.781.010
13	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			2.713.036.212	2.713.036.212
14	Dinas Perhubungan	98.630.372			98.630.372
15	Dinas Pertanian	8.099.000.000		3.475.749.572	11.574.749.572
16	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.490.261.001			7.490.261.001
17	Dinas Sosial		7.531.675.546	1.379.791.649	8.911.467.195
18	Dinas Tenaga Kerja			512.354.205	512.354.205
	Grand Total	48.710.398.181	219.587.848.854	12.807.619.830	281.105.866.865

Sumber Data : Laporan Kemiskinan SKPD (Data diolah)

4.5. Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Intervensi

Untuk menentukan isu-isu strategis dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan analisis kemiskinan berbagai bidang. Bidang kemiskinan meliputi Bidang Kemiskinan Konsumsi, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur Dasar dan Bidang Ketahanan Pangan. Permasalahan dari masing-masing bidang dilakukan analisis keterkaitan sehingga ketemu akar permasalahan yang menjadi prioritas intervensi. Namun untuk menyelesaikan berbagai akar permasalahan masing-masing bidang dan mengkonkritkan menjadi program dan kegiatan tentu tidaklah mudah, pasti ada



hambatan, namun disisi lain pasti ada juga faktor pendorong. Berikut adalah beberapa faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng:

Tabel 4.8
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Buleleng

No	Bidang Urusan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Bidang Kemiskinan Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan regulasi dari Pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan Intervensi program dari Pemerintah Komitmen kepala daerah dalam pengentasan kemiskinan Menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah dalam dokumen Rencana Pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Masih besarnya jumlah penduduk miskin di Buleleng Sasaran prioritas intervensi program masih ada <i>Inclusion Error</i> dan <i>Exclusion Error</i> pada sumber data (Hasil padan P3KE dengan DTKS) Keterbatasan Anggaran untuk Percepatan Penanggulangan Kemsikinan Kesadaran masyarakat pada kategori tingkat kesejahteraan terendah untuk keluar dari kondisi status miskin masih relatif rendah (bantuan pemerintah terorientasi relatif memanjakan mereka).
2	Bidang Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> Angka putus sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs trennya menurun Menjadi program prioritas kepala daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bea siswa dan seragam sekolah gratis bagi anak usia sekolah dari 	<ul style="list-style-type: none"> Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Buleleng masih dibawah angka capaian Provinsi Bali Angka Rata Lama Sekolah Kabupaten Buleleng berada pada posisi ke 2 terendah dari 9 Kabupaten/Kota, dan capaian tersebut masih dibawah capaian Provinsi Bali



BAB IV PRIORITAS PROGRAM

		<p>keluarga miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sasaran Program Prioritas Nasional dalam pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG). • Merupakan urusan wajib 	<p>dan Nasional.</p>
3	Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Umur Harapan Hidup (UHH) capaiannya meningkat setiap tahun • Capaian balita gizi buruk dan stunting lima tahun terakhir mengalami penurunan tiap tahunnya • Menjadi program prioritas kepala daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana penunjang bidang kesehatan • Cakupan kepesertaan JKN Buleleng sudah UHC mencapai lebih dari 99% • Merupakan urusan wajib 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA) • Masih terbatasnya tenaga kesehatan dokter umum dan spesialis
4	Bidang Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Sinergitas program pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat dan forum TJSLP dalam penanganan rumah tidak layak huni • Menjadi prioritas sasaran dalam RPJMD Kabupaten Buleleng 2025-2029 "Terpenuhinya ketersediaan sandang dan hunian layak terjangkau" 	<ul style="list-style-type: none"> • Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak dan air minum layak capaiannya masih dibawah capaian provinsi • Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang belum tertangani
5	Bidang Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pengangguran mengalami penurunan pasca pandemic covid 19 • Menjadi salah satu 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Tingkat Pengangguran mengalami penurunan namun capaian tersebut masih diatas capaian provinsi bali dan



BAB IV PRIORITAS PROGRAM

		<p>indikator tujuan dan sasaran daerah pada dokumen RPJMD Kabupaten Buleleng tahun 2025-2029</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama dengan LPK swasta dalam pelaksanaan pelatihan kerja dalam peningkatan kompetensi dan produktivitas calon tenaga kerja. 	<p>kabupaten buleleng menempati peringkat 1 tertinggi dibandingkan tingkat pengangguran 9 kabupaten/kota di bali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan
6	Bidang Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi padi meningkat • Kecukupan ketersediaan pangan • Menjadi Misi prioritas kepala daerah dalam RPJMD 2025-2029 'Membangun kemandirian pangan dan terpenuhinya sandang dan papan bagi Krama Buleleng baik dari segi jumlah, mutu maupun kontinuitasnya' 	<ul style="list-style-type: none"> • Harga kebutuhan bahan pokok beras tiap tahun mengalami peningkatan • Kepemilikan lahan sawah semakin berkurang • Kurangnya irigasi pengairan lahan pertanian saat musim kemarau



BAB V

LOKASI PRIORITAS

5.1. Isu Strategis

Pembangunan daerah Kabupaten Buleleng berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu strategis, utamanya adalah masalah kemiskinan. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sebesar 5,85% masih diatas Provinsi Bali sebesar 4,25% dan masih lebih tinggi dari target RPD sebesar 5,15%.

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan di berbagai bidang lainnya. Isu-isu pada bidang lainnya yang dinilai prioritas untuk ditangani merupakan hasil dari seluruh analisis yang telah dilakukan pada proses Analisis Perencanaan dan Penganggaran seperti yang telah dijabarkan pada halaman sebelumnya. Satu isu strategis dapat memuat beberapa indikator utama dalam satu bidang. Berbagai isu strategis dan permasalahan yang dialami masyarakat miskin harus diselesaikan secara komprehensif dan simultan bukan parsial.

Berikut merupakan isu-isu strategis kemiskinan Kabupaten Buleleng per bidang dari 5 (lima) bidang dalam analisis kemiskinan, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur dasar, bidang ketenagakerjaan, bidang ketahanan pangan, serta bidang sosial.

1. Bidang Pendidikan

- a) Realisasi kinerja APM SD/MI di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 95,12%. Angka ini tergolong rendah karena berada dibawah tingkat provinsi dan nasional, dimana APM SD/MI di Provinsi Bali sebesar 97,77%, sedangkan APM SD/MI di tingkat Nasional sebesar 97,89%. Dibandingkan dengan target RPD Kabupaten Buleleng sebesar 99,16%, realisasi kinerja APM SD/MI masih berada dibawah target yang ditetapkan atau capaiannya baru sebesar 95,93%.
- b) Realisasi kinerja APM SMP/MTS di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 85,44%. Angka tersebut menurun sebesar 1,43 poin persen dari kondisi tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan target RPD Kabupaten



Buleleng sebesar 87,68%, realisasi kinerja APM SMP/MTS masih berada dibawah target yang ditetapkan atau capaiannya baru sebesar 97,45%.

- c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 7,57 tahun, berada di urutan ke-2 terendah dari 9 kabupaten/kota se-Bali, masih di bawah capaian Provinsi Bali (9,45) dan nasional (8,77).

2. Bidang Kesehatan

- a) Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 15,14 per 1.000 KH meningkat sebesar 3,97 per 1.000 KH dibanding tahun sebelumnya, serta masih berada di atas capaian Provinsi Bali (9,70 per 1.000 KH). Jika dibandingkan dengan target RPD tahun 2023 yaitu 9,00 per 1.000 KH maka angka kematian bayi di Kabupaten Buleleng belum memenuhi target.
- b) Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 sebesar 73 per 100.000 KH. Capaian tersebut masih di atas capaian Provinsi Bali (63,9 per 100.000 KH).
- c) Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 mencapai 72,70 tahun, masih berada di bawah UHH Provinsi Bali yaitu 72,98 tahun.
- d) Prevalensi Balita Gizi Buruk tahun 2023 di Kabupaten Buleleng sebesar 0,3% diatas capaian Provinsi Bali sebesar 0,1%.

3. Bidang Infrastruktur Dasar

- a) Proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak tahun 2023 di Kabupaten Buleleng (90,99%) di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 95,70%
- b) Proporsi rumah tangga dengan air minum layak tahun 2023 di Kabupaten Buleleng sebesar 93,38% berada di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 98,31%
- c) Proporsi rumah tangga dengan akses listrik tahun 2023 di Kabupaten Buleleng sebesar 99,76% berada di bawah capaian Provinsi Bali sebesar 99,90%.

4. Bidang Ketenagakerjaan

- a) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 3,60%, masih diatas capaian Provinsi Bali sebesar 2,69%. Realisasi capaian tersebut belum memenuhi target RPD yakni sebesar 3,30% atau baru mencapai 90,91% dari target.
- b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Buleleng tahun



2023 sebesar 75,49% masih berada di bawah capaian Provinsi Bali yakni 77,08%. Realisasi capaian tersebut belum memenuhi target RPD yakni sebesar 75,56% atau baru mencapai 99,91% dari target.

- c) Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kabupaten Buleleng tahun 2023 sebesar 96,40% masih berada di bawah capaian Provinsi Bali (97,31%).

5. Bidang Ketahanan Pangan

- a) Indeks ketahanan pangan berkorelasi dengan indikator pendukung luas panen tanaman padi, produksi padi, produksi perikanan, dan stabilitas harga bahan pokok beras.
- b) Laju pertumbuhan pangan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (PDRB ADHK 2010) di Kabupaten Buleleng dari Tahun 2019–2023 menunjukkan perkembangan dengan tren yang konsisten menurun. Penurunannya sebesar 6,21 poin persen dari kondisi tahun 2019 sebesar 5,66% menjadi -0,55% pada tahun 2023.
- c) Rata-rata harga eceran beras di Kabupaten Buleleng tahun 2023 pada Triwulan III dengan Triwulan IV terjadi peningkatan sebesar Rp1.141,00 atau sebesar 8,78%. Perkembangan harga eceran beras tersebut secara QoQ (8,78%) menunjukkan kondisi yang tidak terkendali dibandingkan dengan target inflasi nasional tahun 2023 sebesar 2,5-3,5%.

6. Bidang Sosial

Indikator-indikator pada bidang sosial yang berorientasi pada layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menunjukkan arah yang membaik. Oleh karena penanganan PMKS merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar maka tetap menjadi prioritas intervensi pada program penanggulangan kemiskinan untuk menekan dampak sosial yang lebih parah.

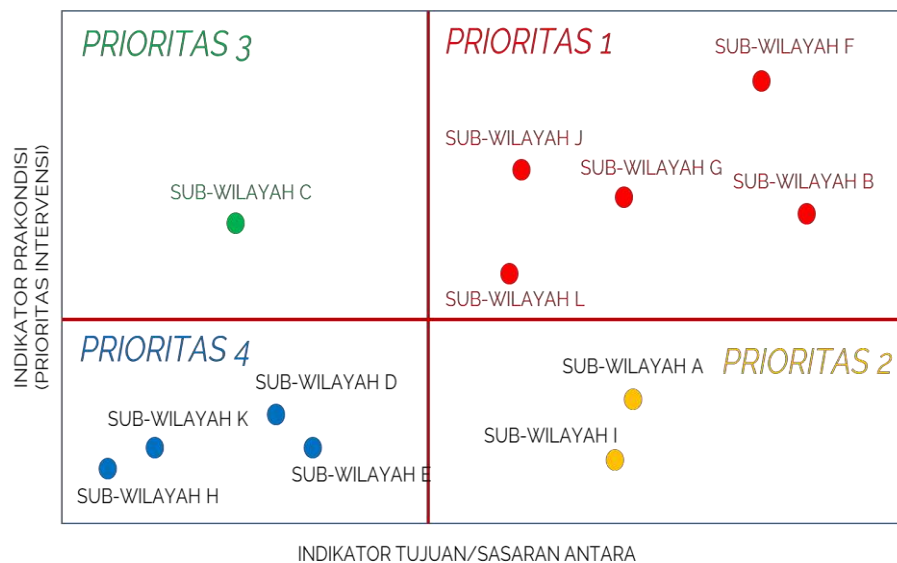
5.2. Analisis Kuadran Wilayah

Analisis kuadran wilayah merupakan proses pemetaan untuk menentukan wilayah prioritas intervensi, berdasarkan capaian indikator bidang kemiskinan. Untuk mendapatkan wilayah prioritas, maka dilakukan analisis grafik dengan menentukan koordinat yang dibentuk oleh pasangan indikator. Pasangan indikator yang dimaksud bisa berupa pasangan antara indikator utama terhadap indikator utama maupun pasangan indikator utama terhadap indikator pendukung, dimana masing-masing indikator diletakkan pada sumbu x



(horizontal) dan sumbu y (vertikal). Hasil capaian indikator ditandai dengan titik-titik wilayah yang terpisah dalam empat kuadran. Masing-masing kuadran mewakili urutan prioritas kelompok wilayah intervensi dari indikator kemiskinan yang bersangkutan sekaligus memberikan informasi lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil analisis lokasi kuadran wilayah prioritas sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5.1
Pembagian Kuadran Prioritas Wilayah



Beberapa analisis kuadran wilayah untuk intervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng diuraikan sebagai berikut :

1. Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan Konsumsi

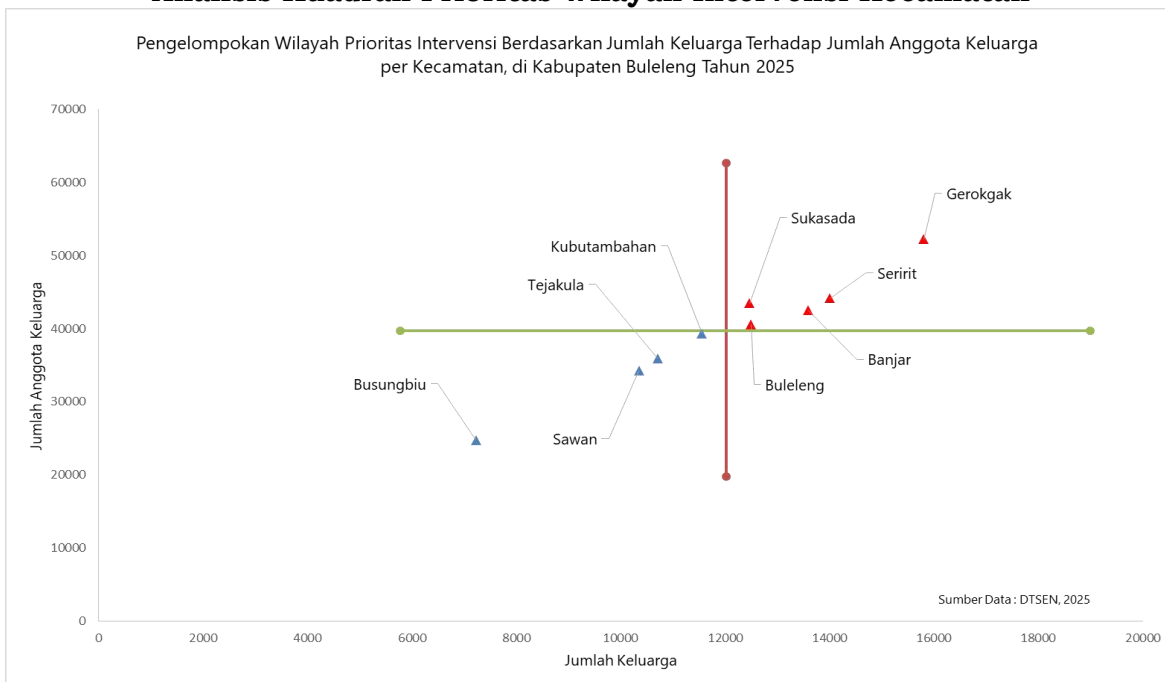
Analisis prioritas wilayah bidang kemiskinan konsumsi mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 sampai dengan desil 5. Hasilnya sebagaimana telah diuraikan pada Bab III Profil Kemiskinan Daerah tentang kondisi kemiskinan mikro. Analisis dilakukan untuk menentukan prioritas wilayah intervensi kecamatan dan desa/kelurahan dengan menggunakan Jumlah Keluarga sebagai indikator utama dan Jumlah Anggota Keluarga sebagai indikator pendukung.



a. Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan

Analisis prioritas wilayah intervensi kecamatan dilakukan dengan menganalisis jumlah Keluarga terhadap jumlah Anggota Keluarga di masing-masing kecamatan. Analisis kuadran prioritas wilayah kecamatan di Kabupaten Buleleng ditunjukkan pada gambar 5.2 berikut.

Gambar 5.2
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan



Dari analisis kuadran prioritas wilayah di atas menunjukkan data wilayah kecamatan prioritas intervensi sebagai berikut:

- o Wilayah yang menjadi prioritas pertama adalah wilayah yang memiliki jumlah keluarga dan jumlah anggota keluarga tertinggi, berada pada Kuadran I dan ditandai warna merah. Dari gambar diatas terlihat wilayah prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak, Seririt, Banjar, Sukasada, dan Buleleng.
- o Wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) tidak ada.
- o Wilayah prioritas ketiga (dalam Kuadran III) tidak ada.
- o Wilayah prioritas intervensi yang berada pada Kuadran IV (ditandai warna biru) adalah Kecamatan Kubutambahan, Tejakula, Sawan, dan



Busungbiu.

Wilayah-wilayah kecamatan berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi lokasi skala prioritas intervensi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng.

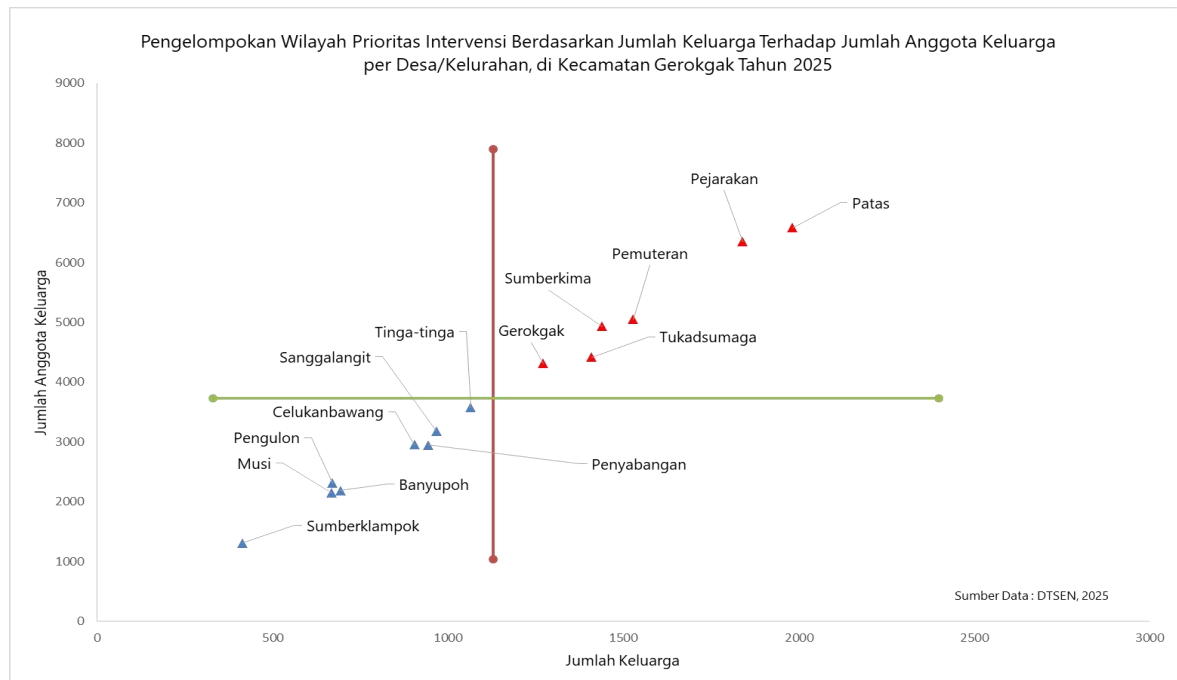
b. Prioritas Wilayah Intervensi Desa

Untuk menajamkan sasaran intervensi program pengentasan kemiskinan, kuadran wilayah prioritas intervensi kecamatan dianalisis lagi dalam lingkup wilayah desa/kelurahan, sebagai berikut :

Kecamatan Gerokgak

Analisis kuadran prioritas wilayah di Kecamatan Gerokgak ditunjukkan pada grafik berikut.

Gambar 5.3
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Gerokgak



Grafik di atas menunjukkan hasil sebagai berikut:

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Patas, Pejarakan, Pemuteran, Sumberkima, Tukad Sumaga, dan Gerokgak.



BAB V LOKASI PRIORITAS

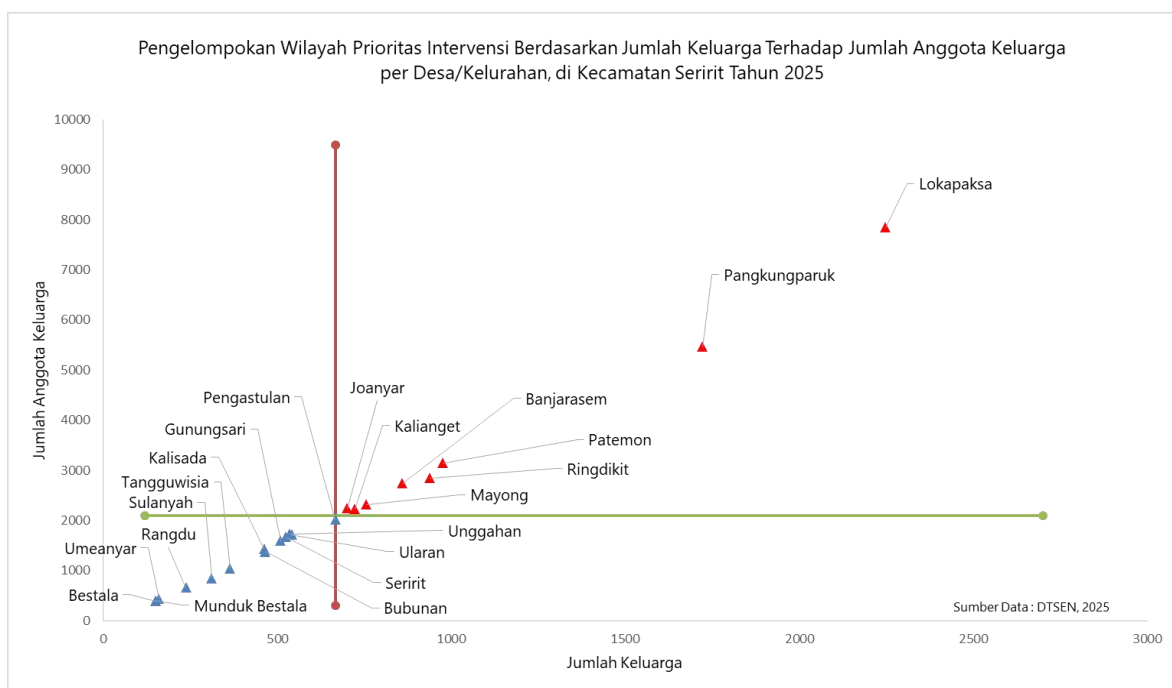
- o Wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dan prioritas ketiga (dalam Kuadran III) tidak ada.
- o Wilayah prioritas yang masuk Kuadran IV adalah Desa Tinga-Tinga, Sanggalangit, Penyabangan, Celukan Bawang, Banyupoh, Pengulon, Musi, dan Sumberklampok.

Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Gerokgak.

Kecamatan Seririt

Hasil analisis kuadran prioritas wilayah Kecamatan Seririt sebagai berikut.

Gambar 5.4 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Seririt



Grafik di atas menunjukkan :

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Lokapaksa, Pangkungparuk, Patemon, Ringdikit, Banjarasem, Mayong, Kalianget, dan Joanyar .
- o Wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dan prioritas ketiga (dalam Kuadran III) tidak ada.

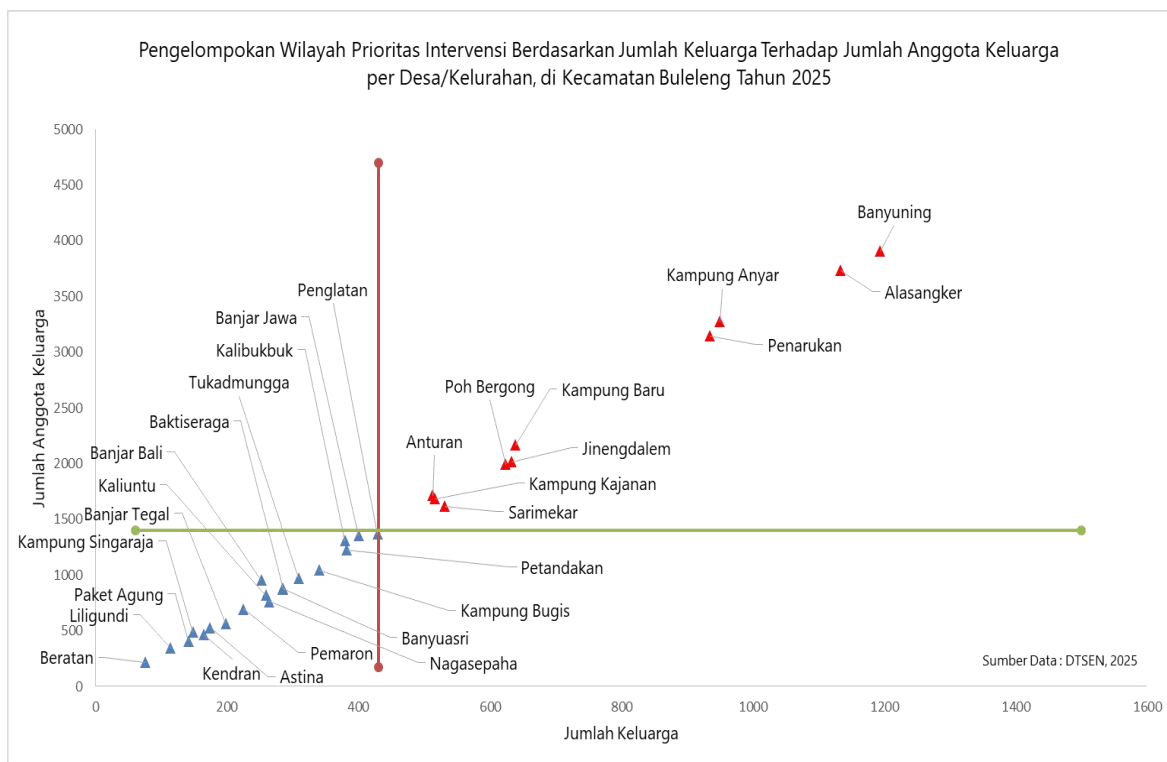


o Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Pengastulan, Ularan, Unggahan, Seririt, Gunungsari, Kalisada, Bubunan, Tangguwisia, Sulanyah, Rangdu, Umeanyar, Bestala, dan Munduk Bestala. Wilayah-wilayah desa/kelurahan berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Seririt.

Kecamatan Buleleng

Berikut hasil analisis kuadran prioritas wilayah Kecamatan Buleleng.

Gambar 5.5
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Buleleng



Grafik di atas menunjukkan :

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Banyuning, Alasanger, Kampung Anyar, Penarukan, Kampung Baru, Jinengdalem, Poh Bergong, Sari Mekar, Kampung Kajanan, dan Anturan.
- o Wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dan prioritas ketiga (dalam Kuadran III) tidak ada.



BAB V LOKASI PRIORITAS

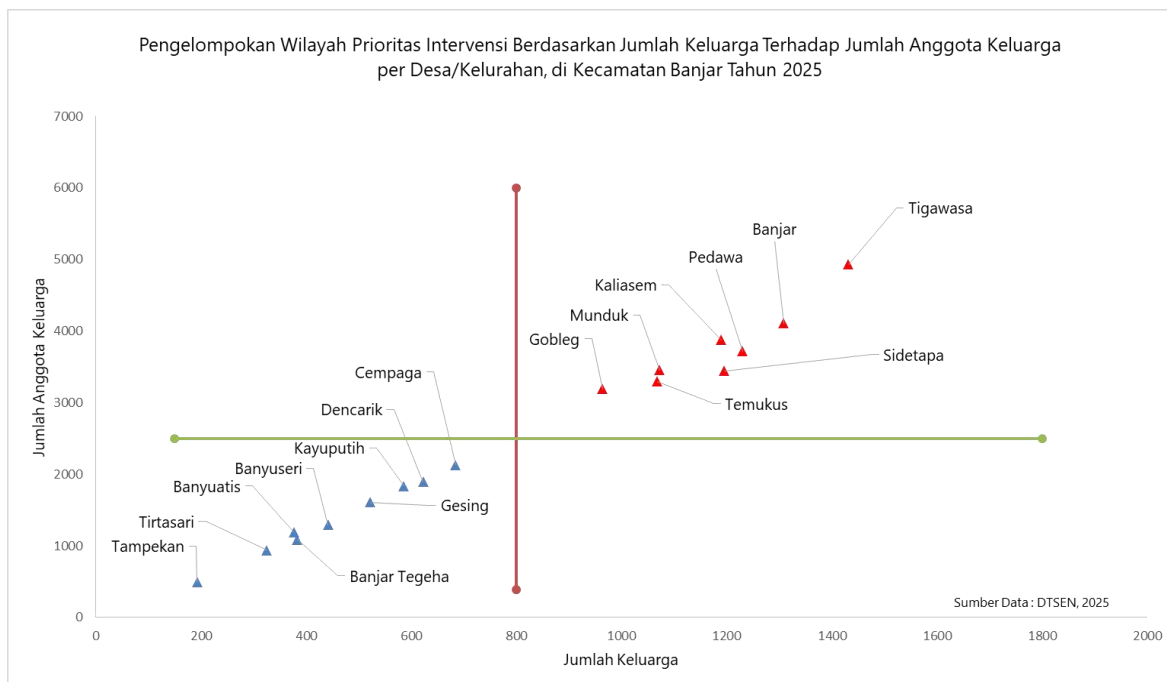
- o Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Penglatan, Banjar Jawa, Kalibukbuk, Petandakan, Kampung Bugis, Tukad Mungga, Baktiseraga, Banyuasri, Nagasepaha, Kaliuntu, Banjar Bali, Pamaron, Banjar Tegal, Astina, Kendran, Kampung Singaraja, Paket Agung, Liligundi, dan Beratan.

Wilayah-wilayah desa/kelurahan berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Buleleng.

Kecamatan Banjar

Hasil analisis prioritas wilayah intervensi desa di Kecamatan Banjar sebagai berikut.

Gambar 5.6 Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Banjar



Grafik di atas menunjukkan :

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Tigawasa, Banjar, Pedawa, Sidetapa, Kaliasem, Munduk, Temukus, dan Gobleg.
- o Wilayah prioritas kedua (Kuadran II) dan prioritas ketiga (Kuadran III) tidak



ada.

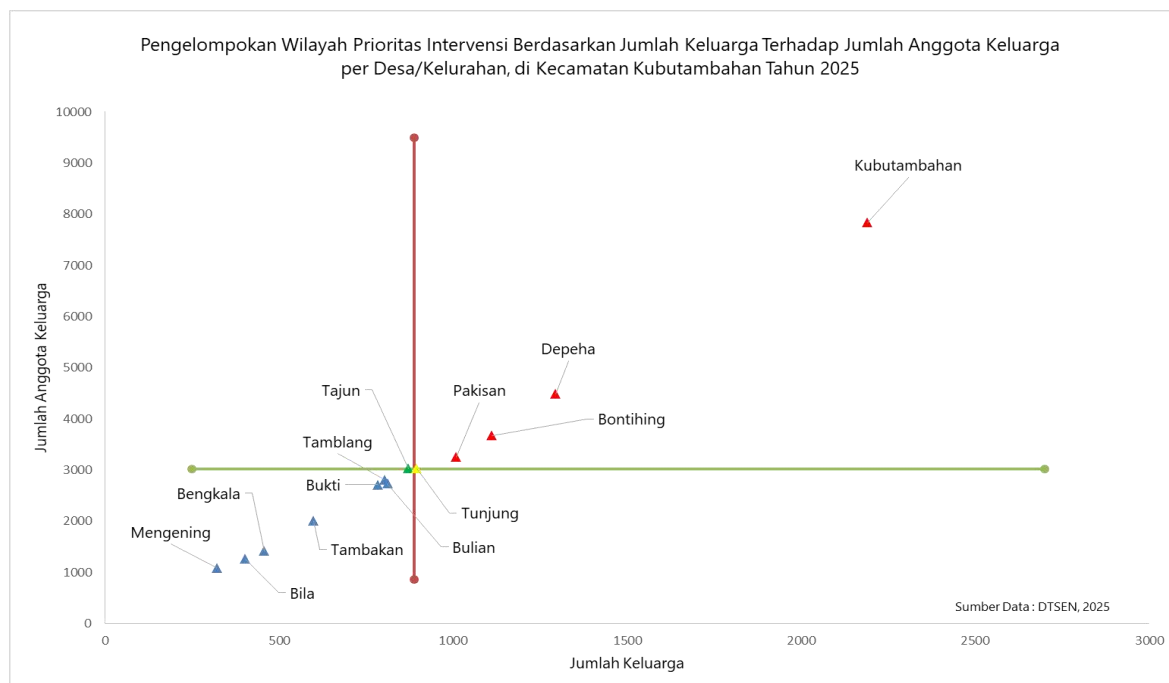
- o Wilayah prioritas Kuadran IV adalah Desa Cempaga, Dencarik, Kayuputih, Gesing, Banyuseri, Banjar Tegeha, Banyuatis, Tirta Sari, dan Tampekan.

Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Banjar.

Kecamatan Kubutambahan

Berikut hasil analisis kuadran wilayah di Kecamatan Kubutambahan.

Gambar 5.7
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Kubutambahan



Grafik di atas menunjukkan :

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Kubutambahan, Depeha, Bontihing, dan Pakisan.
- o Wilayah prioritas Kuadran II adalah Desa Tunjung.
- o Wilayah prioritas Kuadran III adalah Desa Tajun.
- o Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Bulian, Tamblang, Bukti, Tambakan, Bengkala, Bila, dan Mengening.

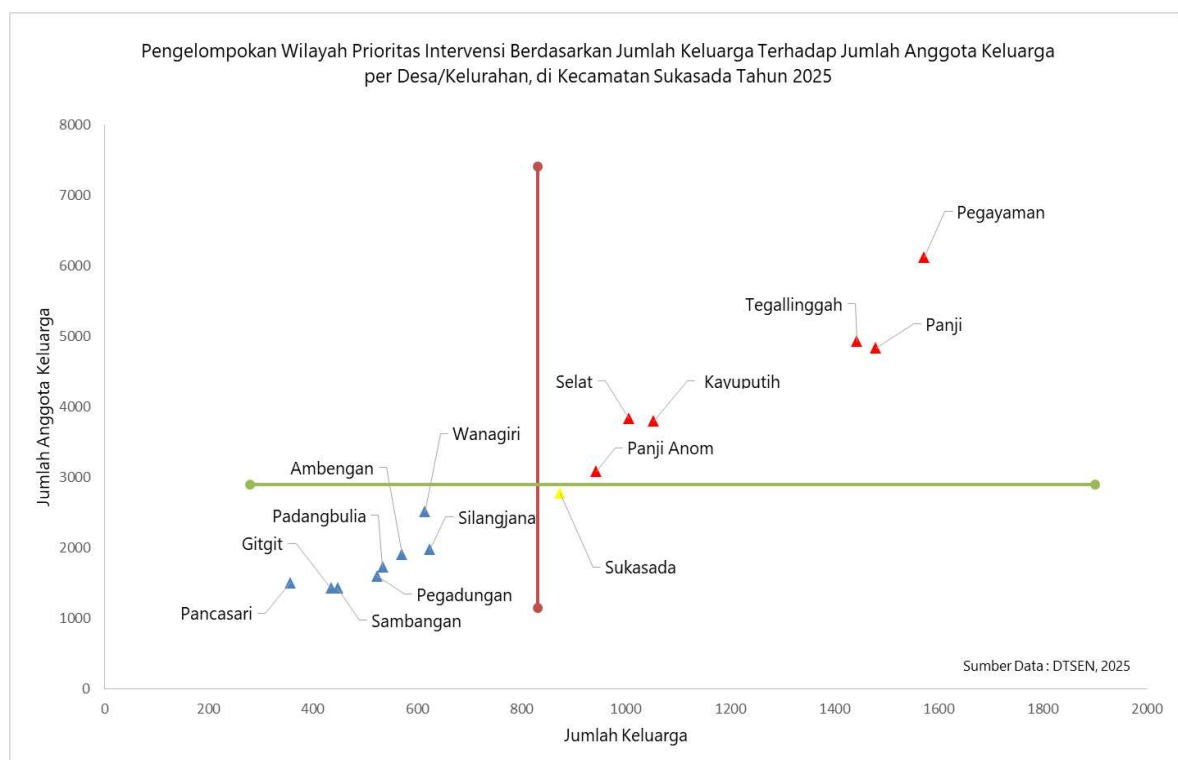


Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Kubutambahan.

Kecamatan Sukasada

Berikut hasil analisis prioritas wilayah intervensi desa/kelurahan di Kecamatan Sukasada.

Gambar 5.8
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Sukasada



Grafik diatas menunjukkan:

- Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Pegayaman, Panji, Tegal Linggah, Kayuputih, Selat, dan Panji Anom.
- Wilayah prioritas kedua (Kuadran II) adalah Desa Sukasada.
- Wilayah prioritas ketiga (Kuadran III) tidak ada.
- Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Silangjana, Wanagiri, Ambengan, Padangbulia, Pegadungan, Sambangan, Gitgit, dan Pancasari.

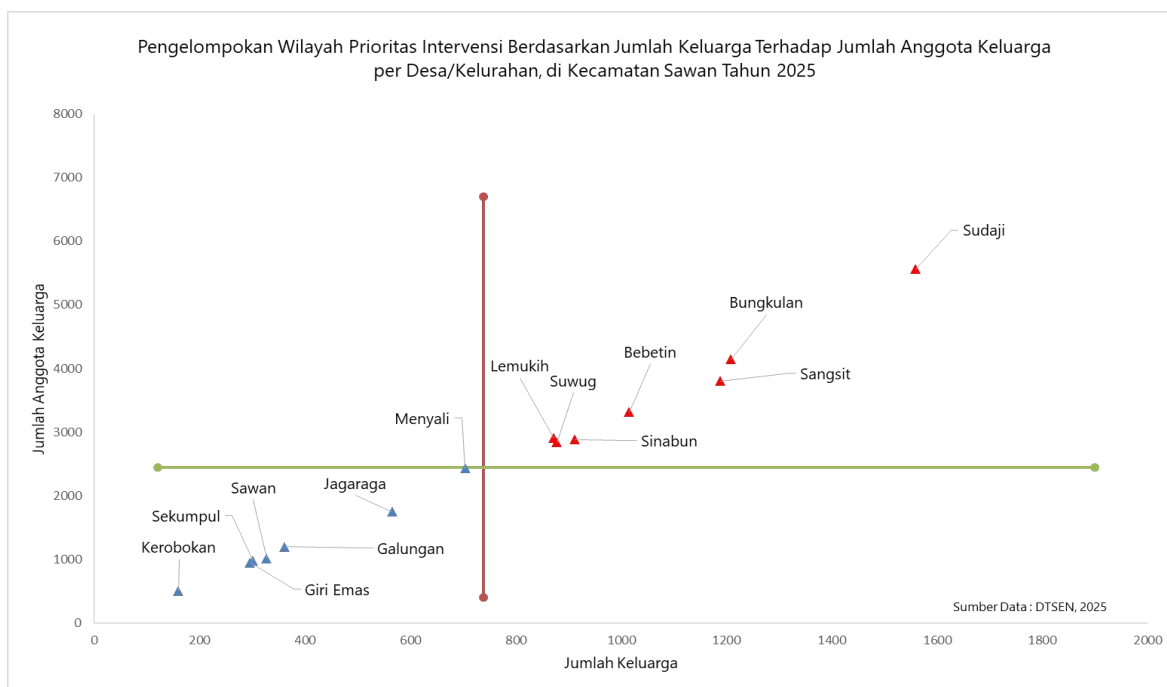


Wilayah-wilayah desa/kelurahan berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sukasada.

Kecamatan Sawan

Berikut hasil analisis kuadran di Kecamatan Sawan.

Gambar 5.9
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Sawan



Grafik di atas menunjukkan :

- o Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I pengentasan kemiskinan adalah Desa Sudaji, Bungkulan, Sangsit, Bebetin, Sinabun, Suwug, dan Lemukih.
- o Wilayah prioritas kedua (dalam Kuadran II) dan prioritas ketiga (dalam Kuadran III) tidak ada.
- o Wilayah Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Menyali, Jagaraga, Galungan, Sawan, Sekumpul, Giri Emas, dan Kerobokan.

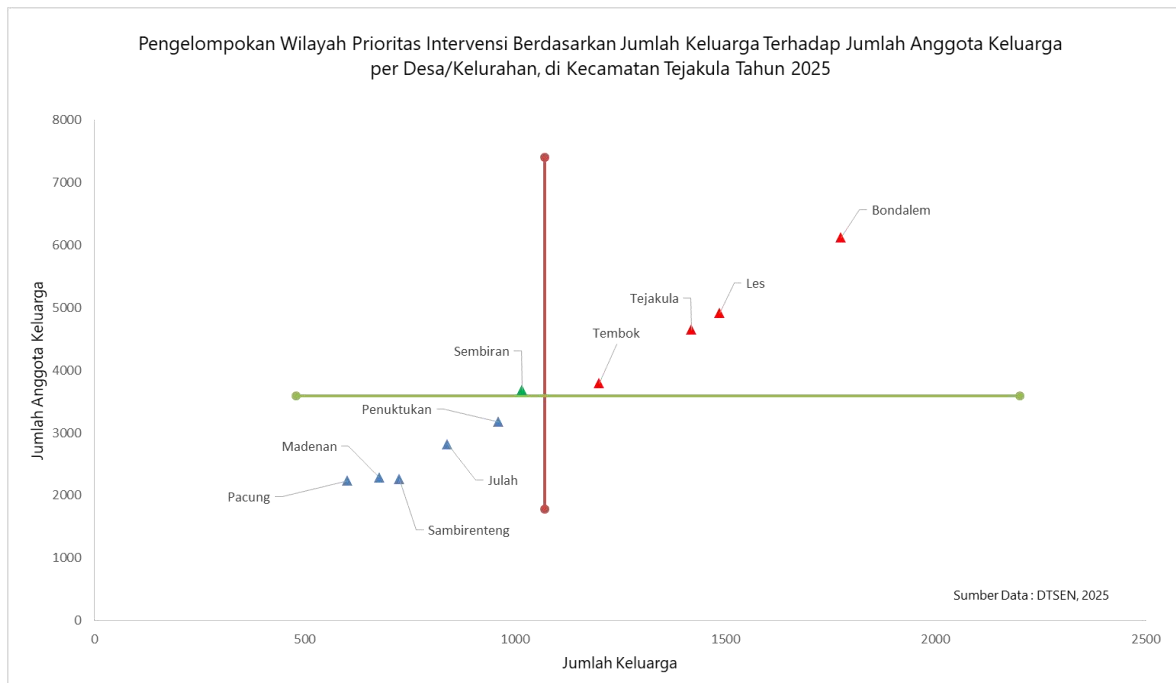
Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Sawan.



Kecamatan Tejakula

Hasil analisis kuadran wilayah di Kecamatan Tejakula sebagai berikut.

Gambar 5.10
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Intervensi Kecamatan Tejakula



Gambar diatas menunjukkan:

- Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I penanggulangan kemiskinan adalah Desa Bondalem, Les, Tejakula, dan Tembok.
- Wilayah prioritas kedua (Kuadran II) adalah Desa Sembiran.
- Wilayah prioritas ketiga (Kuadran III) tidak ada.
- Wilayah prioritas yang masuk Kuadran IV adalah Desa Penuktukan, Julah, Sambirenteng, Madenan, dan Pacung.

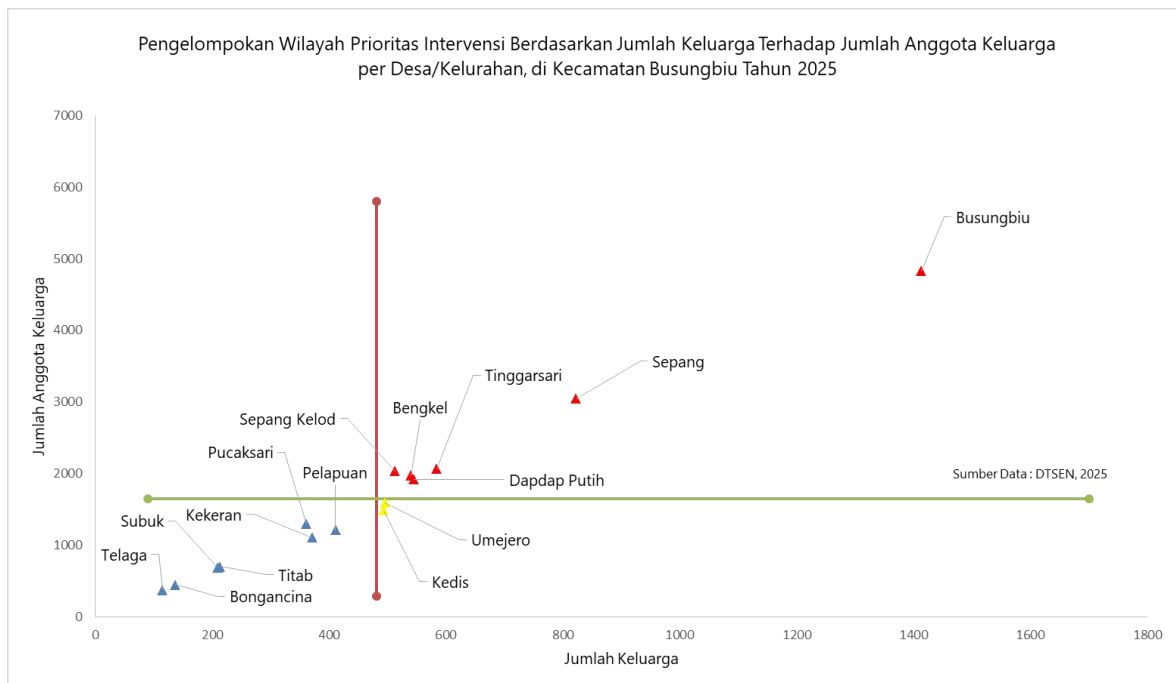
Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Tejakula.



Kecamatan Busungbiu

Hasil analisis kuadran wilayah di Kecamatan Busungbiu sebagai berikut.

Gambar 5.11
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Busungbiu



Grafik diatas menunjukkan:

- Wilayah prioritas pertama yang masuk Kuadran I penanggulangan kemiskinan adalah Desa Busungbiu, Sepang, Tinggarsari, Dapdap Putih, Bengkel, dan Sepang Kelod
- Wilayah prioritas kedua di Kuadran II adalah Desa Umejero dan Kedis.
- Wilayah prioritas ketiga di Kuadran III tidak ada
- Wilayah prioritas selanjutnya yang masuk Kuadran IV adalah Desa Pelapuan, Kekeran, Pucaksari, Titab, Subuk, Bongancina, dan Telaga.

Wilayah-wilayah desa berdasarkan hasil analisa kuadran prioritas tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Busungbiu.



Tabel 5.1
Rekapitulasi Hasil Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Desa/Kelurahan
per Kecamatan di Kabupaten Buleleng Tahun 2025

KECAMATAN	DESA/KELURAHAN								
	PRIORITAS I		PRIORITAS II		PRIORITAS III		PRIORITAS IV		
Gerokgak	1	Gerokgak					7	Banyupoh	
	2	Patas					8	Celukanbawang	
	3	Pejarakan					9	Musi	
	4	Pemuteran					10	Pengulon	
	5	Sumberkima					11	Penyabangan	
	6	Tukadsumaga					12	Sanggalangit	
							13	Sumberklampok	
							14	Tinga-tinga	
	Seririt	1	Banjarasem					9	Bestala
		2	Joanyar					10	Bubunan
		3	Kalianget					11	Gunungsari
		4	Lokapaksa					12	Kalisada
		5	Mayong					13	Munduk Bestala
6		Pangkungparuk					14	Pengastulan	
7		Patemon					15	Rangdu	
8		Ringdikit					16	Seririt	
							17	Sulanyah	
							18	Tangguwisia	
							19	Ularan	
						20	Umeanyar		
						21	Unggahan		
Buleleng	1	Alasangker					11	Astina	
	2	Anturan					12	Baktiseraga	
	3	Banyuning					13	Banjar Bali	
	4	Jinengdalem					14	Banjar Jawa	
	5	Kampung Anyar					15	Banjar Tegal	
	6	Kampung Baru					16	Banyuasri	
	7	Kampung Kajanan					17	Beratan	
	8	Penarukan					18	Kalibukbuk	
	9	Poh Bergong					19	Kaliuntu	
	10	Sarimekar					20	Kampung Bugis	
							21	Kampung Singaraja	



BAB V LOKASI PRIORITAS

							22	Kendran
							23	Liligundi
							24	Nagasepaha
							25	Paket Agung
							26	Pemaron
							27	Penglatan
							28	Petandakan
							29	Tukadmungga
Banjar	1	Banjar					9	Banjar Tegeha
	2	Gobleg					10	Banyuatis
	3	Kaliasem					11	Banyuseri
	4	Munduk					12	Cempaga
	5	Pedawa					13	Dencarik
	6	Sidetapa					14	Gesing
	7	Temukus					15	Kayuputih
	8	Tigawasa					16	Tampekan
							17	Tirtasari
Kubutambahan	1	Bontihing	5	Tunjung	6	Tajun	7	Bengkala
	2	Depeha					8	Bila
	3	Kubutambahan					9	Bukti
	4	Pakistan					10	Bulian
							11	Mengening
							12	Tambakan
							13	Tamblang
Sukasada	1	Kayuputih	7	Sukasada			8	Ambengan
	2	Panji					9	Gitgit
	3	Panji Anom					10	Padangbulia
	4	Pegayaman					11	Pancasari
	5	Selat					12	Pegadungan
	6	Tegallinggah					13	Sambangan
							14	Silangjana
							15	Wanagiri
Sawan	1	Bebetin					8	Galungan
	2	Bungkulan					9	Giri Emas
	3	Lemukih					10	Jagaraga
	4	Sangsit					11	Kerobokan



	5	Sinabun				12	Menyali
	6	Sudaji				13	Sawan
	7	Suwug				14	Sekumpul
Tejakula	1	Bondalem		5	Sembiran	6	Julah
	2	Les				7	Madenan
	3	Tejakula				8	Pacung
	4	Tembok				9	Penuktukan
						10	Sambirenteng
Busungbiu	1	Bengkel	7	Kedis		9	Bongancina
	2	Busungbiu	8	Umejero		10	Kekeran
	3	Dapdap Putih				11	Pelapuan
	4	Sepang				12	Pucaksari
	5	Sepang Kelod				13	Subuk
	6	Tinggarsari				14	Telaga
						15	Titab

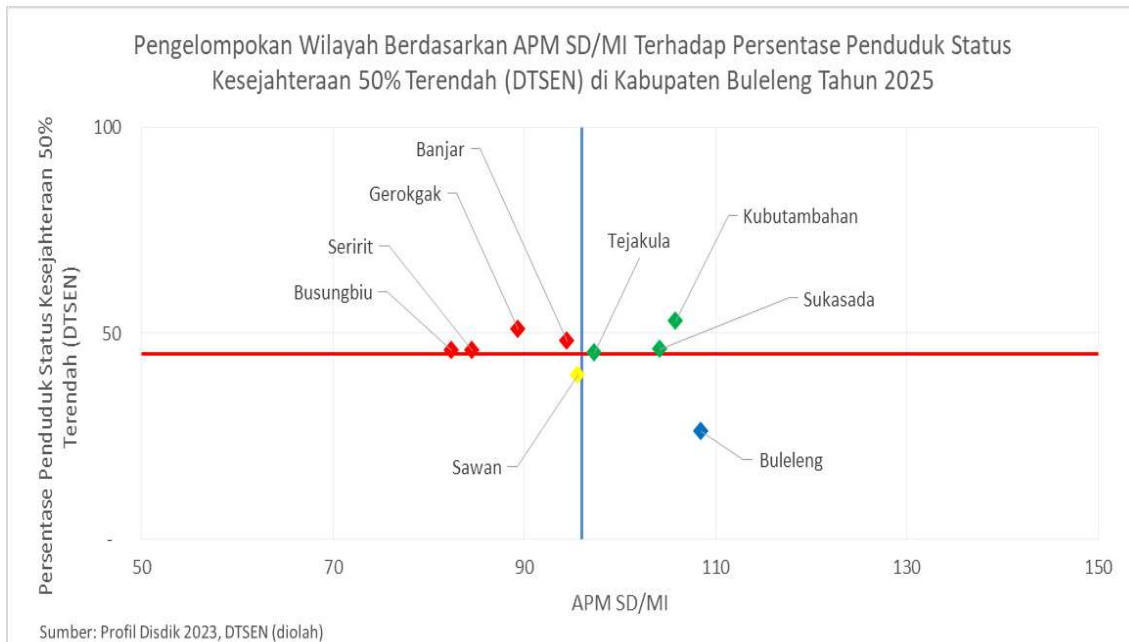
2. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

Penentuan prioritas wilayah dilakukan untuk menentukan lokasi yang menjadi pilihan pelaksanaan program-program prioritas penanggulangan kemiskinan. Lokasi prioritas wilayah dianalisis berdasarkan hasil analisis pada Bab 3 dan Bab 4. Hasil pemetaan wilayah ini didapat berdasarkan capaian indikator utama dan indikator pendukungnya yang mewakili prioritas intervensi. Makin buruk kondisi suatu wilayah berdasarkan capaian kedua indikator tersebut, makin tinggi urutan prioritasnya untuk diintervensi melalui program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Proses analisis prioritas wilayah bidang pendidikan dilakukan dengan menggunakan data Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sebagai indikator utama. Persentase penduduk miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah data DTSEN sebagai indikator pendukung. Dari kedua indikator tersebut diperoleh grafik wilayah kecamatan prioritas intervensi di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut.



Gambar 5.12
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan APM SD/MI Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



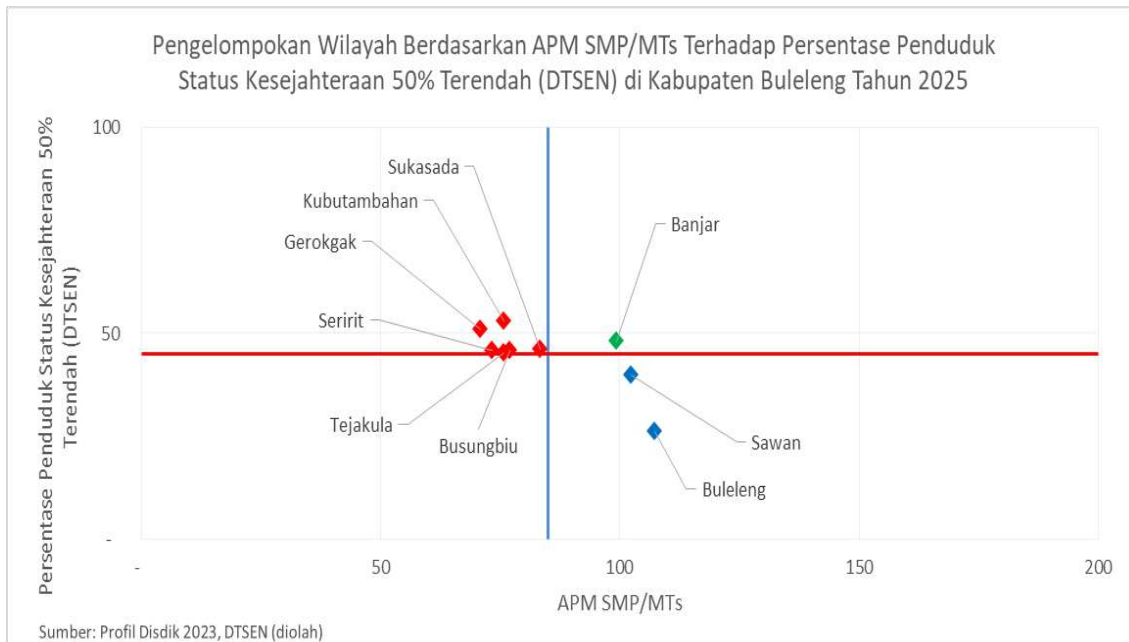
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Busungbiu, Seririt, Gerokgak dan Banjar
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Sawan
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Tejakula, Sukasada, dan Kubutambahan
- Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Buleleng.

Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan APM SD/MI.



Gambar 5.13
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan APM SMP/MTs Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah Kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak, Seririt, Kubutambahan, Tejakula, Busungbiu, dan Sukasada
- Wilayah prioritas kedua tidak ada
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Banjar
- Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Sawan dan Buleleng.

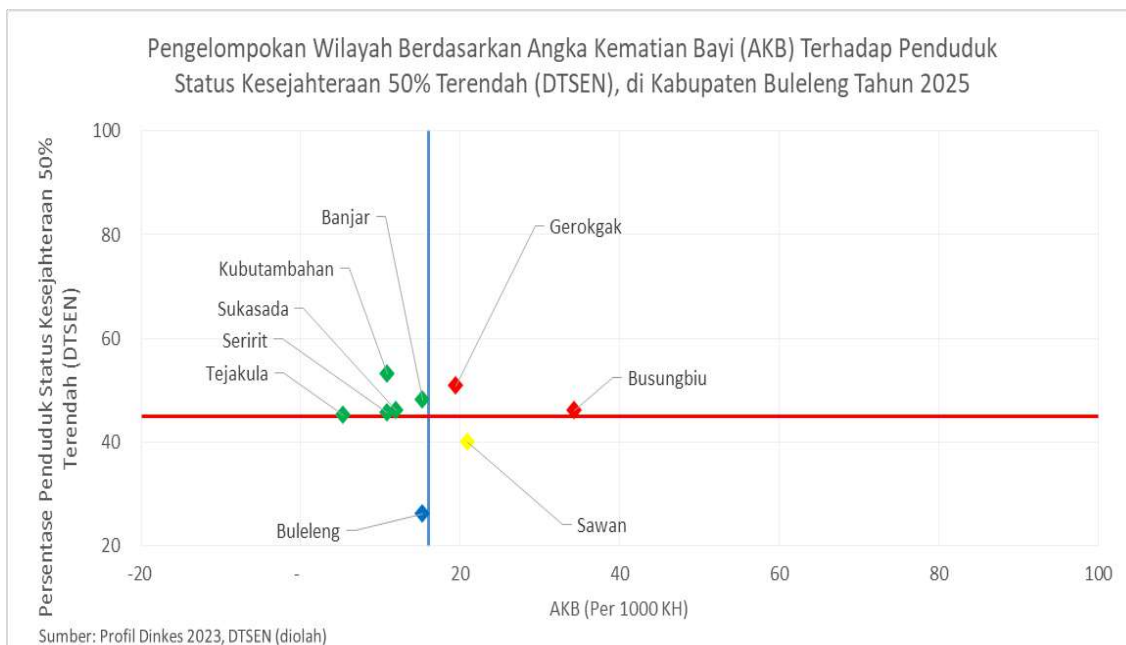
Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan APM SMP/MTs.

3. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Proses analisis prioritas wilayah bidang kesehatan menggunakan data Angka Kematian Bayi (AKB) sebagai indikator utama dan persentase penduduk miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah pada DTSEN. Dari kedua indikator tersebut diperoleh grafik wilayah prioritas intervensi sebagai berikut.



Gambar 5.14
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Angka Kematian Bayi (AKB) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



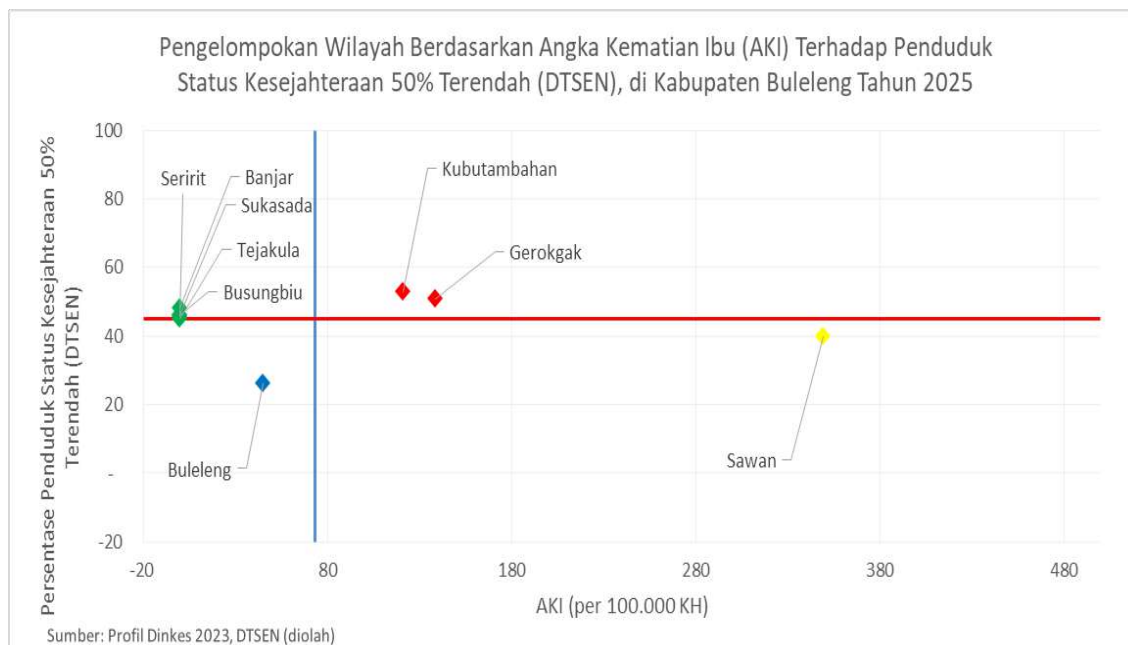
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak dan Busungbiu
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Sawan
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Banjar, Sukasada, Kubutambahan, Seririt dan Tejakula
- Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Buleleng.

Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, prioritas penanganan AKB khususnya. Selain AKB, indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI) di analisis dengan persentase penduduk miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah pada DTSEN sebagaimana grafik berikut.



Gambar 5.15
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Angka Kematian Ibu (AKI) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak dan Kubutambahan
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Sawan
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Banjar, Sukasada, Tejakula, Busungbiu, dan Seririt
- Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Buleleng.

Wilayah-wilayah prioritas kecamatan tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan Angka Kematian Ibu.

4. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Pada bidang infrastruktur dasar, analisis prioritas wilayah menggunakan data jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebagai indikator utama dengan persentase penduduk miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah pada DTSEN. Dari kedua indikator tersebut diperoleh grafik wilayah prioritas intervensi



sesuai Gambar 5.15 berikut.

Gambar 5.16
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak, Banjar, Seririt dan Sukasada
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Kubutambahan, Busungbiu dan Tejakula
- Wilayah prioritas ketiga adalah tidak ada
- Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Buleleng dan Sawan.

Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan RTLH.

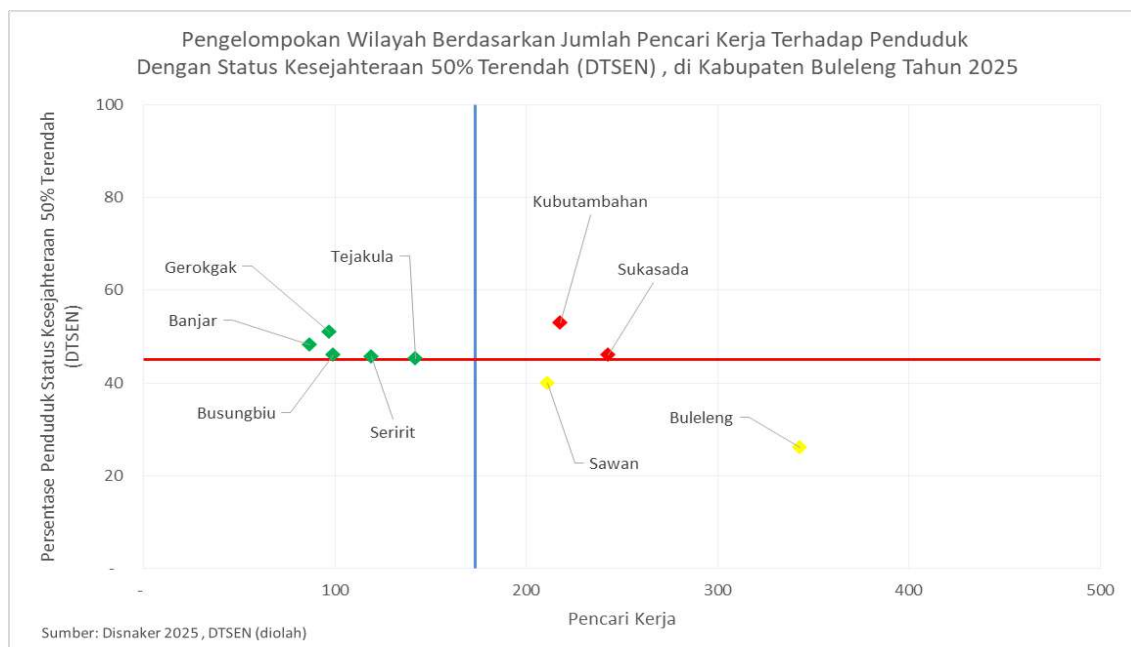
5. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Pada bidang ketenagakerjaan, analisis prioritas wilayah menggunakan data jumlah pencari kerja sebagai indikator utama dengan persentase penduduk



miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah pada DTSEN. Dari kedua indikator tersebut diperoleh grafik wilayah prioritas intervensi sesuai Gambar 5.16 berikut.

Gambar 5.17
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan Jumlah Pencari Kerja Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Sukasada dan Kubutambahan
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Buleleng dan Sawan
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Tejakula, Seririt, Busungbiu, Gerokgak, dan Banjar
- Wilayah prioritas keempat tidak ada

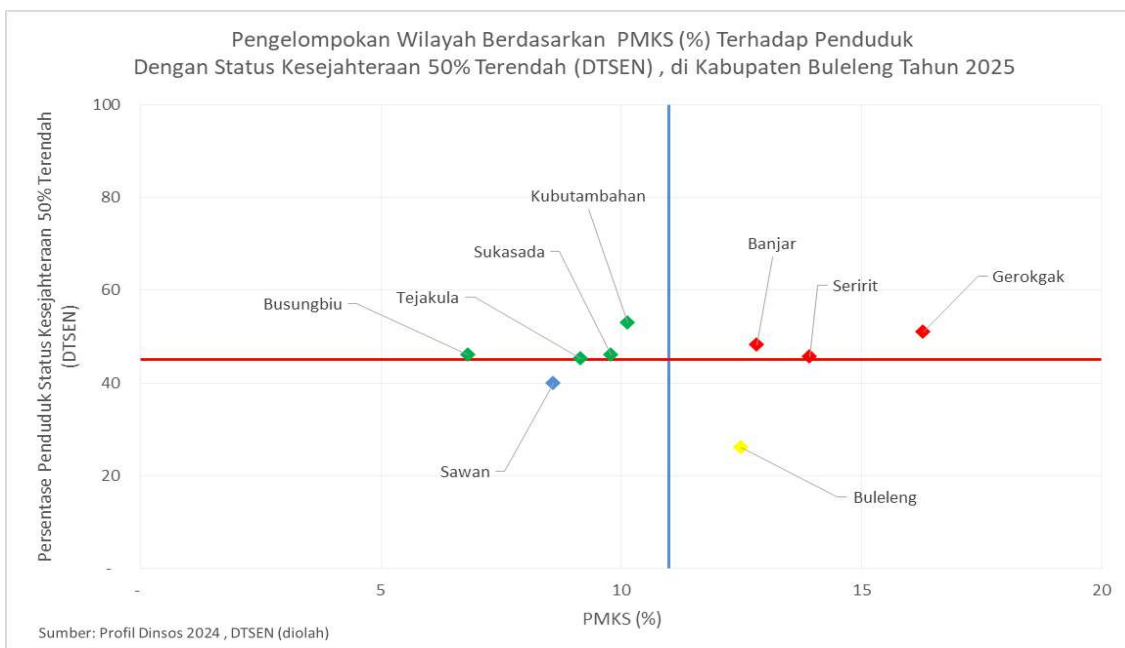
Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan pencari kerja yang berharap mendapatkan pekerjaan.



6. Prioritas Wilayah Bidang Sosial

Pada bidang sosial, analisis prioritas wilayah menggunakan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai indikator utama dengan persentase penduduk miskin dengan status kesejahteraan 50% terendah pada DTSEN. Data yang tergabung dalam PMKS yaitu Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, dan Fakir Miskin. Dari kedua indikator tersebut diperoleh grafik wilayah prioritas intervensi sesuai Gambar 5.17 berikut.

Gambar 5.18
Analisis Kuadran Prioritas Wilayah Kecamatan Berdasarkan PMKS (%) Terhadap Penduduk Dengan Status Kesejahteraan 50% Terendah (DTSEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2025



Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

- Wilayah kecamatan yang masuk prioritas pertama adalah Kecamatan Gerokgak, Seririt, dan Banjar
- Wilayah prioritas kedua adalah Kecamatan Buleleng
- Wilayah prioritas ketiga adalah Kecamatan Kubutambahan, Sukasada, Tejakula, dan Busungbiu



- o Wilayah prioritas keempat adalah Kecamatan Sawan.

Wilayah-wilayah prioritas kecamatan berdasarkan hasil analisis kuadran tersebut menjadi skala prioritas intervensi dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya prioritas penanganan PMKS.

Prioritas-prioritas lain pada semua bidang yang tidak dilakukan analisis prioritas wilayah namun masih bermasalah sesuai dengan hasil analisis pada bab 3 dan bab 4 tetap menjadi prioritas intervensi. Prioritas tersebut akan dituangkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Buleleng pada periode tahun berkenaan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.



BAB VI PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang kompleks dan bersifat multi dimensi, multi sektor, memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang terpadu, sistematis, dan menyeluruh. Langkah penanganannya ditujukan untuk memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak dalam mewujudkan kehidupan yang bermartabat, diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan serta meminimalkan kantong-kantong kemiskinan.

Kabupaten Buleleng berkomitmen menurunkan angka kemiskinan dengan menempatkan kemiskinan sebagai kebijakan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen strategis di daerah, yaitu Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029.

Sejalan dengan sistim perencanaan, RPKD seharusnya dapat mengisi, memperkaya dan memperkuat substansi proses penyusunan dari setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik dokumen 5 tahunan yakni RPJMD dan Renstra-OPD, serta dokumen tahunan RPKD dan Renja SKPD. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah menuju arah perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng
Sekretaris TKPK

Putu Ayu Reika Nurhaeni, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19720809 199201 2 002



6.1. Matriks Prioritas Program

Prioritas program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari beberapa isu strategis bidang penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam matriks. Selain program prioritas, dicantumkan pula program-program baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung penanggulangan kemiskinan. Matriks penanggulangan kemiskinan diantaranya memuat kebijakan/strategi, urusan pemerintahan/bidang, program, serta target output dan pagu indikatif selama 5 (lima) tahun kedepan. Matriks ini merupakan penjabaran program yang mendukung tujuan, sasaran dan indikator sasaran Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2025-2029 yang telah dituangkan pada Bab 4. Target kinerja program penanggulangan kemiskinan menyesuaikan dengan target program dalam RPJMD periode tahun 2026-2030 sebagaimana Tabel 6.1.



Tabel 6.1
Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng Tahun 2026-2030

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
A	PENGURANGAN BEBAN MASYARAKAT													
1	Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	100%	144.398.592.650,00	100%	333.373.095.000,00	100%	335.773.095.000,00	100%	337.773.095.000,00	100%	340.773.095.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
2	Urusan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	99,97%	86.504.302.609,00	99,97%	246.308.357.000,00	99,98%	260.919.289.000,00	99,98%	278.264.068.000,00	99,99%	290.646.155.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kesehatan
3	Urusan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	96,18%	2.717.687.793,00	96,52%	2.017.687.793,00	96,87%	2.039.331.816,97	97,22%	2.091.531.816,97	97,91%	2.710.531.816,97	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	100%	63.897.008,00	100%	1.042.079.776,00	100%	1.842.079.776,00	100%	2.042.079.776,00	100%	2.242.079.776,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	10,84%	561.703.718,00	11,84%	662.688.849,97	12,84%	820.000.000,00	13,84%	950.000.000,00	14,84%	1.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
		Program Penanganan Bencana	100%	102.152.500,00	100%	700.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.500.000.000,00	100%	1.600.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Sosial
4	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	3,5%	215.312.886,00	4%	250.000.000,00	4,25%	350.000.000,00	4,5%	400.000.000,00	5%	450.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
5	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	100%	652.351.608,00	100%	1.000.000.000,00	100%	2.000.000.000,00	100%	1.400.000.000,00	100%	1.500.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
6	Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	60%	68.000.719,00	61%	90.600.000,00	62%	99.600.000,00	63%	107.600.000,00	64%	115.600.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
7	Kelautan dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3,34%	395.000.000,00	1,26%	852.220.000,00	0,69%	852.220.000,00	2,14%	900.000.000,00	1,59%	1.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
8	Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90,5%	701.000.000,00	90,75%	350.000.000,00	90,8%	375.000.000,00	91%	400.000.000,00	91,25%	450.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
9	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	87,13%	425.546.490,00	89,65%	450.000.000,00	92,18%	477.500.000,00	94,7%	510.000.000,00	97,23%	550.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	100%	54.932.746,00	100%	70.000.000,00	100%	77.000.000,00	100%	83.000.000,00	100%	90.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	85%	101.569.653,00	85%	118.000.000,00	85%	129.500.000,00	85%	142.000.000,00	85%	165.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	5.870.760,00	100%	10.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	13.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	2.070.156.369,00	100%	650.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	950.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
B	PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT													
1	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,86%	2.346.831.193,96	2,43%	1.500.000.000,00	4,84%	4.200.000.000,00	7,29%	4.200.000.000,00	9,78%	2.500.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pertanian
2	Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	80,26%	12.322.672.219,00	81,86%	9.559.698.088,00	83,5%	10.826.549.674,00	85,17%	12.728.938.380,00	86,77%	12.757.255.347,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
3	Kelautan Dan Perikanan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3,34%	395.000.000,00	1,26%	852.220.000,00	0,69%	852.220.000,00	2,14%	900.000.000,00	1,59%	1.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	27,5%	80.000.000,00	27,75%	151.228.713,00	28%	163.750.000,00	28,5%	177.250.000,00	29%	191.800.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
5	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1,3%	162.000.000,00	1,35%	556.400.000,00	1,4%	606.400.000,00	1,45%	656.400.000,00	1,5%	806.400.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6	Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	76,74%	85.660.918,00	77,24%	200.000.000,00	77,74%	250.000.000,00	78,24%	275.000.000,00	78,75%	300.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Kecamatan Banjar
7	Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,15%	638.450.158,00	0,15%	800.000.000,00	0,15%	850.000.000,00	0,15%	977.220.000,00	0,15%	1.002.220.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,49%	385.000.000,00	1,5%	600.000.000,00	1,5%	700.000.000,00	1,51%	800.000.000,00	1,48%	900.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
8	Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	215.490.384,04	100%	700.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.100.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	15%	786.800.000,00	15%	843.542.524,00	20%	1.043.542.524,00	25%	1.043.542.524,00	25%	1.043.542.524,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pertanian
9	Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	23.015.328,00	100%	65.000.000,00	100%	75.000.000,00	100%	85.000.000,00	100%	95.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Lingkungan Hidup
10	Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	13,3%	366.999.281,00	13,4%	762.282.130,00	14,3%	782.000.000,00	15%	812.000.000,00	15,5%	844.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
11	Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2%	265.845.512,00	2%	855.600.000,00	2%	1.055.600.000,00	2%	1.155.600.000,00	2%	1.255.600.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pariwisata
12	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pengembangan UMKM	1,3%	490.000.000,00	1,35%	400.000.000,00	1,4%	450.000.000,00	1,45%	475.000.000,00	1,5%	550.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	100%	40.312.876,00	100%	250.000.000,00	100%	300.000.000,00	100%	350.000.000,00	100%	375.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
14	Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	40%	1.850.000.000,00	60%	1.200.000.000,00	80%	1.400.000.000,00	100%	1.600.000.000,00	100%	1.800.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Kebudayaan
C	PENURUNAN JUMLAH KANTONG-KANTONG KEMISKINAN													
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5,21%	45.000.000,00	5,61%	2.000.000.000,00	6,01%	2.200.000.000,00	6,41%	2.600.000.000,00	6,81%	3.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	80%	10.150.000.000,00	80,5%	3.500.000.000,00	81%	3.700.000.000,00	81,5%	4.000.000.000,00	82%	5.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	89,5%	746.350.000,00	90%	2.500.000.000,00	90,5%	2.700.000.000,00	91%	3.500.000.000,00	91,5%	4.500.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	100%	15.250.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	100%	2.350.000.000,00	100%	2.450.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Kawasan Permukiman	50,00%	465.219.808,00	70,59%	600.000.000,00	76,19%	650.000.000,00	80,00%	700.000.000,00	82,76%	800.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	21,23%	8.296.594.750,00	31,84%	6.600.000.000,00	42,25%	8.700.000.000,00	53,07%	8.800.000.000,00	63,68%	9.900.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	90,5%	701.000.000,00	90,75%	350.000.000,00	90,8%	375.000.000,00	91%	400.000.000,00	91,25%	450.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	65%	84.000.000,00	70%	300.000.000,00	75%	400.000.000,00	85%	425.000.000,00	85%	450.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
4	Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.462,49 Ha	615.000.000,00	6.462,49 Ha	1.200.000.000,00	6.462,49 Ha	4.200.000.000,00	6.462,49 Ha	4.200.000.000,00	6.462,49 Ha	2.200.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pertanian
5	Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	0,15%	638.450.158,00	0,15%	800.000.000,00	0,15%	850.000.000,00	0,15%	977.220.000,00	0,15%	1.002.220.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1,49%	385.000.000,00	1,5%	600.000.000,00	1,5%	700.000.000,00	1,51%	800.000.000,00	1,48%	900.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
6	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	100%	144.398.592.650,00	100%	333.373.095.000,00	100%	335.773.095.000,00	100%	337.773.095.000,00	100%	340.773.095.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
		Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	96,61%	923.628.350,00	97,21%	17.000.000.000,00	97,81%	24.300.000.000,00	98,4%	29.300.000.000,00	99%	37.000.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
7	Transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	25%	10.000.000,00	26%	11.700.000,00	27%	14.300.000,00	28%	17.300.000,00	29%	20.300.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Tenaga Kerja
8	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	80,60%	19.264.644.320,00	80,70%	21.175.000.000,00	80,80%	23.855.000.000,00	80,91%	29.325.000.000,00	81,01%	26.275.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Perhubungan
9	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	25%	813.311.456,00	30%	3.500.000.000,00	35%	4.750.000.000,00	40%	4.900.000.000,00	50%	5.150.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pariwisata



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
10	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Program Penataan Desa	84,50%	129.999.648,00	88,37%	200.000.000,00	92,25%	300.000.000,00	96,12%	500.000.000,00	100%	600.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	100%	39.999.977,00	100%	200.000.000,00	100,00%	300.000.000,00	100,00%	400.000.000,00	100,00%	500.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	100%	2.385.396.000,00	100%	2.450.000.000,00	100%	2.650.000.000,00	100%	2.750.000.000,00	100%	2.950.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	100%	2.070.156.369,00	100%	650.000.000,00	100%	750.000.000,00	100%	850.000.000,00	100%	950.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	84,3%	3.175.290.776,00	84,6%	650.660.000,00	84,8%	800.660.000,00	85%	900.660.000,00	85,2%	1.000.660.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	24,31%	4.500.800.000,00	26,74%	200.000.000,00	29,4%	250.000.000,00	32,35%	300.000.000,00	35,6%	325.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



BAB VI

PENUTUP

NO	URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG	PROGRAM	TARGET 2026		TARGET 2027		TARGET 2028		TARGET 2029		TARGET 2030		LOKASI PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)	KINERJA	PAGU (Rp)		
12	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	100%	1.148.000.000,00	100%	1.175.000.000,00	100%	1.200.000.000,00	100%	1.225.000.000,00	100%	1.250.000.000,00	Kabupaten Buleleng	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
13	Kewilayahan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	89.630.470,00	100%	274.400.000,00	100%	324.400.000,00	100%	349.400.000,00	100%	374.400.000,00	Kabupaten Buleleng	Kecamatan Seririt

BUPATI BULELENG,

Ttd.

I NYOMAN SUTJIDRA